



2021

# *LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN*

*Pengadilan Tinggi Palangkaraya  
Siap Mempertahankan Wilayah Bebas dari Korupsi  
Siap Meraih Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani*





## KATA PENGANTAR KETUA PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA



Puji Syukur kehadirat Allah SWT, karena atas ijin-Nya Laporan Pelaksanaan Kegiatan tahun 2021 Pengadilan Tinggi Palangkaraya dapat diselesaikan. Tujuan dari pembuatan Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan kegiatan serta sebagai bentuk pertanggungjawaban Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya kepada Ketua Mahkamah Agung RI dalam pelaksanaan kegiatan selama tahun anggaran 2021.

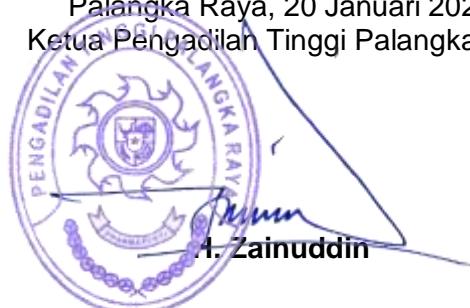
Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini semoga dapat menjadi bahan evaluasi dan tolak ukur dalam pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2021 dan menjadi bahan perbaikan untuk masa yang akan datang

Ditengah Pandemi Covid-19, Pengadilan Tinggi Palangkaraya tetap berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan kepada pencari keadilan, salah satunya memberikan layanan prioritas kepada penyandang disabilitas dengan membangun prasarana serta melatih SDM dalam rangka mewujudkan Pengadilan yang Inklusi. Selain itu, Pengadilan Tinggi Palangkaraya juga menciptakan inovasi pelayanan, termasuk dengan *launching* aplikasi “**HUMA-BETANG**”, yang didalamnya terdapat berbagai aplikasi termasuk aplikasi unggulan untuk **mempermudah permohonan izin besuk tahanan** serta **percepatan perbaikan akta kependudukan berdasarkan putusan/penetapan pengadilan** di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palangkaraya.

Selaku pimpinan di Pengadilan Tinggi Palangkaraya, kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada seluruh jajaran Pengadilan Tinggi Palangkaraya, atas prestasi yang diraih selama tahun 2021 diantaranya meraih Juara II Lomba Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kategori Pengadilan Tinggi Tahun 2021. Prestasi ini merupakan bagian dari usaha mempertahankan prestasi kami di tahun 2020, saat ini kami juga berhasil meraih Juara II untuk kategori yang sama.

Semoga pada tahun 2022 Pengadilan Tinggi Palangkaraya berhasil meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Palangka Raya, 20 Januari 2022  
Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya



# DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
BAB II TUGAS DAN FUNGI .....	8
A. Keadaan Perkara .....	8
B. Penyelesaian Perkara .....	13
C. Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan) .....	16
- Posbakum .....	16
- Sidang Keliling .....	17
- Perkara Prodeo .....	19
BAB III SUMBER DAYA MANUSIA .....	20
BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA DAN TI .....	84
A. Pengelolaan Keuangan .....	84
B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana .....	95
C. Pengelolaan TI .....	107
BAB V PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK .....	116
A. Akreditasi Penjaminan Mutu .....	116
B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) .....	119
C. Inovasi Pelayanan Publik .....	126
BAB VI PENGAWASAN .....	146
A. Internal .....	146
B. Evaluasi .....	150
BAB VII PENUTUP .....	152
A. Simpulan .....	152
B. Saran .....	153



# BAB I

## PENDAHULUAN

Pengadilan Tinggi Palangkaraya berada di kota Palangkaraya dengan wilayah hukum meliputi wilayah provinsi Kalimantan Tengah. Singkatnya, sejarah terbentuknya provinsi Kalimantan Tengah bermula dari berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Kemudian, berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957, dibentuklah Provinsi Kalimantan Tengah yang merupakan pemekaran dari Provinsi Kalimantan Selatan.

Selanjutnya, pada tanggal 25 Oktober 2012, Provinsi Kalimantan Utara dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 yang merupakan pemekaran dari Kalimantan Timur, sehingga pada saat ini di Kalimantan terdapat 5 Provinsi



Provinsi Kalimantan Tengah terdiri dari 1 (satu) Kota dan 13 (tiga belas) Kabupaten yaitu:

No.	Nama Kabupaten/Kota	Pusat Pemerintahan
1	Kota Palangka Raya	Palangka Raya
2	Kabupaten Kotawaringin Timur	Sampit
3	Kabupaten Seruyan	Kuala Pembuang
4	Kabupaten Kotawaringin Barat	Pangkalan Bun
5	Kabupaten Sukamara	Suka Mara
6	Kabupaten Kapuas	Kuala Kapuas
7	Kabupaten Barito Utara	Muara Teweh
8	Kabupaten Murung Raya	Puruk Cahu
9	Kabupaten Barito Selatan	Buntok
10	Kabupaten Barito Timur	Tamiyang Layang
11	Kabupaten Katingan	Kasongan
12	Kabupaten Gunung Mas	Kuala Kurun
13	Kabupaten Lumandau	Nanga Bulik
14	Kabupaten Pulang Pisau	Pulang Pisau

## A. SEJARAH PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA

Sebelum terbentuknya Pengadilan Tinggi Palangkaraya, 6 (enam) Pengadilan Negeri di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah berada di bawah Yurisdiksi Pengadilan Tinggi Banjarmasin di Banjarmasin, 6 (enam) Pengadilan Negeri dimaksud yaitu :

1. Pengadilan Negeri Palangka Raya;
2. Pengadilan Negeri Sampit;
3. Pengadilan Negeri Pangkalan Bun;
4. Pengadilan Negeri Kuala Kapuas;
5. Pengadilan Negeri Muara Teweh, dan
6. Pengadilan Negeri Buntok.

Pada tanggal 29 Juli 1980 dibentuklah Pengadilan Tinggi Palangkaraya di Palangka Raya berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1980 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Palangkaraya dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan wilayah hukum meliputi Provinsi Kalimantan Tengah.

Gedung Pengadilan Tinggi Palangkaraya dibangun dengan biaya/dana dari DIP 1979/1980 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), konstruksi bangunan dirancang oleh Direktorat Jenderal Peradilan Umum Departemen Kehakiman R.I. Pembangunan dimulai pada tanggal 10 Desember 1979 dan selesai tanggal 8 Maret

1981. Kemudian pada tanggal 17 September 1981 diresmikan penggunaannya oleh bapak Soeroto, S.E., Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum mewakili Menteri Kehakiman R.I.

Pada tanggal 12 Desember 2006 dibentuklah Pengadilan Negeri Tamiang Layang di Tamiang Layang berdasarkan Keputusan Presiden R.I. Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pembentukan **Pengadilan Negeri Tamiang Layang** Dan Pengadilan Negeri Batu Licin.

Kemudian pada tanggal 26 Januari 2008 dibentuk Pengadilan Negeri Kasongan di Kasongan berdasarkan Keputusan Presiden R.I. Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Balige, Pengadilan Negeri Masamba, Pengadilan Negeri Saumlaki, Pengadilan Negeri Ranai, Pengadilan Negeri Prabumulih, Pengadilan Negeri Pagar Alam, **Pengadilan Negeri Kasongan**, Pengadilan Negeri Pangi, Pengadilan Negeri Bintuhan, Pengadilan Negeri Tais, Pengadilan Negeri Malili, Pengadilan Negeri Labuan Bajo, Pengadilan Negeri Amurang, Pengadilan Negeri Kepahiang, Pengadilan Negeri Tuber, dan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong.

Pada tanggal 26 April 2016 diterbitkan Keputusan Presiden R.I. Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Blangpidie, Pengadilan Negeri Meureudu, Pengadilan Negeri Suka Makmue, Pengadilan Negeri Sei Rampah, Pengadilan Negeri Sibuhuan, Pengadilan Negeri Pulau Tanjung, Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, Pengadilan Negeri Mukomuko, Pengadilan Negeri Gedong Tataan, Pengadilan Negeri Koba, Pengadilan Negeri Mentok, Pengadilan Negeri Banjar, Pengadilan Negeri Cikarang, **Pengadilan Negeri Kuala Kurun**, **Pengadilan Negeri Nanga Bulik**, **Pengadilan Negeri Pulang Pisau**, Pengadilan Negeri Paringin, Pengadilan Penajam, Pengadilan Negeri Melonguane, Pengadilan Negeri Lasusua, Pengadilan Negeri Wangi Wangi, Pengadilan Negeri Belopa, Pengadilan Negeri Dobo, Pengadilan Negeri Namlea dan Pengadilan Negeri Kaimana.

Dalam rangka mendekatkan pelayanan pengadilan kepada masyarakat pencari keadilan (*Access to Justice*), Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Prof. Dr. H. M. Hatta Ali,. S.H., M.H meresmikan operasionalisasi 85 (delapan puluh lima) Pengadilan baru di seluruh Indonesia, pada Hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 di Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara. 85 (delapan puluh lima) pengadilan baru tersebut terdiri dari 3 (tiga) badan peradilan yaitu 30 (tiga puluh) Pengadilan Negeri, 50 (lima puluh) Pengadilan Agama dan 3 (tiga) Mahkamah Syar'iyah serta 2 (dua) Pengadilan Tata Usaha Negara. Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama yang baru dibentuk tersebar di seluruh pelosok Indonesia dan berada di ibukota kabupaten dan Kotamadya, sementara Pengadilan Tata usaha Negara berada di Ibukota Propinsi. Dibentuknya pengadilan baru, daerah-daerah yang

awalnya secara geografis berada sangat jauh dari kantor pengadilan karena berada di wilayah ibukota kabupaten yang dimekarkan sehingga menyulitkan masyarakat mencari keadilan, saat ini sudah tidak lagi menjadi kendala utama. Selain itu, masyarakat tidak lagi mengeluarkan biaya yang besar untuk menuju ke pengadilan karena waktu tempuh menjadi relatif singkat.

Dari 30 (tiga puluh) Pengadilan Negeri yang diresmikan, ada 3 (tiga) yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palangkaraya, yaitu:

1. Pengadilan Negeri Kuala Kurun
2. Pengadilan Negeri Nanga Bulik
3. Pengadilan Negeri Pulang Pisau

Ketiga Pengadilan Negeri yang baru ini sampai dengan 31 Desember 2021 telah memiliki tanah hibah dari Pemerintah Daerah masing-masing gedung kantor sendiri walaupun masih ada yang belum selesai 100% pembangunannya dan akan dilanjutkan di tahun 2022.

Sehingga sampai dengan 31 Desember 2021 Pengadilan Tinggi Palangkaraya membawahi 11 (sebelas) Pengadilan Negeri, yaitu :

No.	Nama	Wilayah Hukum
1	Pengadilan Negeri Palangka Raya Kelas I A	Kota Palangka Raya
2	Pengadilan Negeri Sampit Kelas I B	Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kabupaten Seruyan
3	Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas I B	Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Sukamara
4	Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II	Kabupaten Kuala Kapuas
5	Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas II	Kabupaten Barito Utara dan Kabupaten Murung Raya
6	Pengadilan Negeri Buntok Kelas II	Kabupaten Barito Selatan
7	Pengadilan Negeri Tamiang Layang Kelas II	Kabupaten Barito Timur
8	Pengadilan Negeri Kasongan Kelas II	Kabupaten Katingan
9	Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II	Kabupaten Gunung Mas
10	Pengadilan Negeri Nanga Bulik Kelas II	Kabupaten Lamandau
11	Pengadilan Negeri Pulang Pisau Kelas II	Kabupaten Pulang Pisau

## B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pengadilan Tinggi Palangkaraya sebagai kawal depan (*voorj post*) Mahkamah Agung R.I. selaku salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, dalam pasal 51 menyatakan:

1. Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di Tingkat Banding.

2. Pengadilan Tinggi juga bertugas dan berwenang mengadili di Tingkat Pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri di daerah hukumnya.

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan tersebut, Pengadilan Tinggi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. **Fungsi Mengadili (*judicial power*)**, yakni memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi dalam tingkat banding, dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir “sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Negeri di daerah hukumnya.”
- b. **Fungsi Pembinaan**, yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajaran Pengadilan Negeri yang berada di wilayah hukumnya, baik menyangkut teknik yustisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.
- c. **Fungsi Pengawasan**, yakni mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera/Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di daerah hukumnya serta pengawasan dalam hal fungsi peradilan ditingkat Pengadilan Negeri agar sistem peradilan dapat diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnyadan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan (vide Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).
- d. **Fungsi Administratif**, yakni menyelenggarakan administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.
- e. **Fungsi Lainnya :**
  - 1) Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya. (vide : Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/004/SK/II/1999).
  - 2) Pelayanan pelaksanaan registrasi Pengacara Praktek kuasa insidentill yang akan beracara di Pengadilan Negeri se-wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palangkaraya.

## C. VISI PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI, serta menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan dimaksud, maka pelaksanaan tugas dan fungsi dilandasi suatu visi dan misi yang ingin diwujudkan. Sejalan dengan tujuan dan keinginan sebagaimana telah diuraikan dalam kebijakan umum peradilan yang ada di Pengadilan Tinggi Palangkaraya sebagaimana

diuraikan dalam Cetak Biru (*Blueprint*) Pembaharuan Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang merupakan sebuah pedoman/arah pendekatan yang akan ditempuh.

Dengan mempertimbangkan berbagai permasalahan dan perubahan strategis yang dihadapi dan mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Mahkamah Agung RI Tahun 2020-2024, Pengadilan Tinggi Palangkaraya menetapkan visinya yang dirumuskan sebagai berikut:



## *Terwujudnya Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang Agung*

Penetapan visi ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dan arahan yang tepat dan fokus bagi Pengadilan Tinggi Palangkaraya dalam mencapai keberhasilan organisasi. Penetapan visi juga merupakan wujud komitmen Pengadilan Tinggi Palangkaraya untuk selalu memperbaiki kualitas pelayanan kepada *stakeholders* Pengadilan Tinggi Palangkaraya.

### **D. MISI PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA**

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Tinggi Palangkaraya menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu:

- 1 Menjaga kemandirian Badan Peradilan
- 2 Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
- 3 Meningkatkan kualitas kepemimpinan Badan Peradilan
- 4 Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Badan Peradilan

## E. MOTO PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA

- C** • Cerdas melaksanakan tugas
- A** • Adil dalam berperilaku
- N** • Nyaman dalam bekerja
- T** • Tangkas dalam Melayani
- I** • Independen dari segala pengaruh
- K** • Komitmen dalam penegakan hukum



## BAB II

# TUGAS DAN FUNGSI

### A. KEADAAN PERKARA

#### 1. Keadaan Perkara Pengadilan Tinggi Palangkaraya Tahun 2021

Keadaan penyelesaian perkara pidana, pidana anak, Tipikor dan perdata di Pengadilan Tinggi Palangkaraya Tahun 2021 dijelaskan pada tabel berikut ini :

NO	PERKARA	JENIS PERKARA	SISA 2020	MASUK 2021	PUTUS 2021	SISA 2021
1	PIDANA	PIDANA	9	162	164	7
		PIDANA KHUSUS ANAK	0	8	8	0
		TINDAK PIDANA KORUPSI	1	7	6	2
2.	PERDATA	PERDATA	6	117	117	6

#### 2. Keadaan Perkara Pengadilan Negeri se-Kalimantan Tengah

Keadaan penyelesaian perkara Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palangkaraya tahun 2021 dijelaskan pada tabel berikut ini :

##### a. Perkara Pidana Biasa

NO	NAMA PENGADILAN	SISA TAHUN 2020	MASUK 2021	PUTUS 2021	SISA 2021
1	PN. PALANGKARAYA	39	474	467	46
2	PN. SAMPIT	37	419	375	81
3	PN. PANGKALAN BUN	23	355	325	53
4	PN. KUALA KAPUAS	39	264	272	31
5	PN. BUNTOK	1	122	123	0
6	PN. MUARA TEWEH	13	184	166	31
7	PN. TAMMIANG LAYANG	16	71	67	20
8	PN. KASONGAN	14	99	109	4
9	PN. KUALA KURUN	2	81	76	8
10	PN. PULANG PISAU	9	93	92	10
11	PN. NANGA BULIK	6	96	91	10
J U M L A H		200	2257	2163	294

**b. Perkara Pidana Singkat**

NO	NAMA PENGADILAN	SISA TAHUN 2020	MASUK 2021	PUTUS 2021	SISA 2021
1	<b>PN. PALANGKARAYA</b>	0	0	0	0
2	<b>PN. SAMPIT</b>	0	0	0	0
3	<b>PN. PANGKALAN BUN</b>	0	0	0	0
4	<b>PN. KUALA KAPUAS</b>	0	0	0	0
5	<b>PN. BUNTOK</b>	0	0	0	0
6	<b>PN. MUARA TEWEH</b>	0	1	1	0
7	<b>PN. TAMIANG LAYANG</b>	0	0	0	0
8	<b>PN. KASONGAN</b>	0	0	0	0
9	<b>PN. KUALA KURUN</b>	0	0	0	0
10	<b>PN. PULANG PISAU</b>	0	0	0	0
11	<b>PN. NANGA BULIK</b>	0	0	0	0
<b>J U M L A H</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**c. Perkara Pidana Cepat**

NO	NAMA PENGADILAN	SISA TAHUN 2020	MASUK 2021	PUTUS 2021	SISA 2021
1	<b>PN. PALANGKARAYA</b>	0	1	1	0
2	<b>PN. SAMPIT</b>	0	16	16	0
3	<b>PN. PANGKALAN BUN</b>	0	24	24	0
4	<b>PN. KUALA KAPUAS</b>	0	4	4	0
5	<b>PN. BUNTOK</b>	0	0	0	0
6	<b>PN. MUARA TEWEH</b>	0	5	5	0
7	<b>PN. TAMIANG LAYANG</b>	0	0	0	0
8	<b>PN. KASONGAN</b>	0	1	1	0
9	<b>PN. KUALA KURUN</b>	0	0	0	0
10	<b>PN. PULANG PISAU</b>	0	0	0	0
11	<b>PN. NANGA BULIK</b>	0	7	7	0
<b>J U M L A H</b>		<b>0</b>	<b>58</b>	<b>58</b>	<b>0</b>

**d. Perkara Pidana Lalu Lintas**

NO	NAMA PENGADILAN	SISA TAHUN 2020	MASUK 2021	PUTUS 2021	SISA 2021
1	<b>PN. PALANGKARAYA</b>	0	592	592	0
2	<b>PN. SAMPIT</b>	0	920	920	0
3	<b>PN. PANGKALAN BUN</b>	0	787	787	0
4	<b>PN. KUALA KAPUAS</b>	0	1557	1557	0
5	<b>PN. BUNTOK</b>	0	79	79	0
6	<b>PN. MUARA TEWEH</b>	0	278	217	61
7	<b>PN. TAMIANG LAYANG</b>	0	1607	1555	52

8	PN. KASONGAN	0	259	259	0
9	PN. KUALA KURUN	0	277	277	0
10	PN. PULANG PISAU	0	350	350	0
11	PN. NANGA BULIK	0	180	180	0
J U M L A H		<b>0</b>	<b>6886</b>	<b>6773</b>	<b>113</b>

e. Perkara Pra Peradilan

NO	NAMA PENGADILAN	SISA TAHUN 2020	MASUK 2021	PUTUS 2021	SISA 2021
1	PN. PALANGKARAYA	0	12	12	0
2	PN. SAMPIT	1	3	4	0
3	PN. PANGKALAN BUN	0	1	1	0
4	PN. KUALA KAPUAS	0	3	2	1
5	PN. BUNTOK	0	0	0	0
6	PN. MUARA TEWEH	0	0	0	0
7	PN. TAMIANG LAYANG	0	0	0	0
8	PN. KASONGAN	0	1	1	0
9	PN. KUALA KURUN	0	0	0	0
10	PN. PULANG PISAU	0	0	0	0
11	PN. NANGA BULIK	0	1	1	0
J U M L A H		<b>1</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>1</b>

f. Perkara Pidana Anak

NO	NAMA PENGADILAN	SISA TAHUN 2020	MASUK 2021	PUTUS 2021	SISA 2021
1	PN. PALANGKARAYA	1	5	5	1
2	PN. SAMPIT	0	8	8	0
3	PN. PANGKALAN BUN	0	12	12	0
4	PN. KUALA KAPUAS	0	13	13	0
5	PN. BUNTOK	0	3	3	0
6	PN. MUARA TEWEH	0	4	4	0
7	PN. TAMIANG LAYANG	0	2	1	1
8	PN. KASONGAN	1	6	7	0
9	PN. KUALA KURUN	0	3	3	0
10	PN. PULANG PISAU	0	4	3	1
11	PN. NANGA BULIK	0	1	1	0
J U M L A H		<b>2</b>	<b>61</b>	<b>60</b>	<b>3</b>

**g. Perkara Tindak Pidana Korupsi**

NO	NAMA PENGADILAN	SISA TAHUN 2020	MASUK 2021	PUTUS 2021	SISA 2021
1	PN. PALANGKARAYA	18	47	36	29

**h. Perkara Perdata Gugatan**

NO	NAMA PENGADILAN	SISA TAHUN 2020	MASUK 2021	PUTUS 2021	SISA 2021
1	PN. PALANGKARAYA	84	235	245	74
2	PN. SAMPIT	27	51	55	23
3	PN. PANGKALAN BUN	13	43	45	11
4	PN. KUALA KAPUAS	10	28	31	7
5	PN. BUNTOK	3	46	44	5
6	PN. MUARA TEWEH	8	26	29	5
7	PN. TAMIAng LAYANG	8	34	36	6
8	PN. KASONGAN	7	14	16	5
9	PN. KUALA KURUN	7	42	41	8
10	PN. PULANG PISAU	5	25	22	8
11	PN. NANGA BULIK	5	25	23	7
<b>J U M L A H</b>		<b>177</b>	<b>569</b>	<b>587</b>	<b>159</b>

**i. Perkara Perdata Permohonan**

NO	NAMA PENGADILAN	SISA TAHUN 2020	MASUK 2021	PUTUS 2021	SISA 2021
1	PN. PALANGKARAYA	3	101	99	5
2	PN. SAMPIT	4	254	256	2
3	PN. PANGKALAN BUN	1	110	1111	0
4	PN. KUALA KAPUAS	1	6	7	0
5	PN. BUNTOK	0	31	31	0
6	PN. MUARA TEWEH	2	8	9	1
7	PN. TAMIAng LAYANG	0	11	8	3
8	PN. KASONGAN	0	8	8	0
9	PN. KUALA KURUN	0	7	6	1
10	PN. PULANG PISAU	0	17	15	2
11	PN. NANGA BULIK	0	62	59	3
<b>J U M L A H</b>		<b>11</b>	<b>615</b>	<b>609</b>	<b>17</b>

j. Perkara Perdata Gugatan Sederhana

NO	NAMA PENGADILAN	SISA TAHUN 2020	MASUK 2021	PUTUS 2021	SISA 2021
1	<b>PN. PALANGKARAYA</b>	2	20	22	0
2	<b>PN. SAMPIT</b>	0	6	6	0
3	<b>PN. PANGKALAN BUN</b>	2	11	13	0
4	<b>PN. KUALA KAPUAS</b>	0	4	4	0
5	<b>PN. BUNTOK</b>	0	0	0	0
6	<b>PN. MUARA TEWEH</b>	0	0	0	0
7	<b>PN. TAMIANG LAYANG</b>	0	6	6	0
8	<b>PN. KASONGAN</b>	0	1	1	0
9	<b>PN. KUALA KURUN</b>	0	0	0	0
10	<b>PN. PULANG PISAU</b>	0	4	4	0
11	<b>PN. NANGA BULIK</b>	0	1	1	0
<b>J U M L A H</b>		<b>4</b>	<b>53</b>	<b>57</b>	<b>0</b>

k. Perkara Pengadilan Hubungan Industrial

NO	NAMA PENGADILAN	SISA TAHUN 2020	MASUK 2021	PUTUS 2021	SISA 2021
1	<b>PN. PALANGKARAYA</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>

3. Keadaan Perkara Tingkat Banding Tahun 2021

NO	NAMA PENGADILAN	PERDATA GUGATAN	PIDANA BIASA	PIDANA ANAK	TIPIKOR
1	<b>PN. PALANGKARAYA</b>	53	19	0	7
2	<b>PN. SAMPIT</b>	23	13	0	-
3	<b>PN. PANGKALAN BUN</b>	9	45	6	-
4	<b>PN. KUALA KAPUAS</b>	5	23	0	-
5	<b>PN. BUNTOK</b>	3	9	1	-
6	<b>PN. MUARA TEWEH</b>	6	8	1	-
7	<b>PN. TAMIANG LAYANG</b>	5	7	0	-
8	<b>PN. KASONGAN</b>	5	4	0	-
9	<b>PN. KUALA KURUN</b>	3	0	0	-
10	<b>PN. PULANG PISAU</b>	3	16	0	-
11	<b>PN. NANGA BULIK</b>	2	18	0	-
<b>J U M L A H</b>		<b>117</b>	<b>162</b>	<b>8</b>	<b>7</b>

**4. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi Tahun 2021.**

NO	NAMA PENGADILAN	PERDATA GUGATAN	PIDANA BIASA	PIDANA ANAK	TIPIKOR
1	PN. PALANGKARAYA	37	15	0	5
2	PN. SAMPIT	12	10	0	-
3	PN. PANGKALAN BUN	31	9	3	-
4	PN. KUALA KAPUAS	5	6	0	-
5	PN. BUNTOK	3	2	0	-
6	PN. MUARA TEWEH	1	7	0	-
7	PN. TAMIAng LAYANG	2	2	0	-
8	PN. KASONGAN	2	2	0	-
9	PN. KUALA KURUN	1	0	0	
10	PN. PULANG PISAU	0	6	0	-
11	PN. NANGA BULIK	2	14	0	-
<b>J U M L A H</b>		<b>96</b>	<b>73</b>	<b>3</b>	<b>5</b>

**5. Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali Tahun 2021.**

NO	NAMA PENGADILAN	PERDATA GUGATAN	PIDANA BIASA	PIDANA ANAK	TIPIKOR
1	PN. PALANGKARAYA	5	1	0	0
2	PN. SAMPIT	2	1	0	-
3	PN. PANGKALAN BUN	1	0	0	-
4	PN. KUALA KAPUAS	0	0	0	-
5	PN. BUNTOK	1	0	0	-
6	PN. MUARA TEWEH	0	0	0	-
7	PN. TAMIAng LAYANG	1	0	0	-
8	PN. KASONGAN	0	0	0	-
9	PN. KUALA KURUN	0	0	0	-
10	PN. PULANG PISAU	0	0	0	-
11	PN. NANGA BULIK	0	0	0	-
<b>J U M L A H</b>		<b>10</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**B. PENYELESAIAN PERKARA**

**1. Jumlah Sisa Perkara Yang Diputus.**

Jumlah seluruh sisa perkara yang diputus di tahun 2021 pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palangkaraya dengan rincian sebagai berikut :

NO	NAMA PENGADILAN	JUMLAH SELURUH SISA PERKARA TAHUN 2021
1.	PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA	15
2	PENGADILAN NEGERI PALANGKA RAYA	157
3	PENGADILAN NEGERI SAMPIT	106

4	PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN	66
5	PENGADILAN NEGERI KUALA KAPUAS	39
6	PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH	98
7	PENGADILAN NEGERI BUNTOK	5
8	PENGADILAN NEGERI TAMIANG LAYANG	82
9	PENGADILAN NEGERI KASONGAN	10
10	PENGADILAN NEGERI KUALA KURUN	17
11	PENGADILAN NEGERI NANGA BULIK	20
12	PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU	20
JUMLAH		<b>635</b>

## 2. Jumlah Perkara Yang Diputus Tepat Waktu.

Jumlah seluruh perkara yang diputus tepat waktu pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palangkaraya dengan rincian sebagai berikut :

NO	NAMA PENGADILAN	JUMLAH SELURUH PERKARA YANG DIPUTUS TEPAT WAKTU TAHUN 2021
1.	PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA	295
2	PENGADILAN NEGERI PALANGKA RAYA	1499
3	PENGADILAN NEGERI SAMPIT	1645
4	PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN	1319
5	PENGADILAN NEGERI KUALA KAPUAS	1935
6	PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH	430
7	PENGADILAN NEGERI BUNTOK	280
8	PENGADILAN NEGERI TAMIANG LAYANG	1673
9	PENGADILAN NEGERI KASONGAN	402
10	PENGADILAN NEGERI KUALA KURUN	403
11	PENGADILAN NEGERI NANGA BULIK	363
12	PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU	486
JUMLAH		<b>10730</b>

### 3. Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi Dan Pk.

Jumlah seluruh perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali pada Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palangkaraya, dengan rincian sebagai berikut :

NO	NAMA PENGADILAN	JUMLAH PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN BANDING, KASASI, PK TAHUN 2021	
		PERDATA	PIDANA
1	PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA	243	466
2	PENGADILAN NEGERI SAMPIT	40	363
3	PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN	35	281
4	PENGADILAN NEGERI KUALA KAPUAS	4	210
5	PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH	23	155
6	PENGADILAN NEGERI BUNTOK	23	122
7	PENGADILAN NEGERI TAMIANG LAYANG	46	63
8	PENGADILAN NEGERI KASONGAN	19	109
9	PENGADILAN NEGERI KUALA KURUN	45	364
10	PENGADILAN NEGERI NANGA BULIK	81	71
11	PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU	23	79
JUMLAH		<b>582</b>	<b>2282</b>

### 4. Jumlah Perkara Perdata Yang Berhasil Di Mediasi.

Jumlah perkara perdata yang berhasil di mediasi pada Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palangkaraya Tahun 2021, dengan rincian sebagai berikut :

NO	NAMA PENGADILAN	JUMLAH PERKARA PERDATA YANG BERHASIL DI MEDIASI 2021
1	PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA	3
2	PENGADILAN NEGERI SAMPIT	2
3	PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN	1
4	PENGADILAN NEGERI KUALA KAPUAS	0
5	PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH	2
6	PENGADILAN NEGERI BUNTOK	1
7	PENGADILAN NEGERI TAMIANG LAYANG	0
8	PENGADILAN NEGERI KASONGAN	0

9	PENGADILAN NEGERI KUALA KURUN	0
10	PENGADILAN NEGERI NANGA BULIK	1
11	PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU	1
	JUMLAH	11

##### 5. Jumlah Perkara Anak Yang Berhasil Melalui Diversi.

Jumlah perkara anak yang berhasil melalui diversi pada Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palangkaraya Tahun 2021, dengan rincian sebagai berikut :

NO	NAMA PENGADILAN	JUMLAH PERKARA ANAK YANG BERHASIL MELALUI DIVERSI 2021
1	PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA	0
2	PENGADILAN NEGERI SAMPIT	2
3	PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN	0
4	PENGADILAN NEGERI KUALA KAPUAS	0
5	PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH	1
6	PENGADILAN NEGERI BUNTOK	0
7	PENGADILAN NEGERI TAMANG LAYANG	0
8	PENGADILAN NEGERI KASONGAN	0
9	PENGADILAN NEGERI KUALA KURUN	0
10	PENGADILAN NEGERI NANGA BULIK	0
11	PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU	1
	JUMLAH	4

#### C. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU (SERTIFIKASI ISO PENGADILAN)

##### 1. POSBAKUM (Satker yang mendapat alokasi dan realisasi anggaran).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pasal 1 (1) dinyatakan bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri yang menghadapi masalah hukum. Sedangkan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum dinyatakan bahwa yang berhak mendapatkan jasa dari Pos Bantuan Hukum adalah orang yang tidak mampu membayar jasa advokat terutama perempuan dan anak-anak serta penyandang disabilitas, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 27).

Bantuan hukum tersebut meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum, yang bertujuan untuk:

1. Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan.

2. Mewujudkan hak konstitusional segala warga Negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum.
3. Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Indonesia.
4. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 25 PERMA Nomor 1 Tahun 2014, bahwa jasa bantuan hukum yang dapat diberikan oleh Pos Bantuan Hukum berupa pemberian informasi, konsultasi, dan advokat serta penyediaan Advokat pendamping secara Cuma-Cuma untuk membela kepentingan Tersangka/Terdakwa dalam hal Terdakwa tidak mampu membiayai sendiri penasihat hukumnya.

Adapun jumlah alokasi dan realisasi anggaran untuk Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palangkaraya tahun 2021, adalah sebagai berikut:

NO	NAMA PENGADILAN	JUMLAH ALOKASI DANA TAHUN 2021	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2021
1	PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA	Rp. 48.000.000,-	Rp. 48.000.000,-
2	PENGADILAN NEGERI SAMPIT	Rp. 19.200.000,-	Rp. 19.200.000,-
3	PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN	Rp. 48.000.000,-	Rp. 48.000.000,-
4	PENGADILAN NEGERI KUALA KAPUAS	Rp. 16.800.000,-	Rp. 16.800.000,-
5	PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH	Rp. 19.200.000,-	Rp. 19.200.000,-
6	PENGADILAN NEGERI BUNTOK	Rp. 24.000.000,-	Rp. 24.000.000,-
7	PENGADILAN NEGERI TAMANG LAYANG	Rp. 16.800.000,-	Rp. 16.800.000,-
8	PENGADILAN NEGERI KASONGAN	Rp. 24.000.000,-	Rp. 24.000.000,-
9	PENGADILAN NEGERI KUALA KURUN	Rp. 24.000.000,-	Rp. 24.000.000,-
10	PENGADILAN NEGERI NANGA BULIK	Rp. 24.000.000,-	Rp. 24.000.000,-
11	PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU	Rp. 24.000.000,-	Rp. 24.000.000,-

## 2. SIDANG KELILING/PELAYANAN TERPADU.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, Dan Akta Kelahiran mewajibkan setiap Pengadilan Negeri untuk melakukan Pelayanan Terpadu Sidang Keliling. Pelayanan Terpadu Sidang Keliling adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan terkoordinasi dalam satu waktu dan tempat tertentu antara Pengadilan Negeri atau Pengadilan

Agama/Mahkamah Syar'iyah, Dinas Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Kabupaten /Kota, Kantor Urusan Agama Kecamatan, dalam layanan keliling memberikan pelayanan pengesahan perkawinan dan perkara lainnya sesuai dengan kewenangan Pengadilan Negeri dan itsbat nikah sesuai dengan kewenagan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dan untuk memenuhi pencatatan perkawinan dan pencatatan kelahiran. Pengesahan Perkawinan bagi masyarakat beragama selain Islam yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perkara lainnya sesuai dengan kewenangan Pengadilan Negeri ini antara lain seperti permohonan pergantian nama, permohonan perbaikan akta kelahiran dan lain-lain sesuai dengan kewenangan Pengadilan Negeri.

Sidang Keliling adalah sidang Pengadilan Negeri yang dilakukan di luar gedung pengadilan baik dilaksanakan secara berkala maupun insidentil dengan tujuan meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat sulit atau tidak mampu menjangkau gedung Pengadilan Negeri akibat keterbatasan biaya, fisik ataupun secara geografis.

Adapun jumlah alokasi dan realisasi anggaran untuk Sidang Keliling/Pelayanan Terpadu pada Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palangkaraya tahun 2021, adalah sebagai berikut:

NO	NAMA PENGADILAN	JUMLAH ALOKASI DANA TAHUN 2021	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2021	JUMLAH PERKARA YANG DITANGANI TAHUN 2021
1	PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA	NIHIL	NIHIL	NIHIL
2	PENGADILAN NEGERI SAMPIT	Rp. 80.000.000,-	Rp. 79.540.000,-	29 Perkara
3	PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN	Rp. 50.000.000 , -	Rp. 49.840.000 , -	55 Perkara
4	PENGADILAN NEGERI KUALA KAPUAS	NIHIL	NIHIL	NIHIL
5	PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH	Rp. 5.000.000 , -	Rp. 5.000.000 , -	2 Perkara
6	PENGADILAN NEGERI BUNTOK	NIHIL	NIHIL	NIHIL
7	PENGADILAN NEGERI TAMIANG LAYANG	NIHIL	NIHIL	NIHIL
8	PENGADILAN NEGERI KASONGAN	NIHIL	NIHIL	NIHIL
9	PENGADILAN NEGERI KUALA KURUN	NIHIL	NIHIL	NIHIL
10	PENGADILAN NEGERI NANGA BULIK	NIHIL	NIHIL	NIHIL
11	PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU	NIHIL	NIHIL	NIHIL

### **3. PERKARA PRODEO (PEMBEBASAN BIAYA PERKARA).**

Pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan salah satunya meliputi Layanan Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo). Pembebasan Biaya Perkara ini diperuntukkan untuk masyarakat tidak mampu. Layanan Pembebasan Biaya Perkara adalah negara menanggung biaya proses berperkara di Pengadilan sehingga setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat berperkara secara cuma-cuma dengan begitu bisa meringankan beban biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi.

Salah satu bentuk untuk memenuhi pelayanan kepada publik adalah dengan memberi Hak atas biaya perkara cuma-cuma (prodeo) yang didasari oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan, dinyatakan bahwa prodeo adalah proses berperkara di pengadilan secara cuma-cuma dengan dibiayai negara melalui DIPA pengadilan. Yang berhak mengajukan gugatan/permohonan berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo) adalah masyarakat yang tidak mampu (miskin) secara ekonomis.

Adapun jumlah alokasi dan realisasi anggaran untuk Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara) pada Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palangkaraya tahun 2021, adalah sebagai berikut:

NO	NAMA PENGADILAN	JUMLAH ALOKASI DANA TAHUN 2021	JUMLAH PERKARA YANG DITANGANI TAHUN 2021
1	PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA	NIHIL	NIHIL
2	PENGADILAN NEGERI SAMPIT	NIHIL	NIHIL
3	PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN	NIHIL	NIHIL
4	PENGADILAN NEGERI KUALA KAPUAS	NIHIL	NIHIL
5	PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH	NIHIL	NIHIL
6	PENGADILAN NEGERI BUNTOK	NIHIL	NIHIL
7	PENGADILAN NEGERI TAMMIANG LAYANG	NIHIL	NIHIL
8	PENGADILAN NEGERI KASONGAN	NIHIL	NIHIL
9	PENGADILAN NEGERI KUALA KURUN	NIHIL	NIHIL
10	PENGADILAN NEGERI NANGA BULIK	NIHIL	NIHIL
11	PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU	NIHIL	NIHIL



## BAB III

# SUMBER DAYA MANUSIA

Peningkatan dan efektifitas kinerja Pengadilan Tinggi Palangkaraya dan Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palangkaraya tidak terlepas dari pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia yang berkualitas akan sangat menentukan untuk mencapai visi dan misi Pengadilan Tinggi Palangkaraya. Pegawai di Pengadilan Tinggi Palangkaraya dan Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palangkaraya dapat dibedakan atas pegawai teknis dan non teknis yang saling bersinergi untuk mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi peradilan. Jumlah sumber daya manusia yang ada pada wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palangkaraya tahun 2021 terdiri dari 325 orang Hakim dan Pegawai serta ditambah dengan 108 orang tenaga honorer.

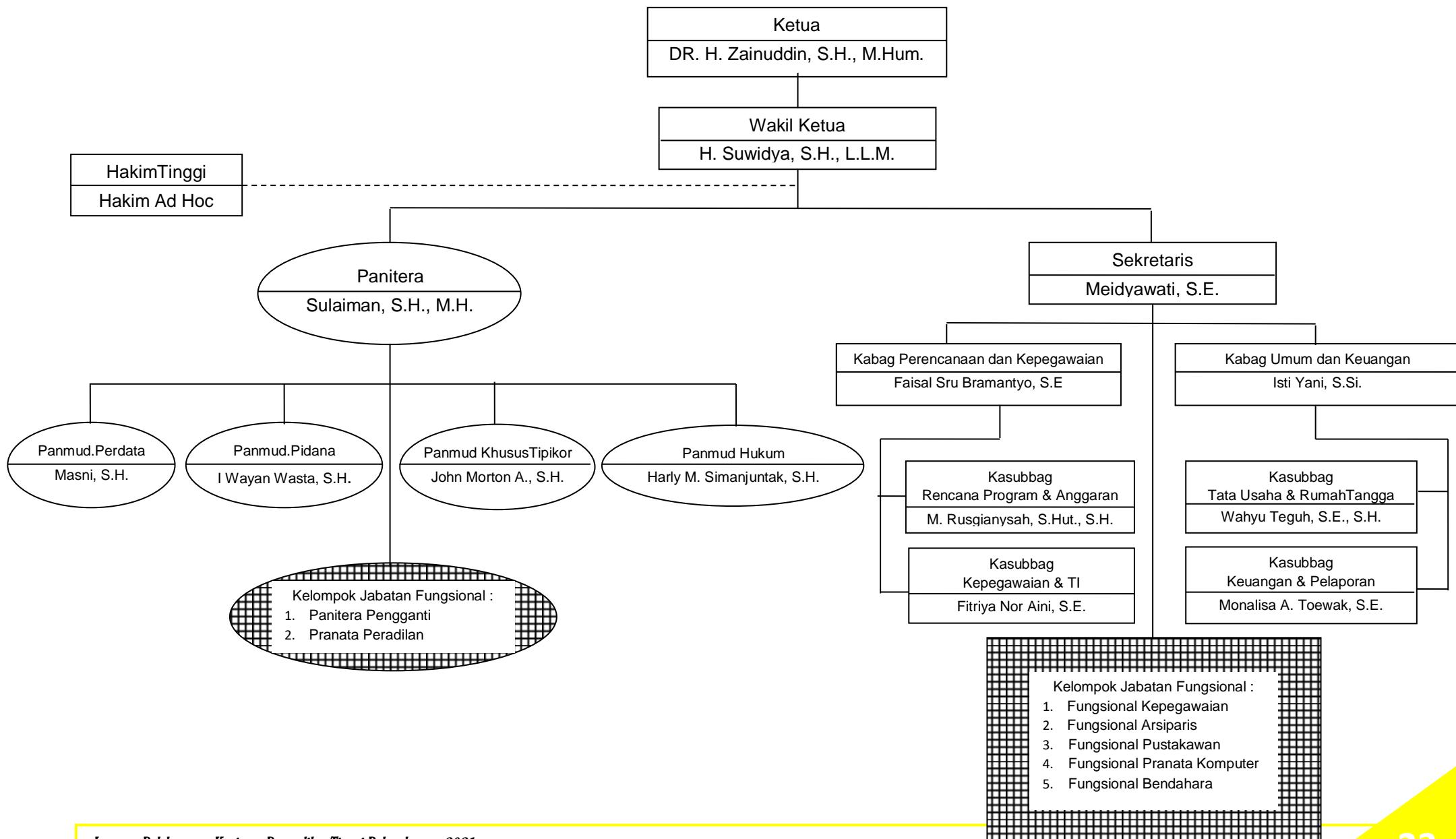
### I. Pengadilan Tinggi Palangkaraya

No	Nama	NIP	Jabatan
1.	Dr. H. Zainuddin, S.H., M.Hum.	195810051984031001	Ketua
2.	H. Suwidya, S.H., LL.M.	196001121986121002	Wakil Ketua
3.	Suko Priyowidodo, S.H.	196011021986121001	Hakim Tinggi
4.	Maurid Sinaga, S.H., M.Hum.	195801211986031004	Hakim Tinggi
5.	Sinarta Henry Dunant Sinuraya, S.H., M.H.	195705241986031002	Hakim Tinggi
6.	Togar, S.H., M.H.	196206261986121001	Hakim Tinggi
7.	H. Ajidinnor, S.H., M.H.	196202171988031002	Hakim Tinggi
8.	Dwi Prapti Maryudiaty, S.H.	196211231986122001	Hakim Tinggi
9.	Heru Prakosa, S.H., M.H.	196301261982031002	Hakim Tinggi
10.	Wahyu Prasetyo Wibowo, S.H., M.H.	196305311988031003	Hakim Tinggi
11.	Richard Silalahi, S.H.	195905301986121001	Hakim Tinggi
12.	Nawaji, S.H.	196011171988031003	Hakim Tinggi
13.	Mohammad Noor, S.H., M.H.	196112251988031005	Hakim Tinggi
14.	Abdul Ra'uf, S.H., M.H.	196203281988031004	Hakim Tinggi
15.	Djoko Indiarto, S.H., M.H.	195901071988031001	Hakim Tinggi
16.	Siti Jamzanah, S.H., M.H.	195907231988032002	Hakim Tinggi
17.	Anne Rusiana, S.H., M.Hum.	196204011988032001	Hakim Tinggi
18.	H Irwan Efendi, S.H., M.H.	196012161988031002	Hakim Tinggi
19.	Siti Rochmah, S.H.	195911291983022001	Hakim Tinggi
20.	Akhmad Jaini, S.H., M.H.	196011181982031004	Hakim Tinggi

21.	Desbenneri Sinaga, S.H., M.H.	196112051988031002	Hakim Tinggi
22.	Tri Andita Juristiawati, S.H., M.Hum.	196204301989032003	Hakim Tinggi
23.	Didit Susilo Guntono, S.H., M.H.	196303251983031003	Hakim Tinggi
24.	Gatut Sulistyo, S.H., M.H.	1956060602201505015	Hakim Ad Hoc Tipikor
25.	Dr Andreas Eno Tirtakusuma, S.H., M.H.	1974040802201901002	Hakim Ad Hoc Tipikor
26.	Sulaiman, S.H., M.H.	196003221982031004	Panitera
27.	Meidyawati, S.E.	197205142006042001	Sekretaris
28.	Faisal Sru Bramantyo, S.E.	197809212005021002	Kepala Bagian Perencanaan & Kepegawaian
29.	Isti Yani, S.Si.	198102212006042002	Kepala Bagian Umum Dan Keuangan
30.	John Morton Abdurrahman, S.H.	197207101999031003	Panitera Muda Khusus
31.	Masni, S.H.	196006031982032005	Panitera Muda Perdata
32.	Harly Marilyn Simanjuntak, S.H.	197610012001121002	Panitera Muda Hukum
33.	I Wayan Wasta, S.H.	196907101993031003	Panitera Muda Pidana
34.	Fitriya Nor Aini, S.E.	198008112006042003	Kasubbag. Kepegawaian Dan TI
35.	Monalisa Agustina Toewak, S.E.	198108242006042003	Kasubbag. Keuangan Dan Pelaporan
36.	Muhammad Rusgiansyah, S.Hut., S.H.	197209242006041014	Kasubbag. Rencana Program Dan Anggaran
37.	Wahyu Teguh, S.E., S.H.	198608272011011014	Kasubbag. Tata Usaha Dan Rumah Tangga
38.	Ginter, S.H.	196105051986031006	Panitera Pengganti
39.	M. Yunan, S.H.	196202011985031006	Panitera Pengganti
40.	Yuhana Sari Yasmini, S.H.	196704041989032001	Panitera Pengganti
41.	Ahmad Gazali, S.H.	196312051990031004	Panitera Pengganti
42.	Evi Ernawati, S.H., M.H.	197010201991032002	Panitera Pengganti
43.	Akri Yuliani, S.H.	196707011991032001	Panitera Pengganti
44.	Julius Siberium Timbung, S.E.	198207152006041003	Analisis Kepegawaian Pertama
45.	Abdul Yusuf, S.Sos.	199211152019031011	Analisis Kepegawaian Pertama
46.	Mersia Sibarani, S.E., S.H.	197711112009122004	Analisis Perkara Peradilan
47.	Junaldi Singarimbun, S.E.,	198507072009121003	Bendahara

	S.H.		Pengeluaran
48.	Apridius, S.E., S.H., M.Si.	198804052009121002	Penyusun laporan Keuangan
49.	Evi Katsiani, S.E.	197608292006042023	Bendahara Proses
50.	Sylvi Enggriani, S.H.	198902032012122001	Analis Perkara Peradilan
51.	Yudi Yusliannoor, S.H.	197507192006041003	Analis Perkara Peradilan
52.	Joni Petrus, S.H.	198106012009121004	Analis Protokol
53.	Yunia Ariani, S.H.	198306062006042003	Analis Perkara Peradilan
54.	Julianto, S.H.	198107162006041003	Penyusun laporan Keuangan
55.	Akhmad Darkuni, S.Sos., M.AP.	198706102009121005	Pengelola Perkara
56.	Krista, S.H.	198506142006042001	Analis Perkara Peradilan
57.	Susilawati, S.H.	198901072009122004	Bendahara Penerimaan
58.	Roberto Asintongan P, A.Md.	198802062019031003	Pengelola Sistem Dan Jaringan
59.	Bangga Chrysto Tarigan, A.Md.	199604272019031001	Pengelola Sistem Dan Jaringan
60.	Uner	197703192014081002	Pengadministrasi Persuratan
61.	Muthiah Az-Zahra Rasyid, S.H.	199401112020122015	CPNS/Analis Perkara Peradilan
62.	Mikhael Jan Tonggo Tua Sihombing, A.Md.	199301232020121008	CPNS/ Pengadministrasi Registrasi Perkara
63.	Anreni Lambung, S.E.	-	PPNPN
64.	Surya John Hery L.Tobing, S.H.	-	PPNPN
65.	Wahyunanda Trisno Jaya Saputra Lambung, S.Pd.	-	PPNPN
66.	Muhammad Hilmi, S.Pdl.	-	PPNPN
67.	Albert Theofilus Yohanes	-	PPNPN
68.	Tutut, S.H.	-	PPNPN
69.	Herry Wibowo	-	PPNPN
70.	Getyere	-	PPNPN
71.	Dwi Ariyanto	-	PPNPN
72.	David Riski Pratama	-	PPNPN

## Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Palangkaraya

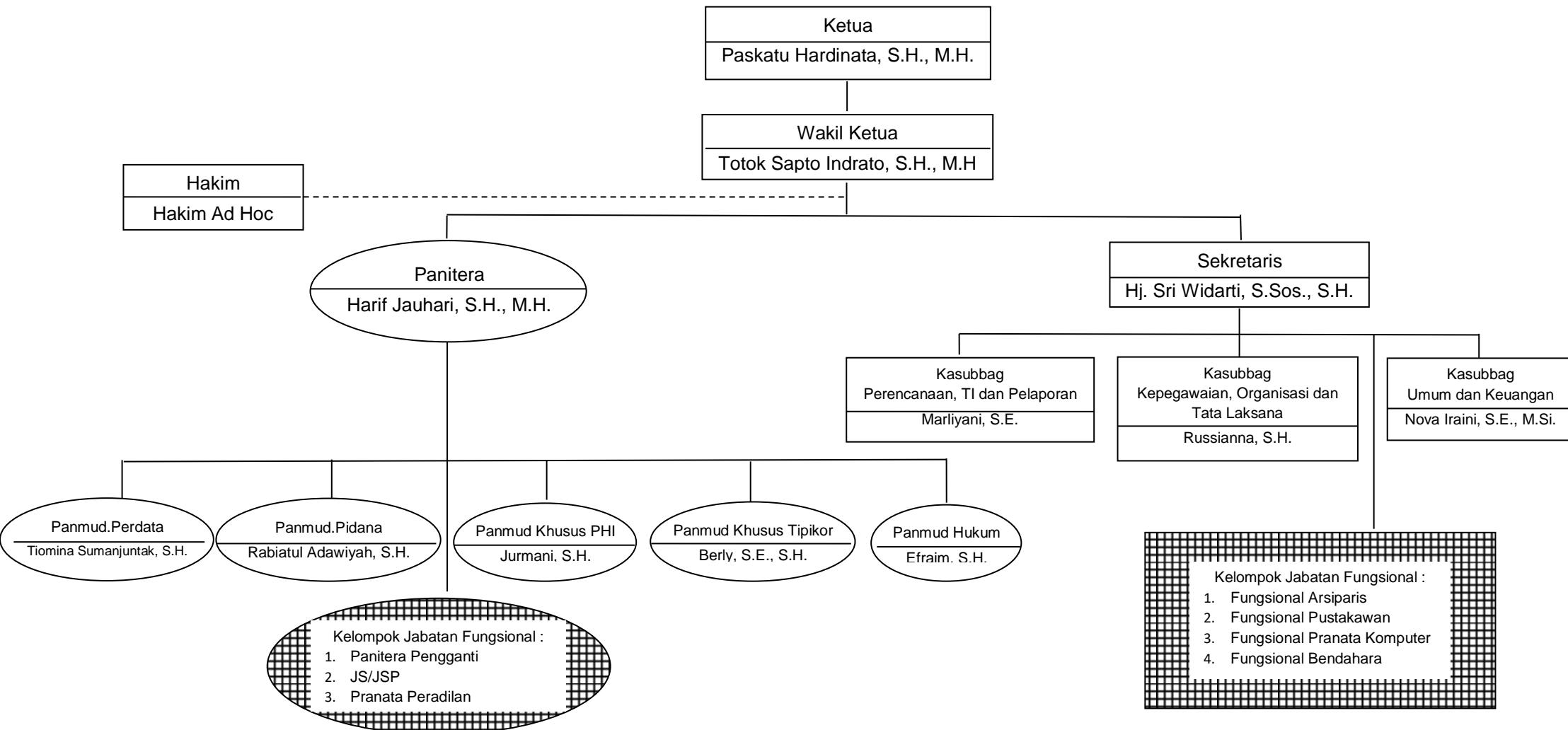


## II. Pengadilan Negeri Palangkaraya

No	Nama	NIP	Jabatan
1	Paskatu Hardinata, S.H.,M.H.	196304141992121001	Ketua
2	Totok Sapto Indrato, S.H.,M.H.	196405161992121001	Wakil Ketua
3	Dr. Alfon, S.H.,M.H.	196303011992121001	Hakim
4	Irfanul Hakim, S.H.,M.H.	197602092000031001	Hakim
5	Boxgie Agus Santoso, S.H.,M.H.	197708242001121001	Hakim
6	Heru Setiyadi, S.H., M.H.	197706162001121004	Hakim
7	Syamsuni, S.H., M.Kn.	197701162002121004	Hakim
8	Dony Hardiyanto, S.H.,M.Hum.	197703312002121004	Hakim
9	Erni Kusumawati, S.H., M.H.	197912282002122001	Hakim
10	Erhammadin, S.H.,M.H.	197605022002121008	Hakim
11	Yudi Eka Putra, S.H., M.H.	197412312002121015	Hakim
12	Nithanel Nahsyun Ndaumanu, S.H., M.H.	197011052005021001	Hakim
13	Lela Yulianty, S.H.,M.H.	-	Hakim Adhoc PHI
14	M. Suhri Burhan, S.H.,M.H.	-	Hakim Adhoc PHI
15	Drs. Nur Insan.	-	Hakim Adhoc PHI
16	Kusmat Tirta Sasmita, S.H.	-	Hakim Adhoc Tipikor
17	Muji Kartika Rahayu, S.H., M.Fil	-	Hakim Adhoc Tipikor
18	Harif hauhari, S.H.,M.H.	196906011993041004	Panitera
19	Hj. Sri Widarti, S.Sos., S.H.	196703151990032001	Sekretaris
20	Efraim, S.H.	197102201992032003	Panitera Muda Hukum
21	Tiomina Simanjuntak, S.H.	197504232006041001	Panitera Muda Perdata
22	Rabiatul Adawiyah, S.H	197105181992032003	Panitera Muda Pidana
23	Jurmani, S.H.	197912052008051001	Panitera Muda Khusus PHI
24	Berly, S.E., S.H.	197504232006041001	Panitera Muda Khusus Tipikor
25	Russianna, S.H	196905161992032002	Kasub. Bag. Kepegawaian Ortala
26	Marliyani, S.E	198411022009042007	Kasub. Bag. PTIP
27	Nova Iraini, S.E., M.Si	198507212009042003	Kasub. Bag. Umum dan Keuangan
28	Samlawy	196209051985031007	Panitera Pengganti
29	Jayadi	196301111986031002	Panitera Pengganti
30	Linda, S.H	196905201989032001	Panitera Pengganti

31	Rahmawati Fitri, S.H	198407242009042011	Panitera Pengganti
32	Taty, S.H.	198406142009042011	Panitera Pengganti
33	Sari Ramadhaniati, S.H.	198502162006042001	Panitera Pengganti
34	Jumiati, S.H.	198709252006042002	Panitera Pengganti
35	Ika Melinda Meliala, S.H.	198710202011012014	Panitera Pengganti
36	Lianova, S.H	197503022009122001	Panitera Pengganti
37	Sopyani Devi, S.H	198510112005022002	Panitera Pengganti
38	Maryani, S.H.	197503071994032002	Jurusita
39	Wajidin	196905251993031005	Jurusita
40	Ika Murtianingsih, S.H.	198004102006042003	Jurusita Pengganti
41	Salundik, S.H.	197107052014081002	Jurusita Pengganti
42	Mandes, S.Kom	198304032009121004	Analis SDM Aparatur
43	Ainun Zaryah, S.E	198712162009042005	Penyusun Laporan Keuangan
44	Siti Nor Asiah, S.H	197401142006042002	Bendahara
45	Abdul kahar Mashuri	197211101993031002	Pengadministrasi Persuratan
46	Laila Hayati, A,.Md	198410172009122001	Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian
47	Amelia Sofia Nurlita, S.H.	199706272020122010	CPNS/ Analis Perkara Peradilan
48	Nanda Mario Fernandus. A.Md.	199608012020121005	CPNS/ Pengadministrasi Registrasi Perkara
49	Agave Christy J. Saragih	-	PPNPN
50	Yoyo	-	PPNPN
51	Kabul Budiono	-	PPNPN
52	Firdana Priyo Handoko	-	PPNPN
53	Ferry	-	PPNPN
54	Jejen Jaini	-	PPNPN
55	Timotius Agi Angga Kusuma	-	PPNPN
56	Dean Barizka	-	PPNPN
57	Kaspul	-	PPNPN
58	Supriyanto	-	PPNPN
59	Gustaf Denovan	-	PPNPN
60	Dandy Kurniawan	-	PPNPN
61	Anggryanto Sulistyo	-	PPNPN
62	Syahrin	-	PPNPN
63	Riska Faramitha	-	PPNPN
64	Berni Matheus Novrianus	-	PPNPN

## Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Palangkaraya Kelas IA

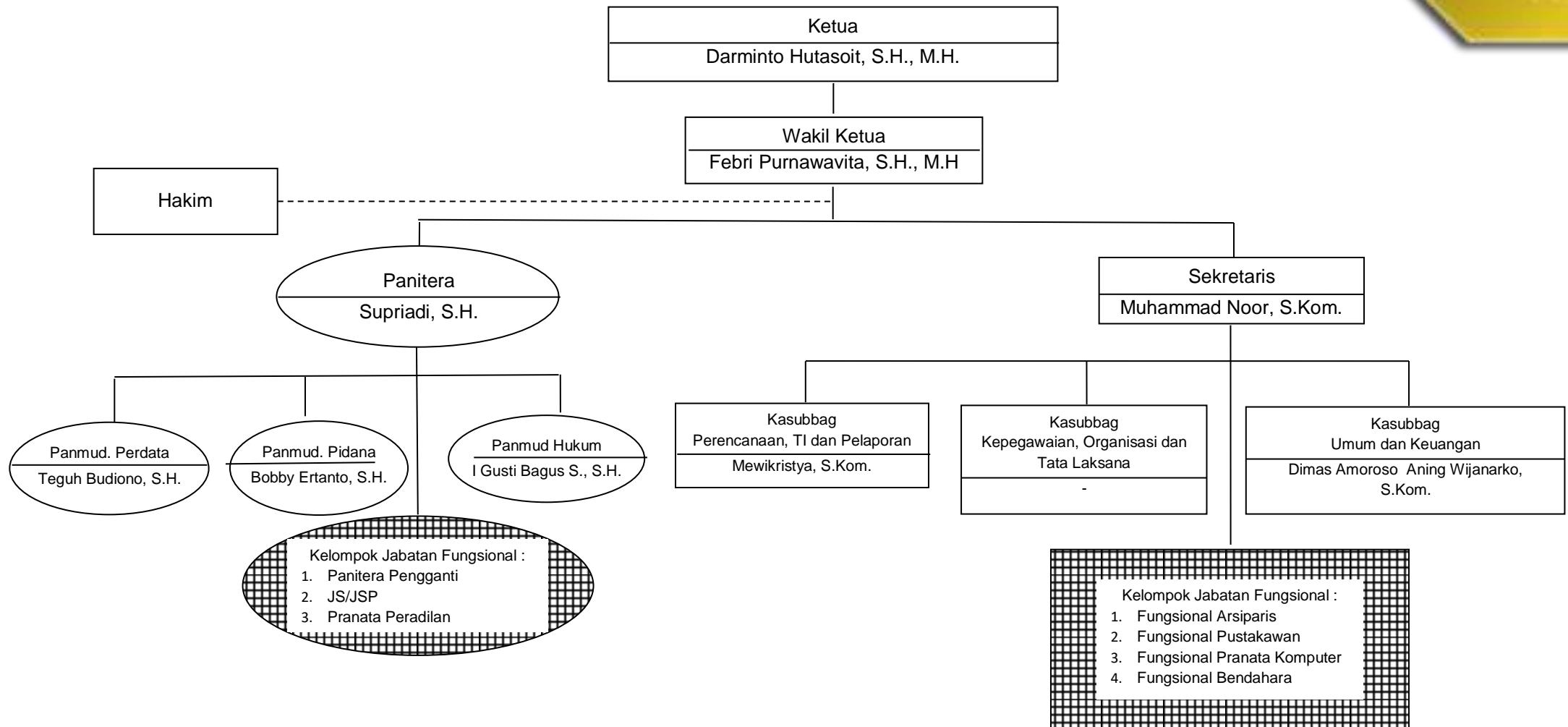


### III. Pengadilan Negeri Sampit

No	Nama	NIP	Jabatan
1	Darminto Hutasoit, S.H., M.H.	197501242000121001	Ketua
2	Febri Purnamavita, S.H., M.H.	197702072000122001	Wakil Ketua
3	Doni Prianto, S.H.	197901052006041004	Hakim Pratama Utama
4	Edi Rosadi, S.H., M.H.	198210262007041001	Hakim Pratama Utama
5	Hendra Novryandie, S.H., M.H.	198611012009041003	Hakim Pratama Utama
6	Abdul Rasyid, S.H.	198404142009041005	Hakim Pratama Utama
7	Saiful HS, S.H., M.H.	198607302009041002	Hakim Pratama Utama
8	Firdaus Sodiqin, S.H.	198511182009041002	Hakim Pratama Utama
9	Supriadi, S.H.	197310201993031002	Panitera
10	Muhammad Noor, S.Kom.	197911282009121005	Sekretaris
11	Teguh Budiono, S.H.	198208092008051001	Panitera Muda Perdata
12	I Gusti Bagus Sandhi, S.H.	198406072008051001	Panitera Muda Hukum
13	Bobby Ertanto, S.H.	198704252006041002	Panitera Muda Pidana
14	Mewikristya, S.Kom.	198511072009042010	Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan
15	Dimas Amoroso Aning Wijanarko, S.Kom.	199103012015031002	Kasubbag Umum dan Keuangan
16	Junipar Munte, S.H.	198405242012121002	Panitera Pengganti
17	Evi Agustine, S.H.	198608032006042001	Panitera Pengganti
18	Gustia Ningsih, A.Md., S.H.	198108192011012011	Panitera Pengganti
19	Syahrudin	197307041993031002	Juru Sita
20	Bayu Sistiawan, A.Md., S.H.	198309232011011004	Juru Sita
21	Sri Yuninto, S.H.	197006191998031001	Analis Perkara Peradilan
22	Mario Tyson Nadapdap, S.E.	199608172019031002	Analis SDM Aparatur
23	Andri Firmansyah, S.H.	199505122019031001	Analis Perkara Peradilan
24	Indra Lasmono, A.Md.	198707132019031008	Pengelola Sistem dan Jaringan
25	Anis Aprilia, S.E.I.	199404242020122007	CPNS/Analis Perkara Peradilan
26	Tompono	-	PPNPN
27	Erfan Saiful Anam	-	PPNPN

<b>28</b>	Kenmart Rajagukguk, S.H.	-	PPNPN
<b>29</b>	Eko Wahyudi	-	PPNPN
<b>30</b>	Juhran	-	PPNPN
<b>31</b>	Eka Sartika Dewi	-	PPNPN
<b>32</b>	Hasan Basri, A.Md.	-	PPNPN
<b>33</b>	Robi Suhada, S.H.	-	PPNPN

## Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Sampit Kelas IB

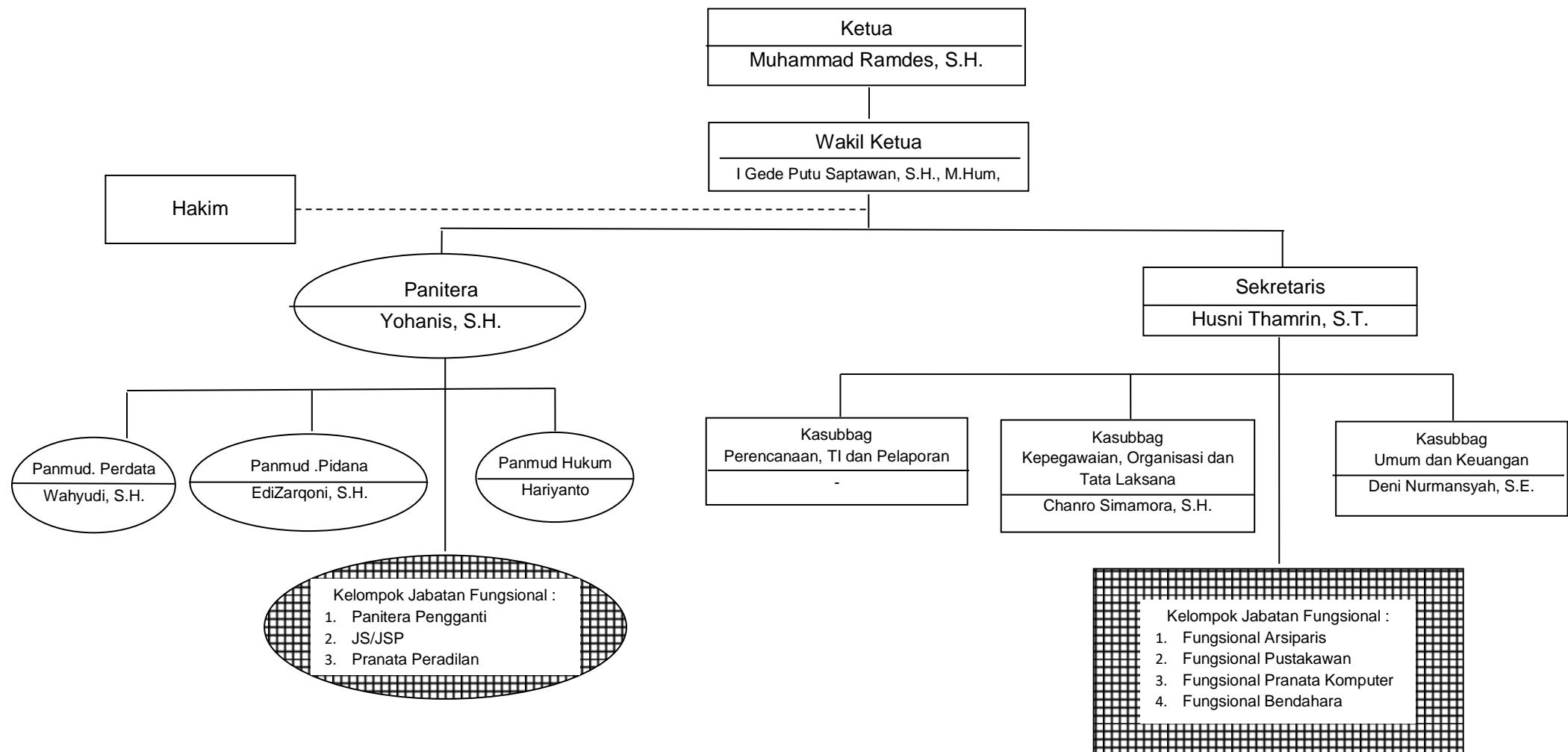


#### IV. Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

No	Nama	NIP	Jabatan
1	Muhammad Ramdes, S.H.	196712141992031001	Ketua
2	I Gede Putu Saptawan, S.H., M Hum.	196809091994031005	Wakil Ketua
3	Ahmad Husaini, S.H.	197501152005021001	Hakim
4	Reza Apriadi, S.H.	197604282005021001	Hakim
5	Heru Karyono, S.H.	198312162007041001	Hakim
6	Erick Ignatius Christoffel, SH	198008052009041005	Hakim
7	Yohanis, S.H.	19640411199803100	Panitera
8	Husni Thamrin, S.T.	19780308200904100	Sekretaris
9	Edi Zarqoni, S.H.	198101302009041002	Panitera Muda Pidana
10	Hariyanto	197501151994031002	Panitera Muda Hukum
11	Wahyudi, S.H.	197107101993031006	Panitera Muda Perdata
12	Deni Nurmansyah, S.E.	198401012006041005	Kasubbag Umum dan Keuangan
13	Chanro Simamora, S.H.	198904042012121002	Kasubbag. Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
14	Didik Sulaiman, S.H.	198110182012121003	Bendahara Pengeluaran
15	Rosilawati, SE	198407192009122002	Jurusita Pengganti
16	Maya Agustina, S.H.	198408222014082001	Analis Perkara Peradilan
17	M. Guntur, S.H.	199212082019031007	Analis Perkara Peradilan
18	Mulia Rizky, S.E.	198510292019031002	Analis SDM Aparatur
19	Diyah Eka Prasetya Rini, S.I.P.	199405152019032013	Analis SDM Aparatur
20	Yogi Nugraha Putra, A.Md.T.	199409182019031009	Pengelola Sistem dan jaringan
21	Sulistyawati	198403062014082001	Bendahara Penerimaan
22	Fera Aditias Ramadani, S.H.	199502122020122010	CPNS/Analis Perkara Peradilan
23	Hiskia J. Aritonang	-	PPNPN
24	Kao Muhammad Kaokabanullah	-	PPNPN
25	Noor Maydah Lestika	-	PPNPN
26	Muhamad Aji Purnomo	-	PPNPN
27	Erwin Tirajul Akbar	-	PPNPN

<b>28</b>	Ega Ayu Ananda	-	PPNPN
<b>29</b>	Masrun	-	PPNPN
<b>30</b>	Imam Setiyawan	-	PPNPN
<b>31</b>	Suci Paramita	-	PPNPN
<b>32</b>	Samsi	-	PPNPN
<b>33</b>	Nurul Hidayah	-	PPNPN
<b>34</b>	Rexzy Adhipura	-	PPNPN

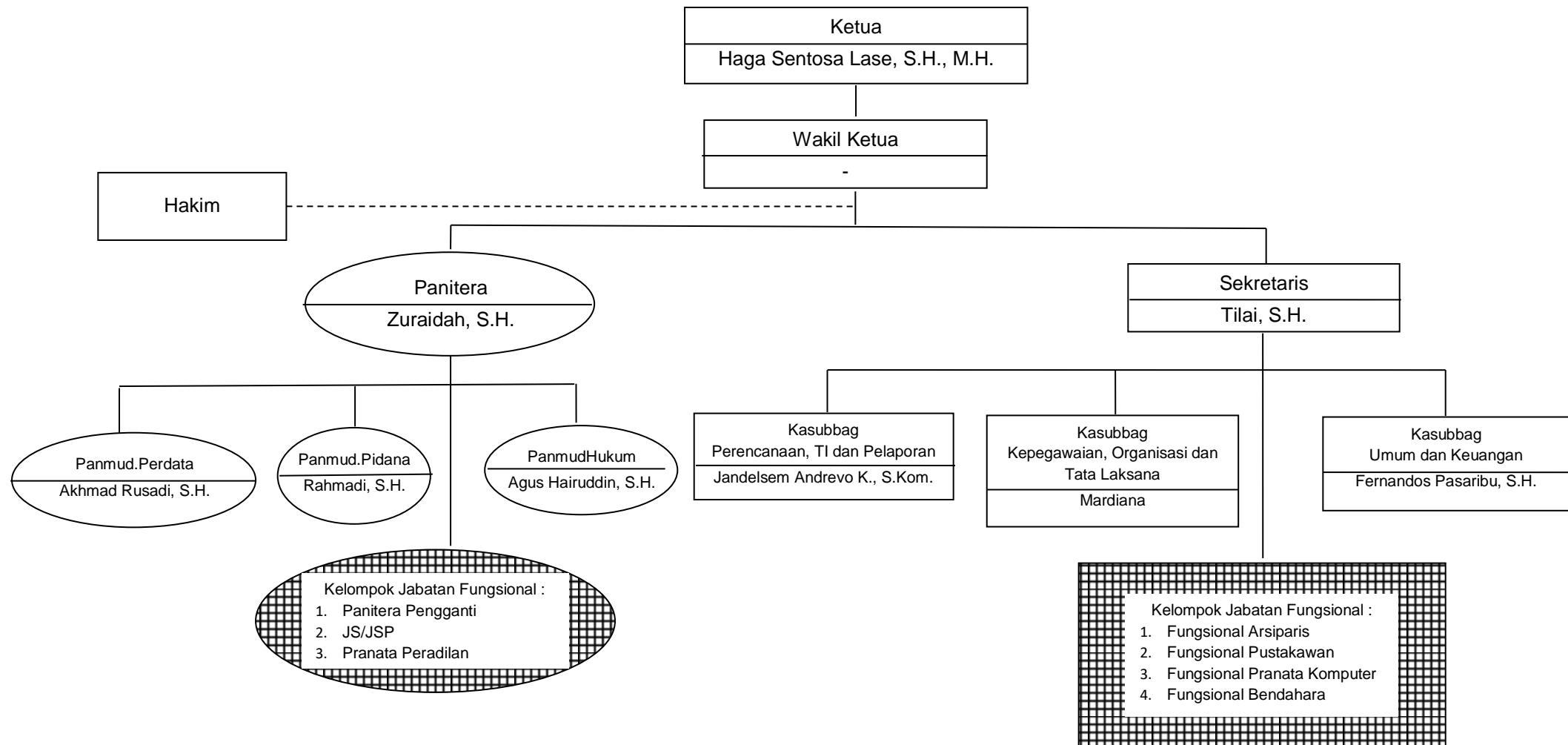
## Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas IB



**V. Pengadilan Negeri Kuala Kapuas**

No	Nama	NIP	Jabatan
1	Haga Sentosa Lase, S.H., M.H.	197810212002121004	Ketua
2	Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H., M.H.	199209122017122001	Hakim
3	Inggit Suci Pratiwi, S.H., M.H.	199203072017122002	Hakim
4	Syarli Kurnia Putri, S.H.	199110232017122001	Hakim
5	Wuri Mulyandari, S.H.	199306252017122001	Hakim
6	Pebrina Permata Sari, S.H.	198902122017122002	Hakim
7	Zuraidah, S.H.	196804291990032003	Panitera
8	Tilai, S.H.	196704061992032002	Sekretaris
9	Rahmadi, S.H.	196507171992031005	Panitera Muda Pidana
10	Agus Hairuddin, S.H.	196808171993031003	Panitera Muda Hukum
11	Akhmad Rusadi, S.H.	198602102006041002	Panitera Muda Perdata
12	Ernawati, S.H.	196603191992032001	Panitera Pengganti
13	Rusmiati, S.H.	196803041990032003	Panitera Pengganti
14	Gusti Norlani	196506281991032002	Panitera Pengganti
15	Mardiana	197208091991032002	Kasubbag. Kepegawaian, Organisasi Dan Tata Laksana
16	M. Imron Rosiyadi, S.H.	196905231993031002	Pengadministrasi Persuratan
17	Kiki Hidayanti, S.H.	198109202006042004	Panitera Pengganti
18	Fernandos Pasaribu, S.H.	199204102014031002	Kasubbag. Umum dan Keuangan
19	Jandelsem Andrevo Khairum, S.Kom.	198901172015031002	Kasubbag. PTIP
20	Mariatul Khiftiah, S.H.	198611012009122006	Jurusita Pengganti
21	Dody Pandiangan, S.E.	198604022019031005	Analis SDM Aparatur
22	Ubaidillah, S.H.	198506142009121009	Jurusita
23	Dedtran Natalia Marsetyo, S.H.	198412162009121002	Jurusita
24	Khadijah Nur Arafah, S.H.	199604272020122006	CPNS/Analis Perkara Peradilan
25	Ilham Salim Tampubolon, A.Md.	199107152020121002	CPNS/Pengadministrasi Registrasi Perkara
26	Amir Sinaga	-	PPNPN
27	Muhammad Usman, S.H.	-	PPNPN
28	Rachmat Hidayatullah	-	PPNPN
29	Saifuddin, SE	-	PPNPN
30	Nanda Kusuma Wardana	-	PPNPN
31	Rya Fitriyadi	-	PPNPN
32	Agus	-	PPNPN
33	Joy Alexander	-	PPNPN

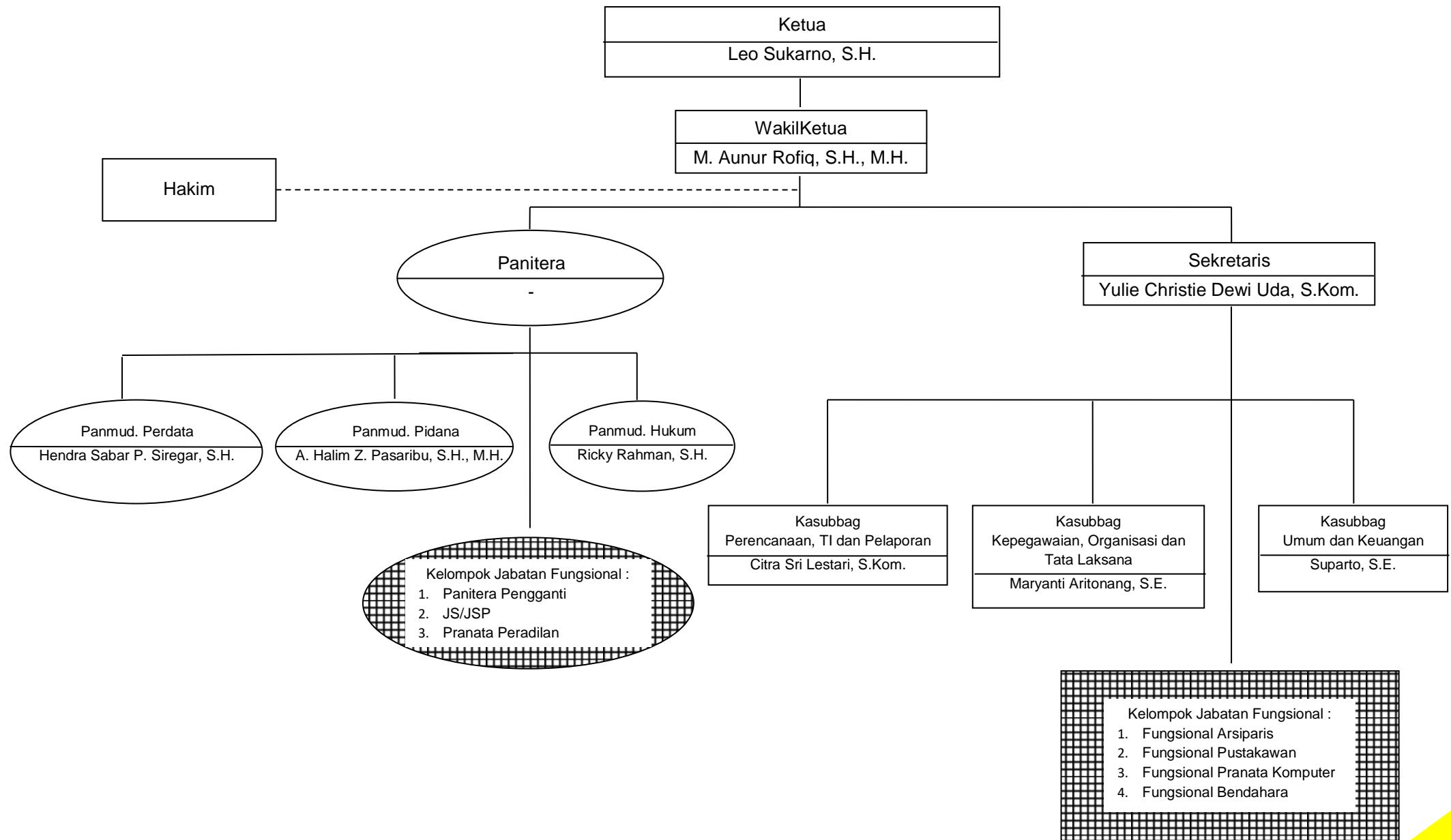
## **Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas IB**



## VI. Pengadilan Negeri Muara Teweh

No	Nama	NIP	Jabatan
1	Leo Sukarno, S.H.	197910222002121002	Ketua
2	M. Aunur Rofiq, S.H., M.H.	197204182005021001	Wakil Ketua
3	Teguh Indrasto, S.H.	197903032002121008	Hakim
4	Edi Rahmad, S.H., M.Kn	199006252017121005	Hakim
5	Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H., M.H	199406102017121003	Hakim
6	Mohammad Pandi Alam, S.H., M.H	199409142017121005	Hakim
7	M. Iskandar Muda, SH	198909182017121004	Hakim
8	Yulie Christie Dewi Uda, S.Kom	197807242009042002	Sekretaris
9	Amran Halim Zunaedi Pasaribu, SH.,M.H.	198406072007041001	Panitera Muda Pidana
10	Hendra Sabar Parulian Siregar, SH.	198205312008051001	Panitera Muda Perdata
11	Ricky Rahman, S.H.	198708272011011011	Panitera Muda Hukum
12	Citra Sri Lestari, S.Kom.	198409042011012019	Kasubbag. Perencanaan, TI Dan Pelaporan
13	Suparto, S.E.	196908211993031006	Kasubbag. Umum & Keuangan
14	Maryanti Aritonang, S.E.	199004082009122001	Kasubbag. Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
15	Richard r. Sampiterson Petrus, S.H.	198704172006041002	Panitera Pengganti
16	Rudy Ihsan	198210122006041003	Pengolah Informasi dan Komunikasi
17	Rosmini Huzaimah	196806081990032003	Pengadministrasi Registrasi Perkara
18	Luther Sianturi	196809121994031007	Pengadministrasi Persuratan
19	Awaludin Nur	197802212014081001	Bendahara
20	Kaspul Anwar	197209072014081001	Jurusita Pengganti
21	Arif Ferdian Junaedi, S.H.	199801272020121003	CPNS/Analisis Perkara Peradilan
22	Alqoerlah Reza Fahlevi, A.Md.	199209122020121007	CPNS/Pengadministrasi Registrasi Perkara
23	Dina Tiarawati	-	PPNPN
24	Hartanto Chandra Sujana, S.H.	-	PPNPN
25	Pran Ary Gunadi	-	PPNPN
26	Mentari	-	PPNPN
27	M. Faisal Tandjung	-	PPNPN
28	Nur Indah Kusumawardani	-	PPNPN
29	Suandy Aries Setiady	-	PPNPN
30	Ahmad Syarifudin	-	PPNPN

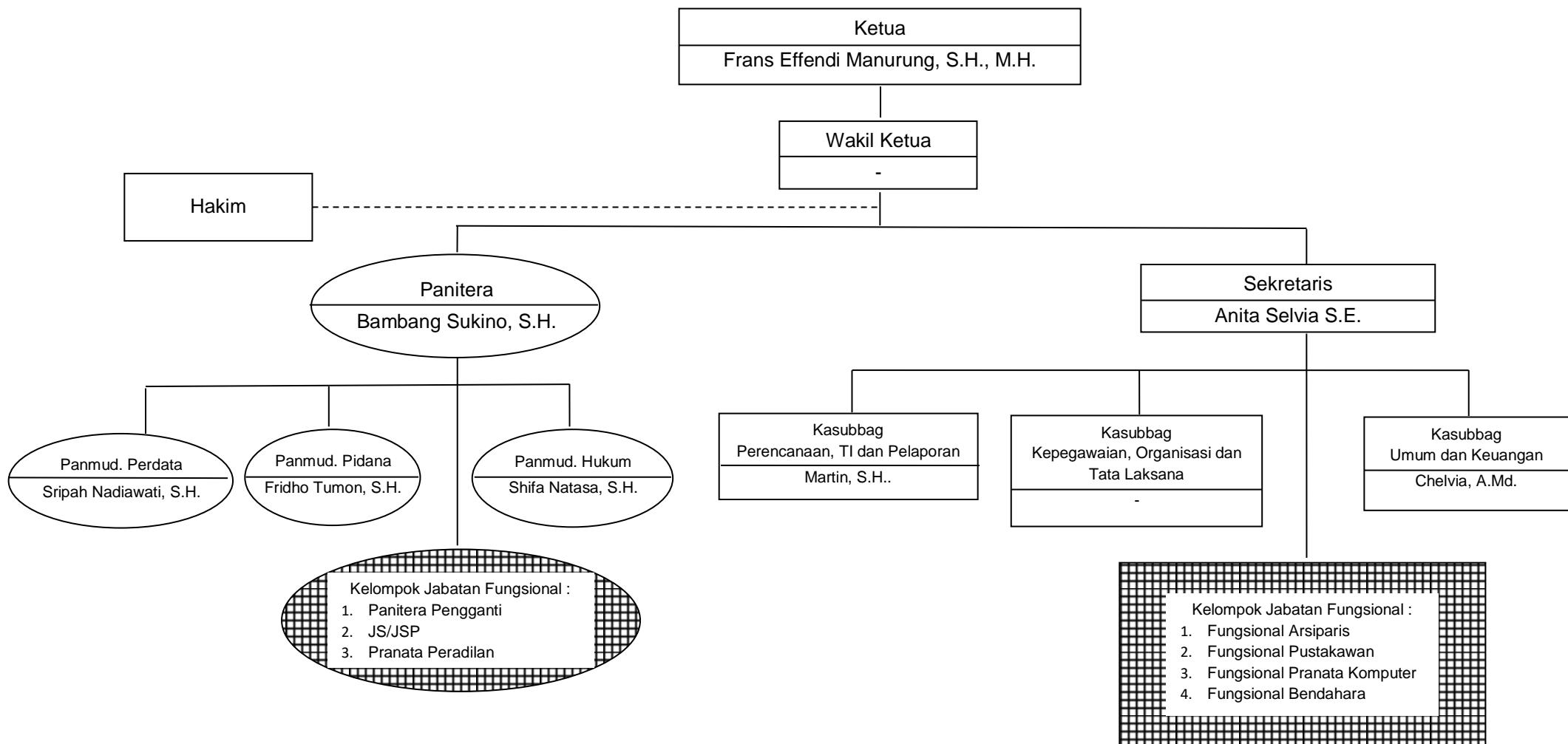
## Struktur Organisasi Pengadilan Negeri MuaraTeweh Kelas II



## VII. Pengadilan Negeri Buntok

No	Nama	NIP	Jabatan
1	Frans Effendi Manurung, S.H., M.H.	197705282002121003	Ketua
2	Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum.	198809272011011005	Hakim
3	Oktavia Mega Rani, S.H., M.H.	198810282017122002	Hakim
4	Anjar Koholifano Mukti, S.H. M.H.	198909232017121002	Hakim
5	M. Sigit Wisnu Wardhana, S.H.	198809082017121001	Hakim
6	Niesya Mutiara Arindra, S.H.	199210232017122001	Hakim
7	Bambang Sukino, S.H.	197210291994031004	Panitera
8	Anita Selvia, S.E.	197807062011012003	Sekretaris
9	Fridho Tumon, S.H.	198405242009121007	Panitera Muda Pidana
10	Sripah Nadiawati, S.H.	198611112006042002	Panitera Muda Perdata
11	Martin, S.H.	198303072012121001	Kasubbag. PTIP
12	Shifa Natasa, S.H.	199005162014032004	Panitera Muda Hukum
13	Chelvia. A.Md	198611252009042030	Kasubbag. Umum dan Keuangan
14	Arif Rachman Hakim, S.H.	198811272014031002	Panitera Pengganti
15	Firdaus Amin, S.E.	198504262019031006	Analis Sdm Aparatur
16	Yuris. S	197101162014081001	Jurusita Pengganti
17	Noryadin	197203052014081001	Jurusita Pengganti
18	Kian Teguh, S.H.	199704222020121006	CPNS/Analisis Perkara Peradilan
19	Arnold Jhon Hanry Sinaga, A.Md	199306242020121006	CPNS/ Pengadministrasi Register Perkara
20	Reni Angrahini, S.E.	-	PPNPN
21	Elmidiyanti	-	PPNPN
22	Febrina Rahmah, A.Md	-	PPNPN
23	Syahidurrasyid	-	PPNPN
24	Syarif Hidayatullah, S.Pd.I	-	PPNPN
25	Windiyanti	-	PPNPN
26	Taupik Rahman	-	PPNPN

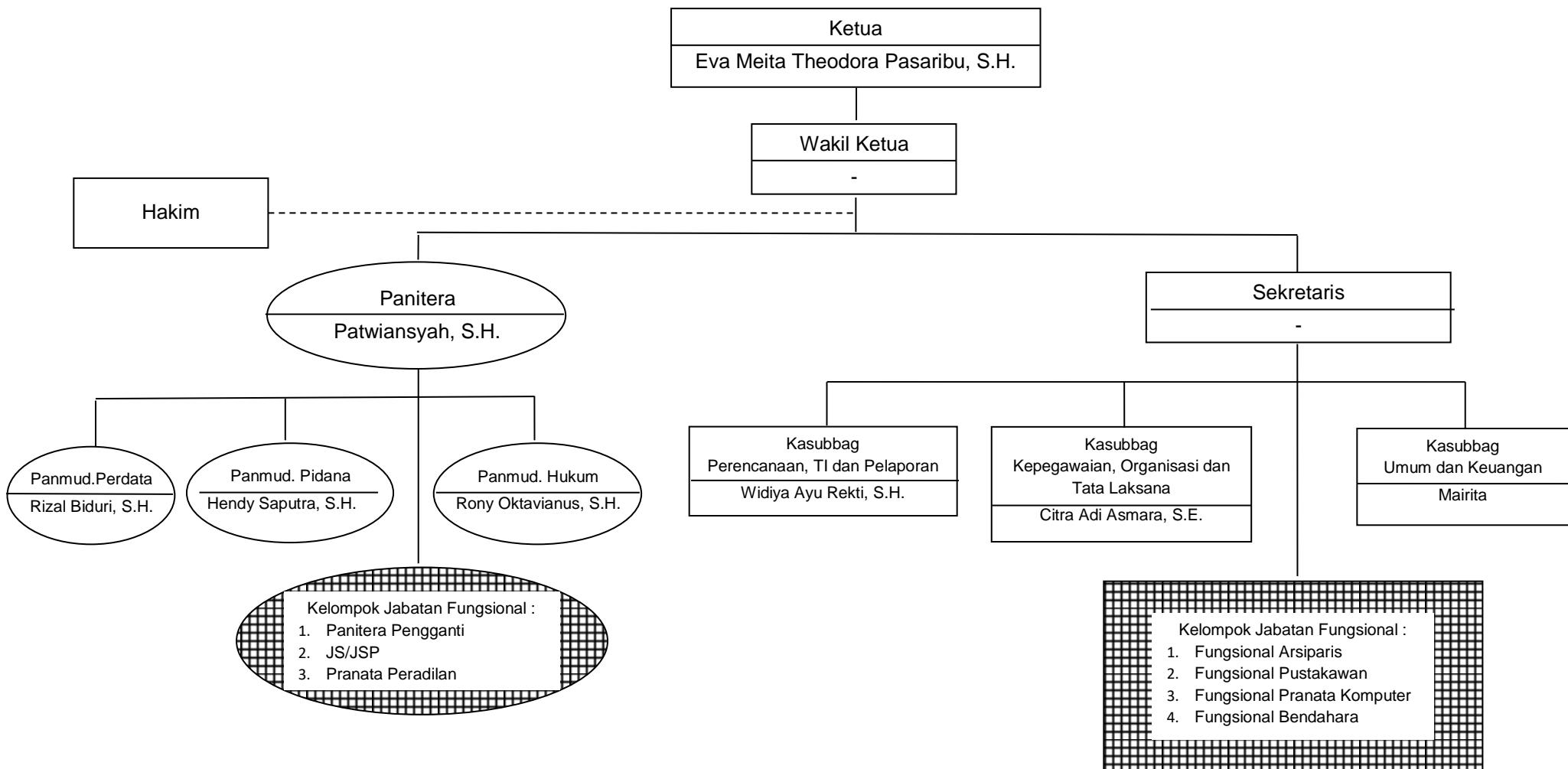
## Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Buntok Kelas II



### VIII. Pengadilan Negeri Tamiang Layang

No	Nama	NIP	Jabatan
1	Eva Meita Theodora Pasaribu, S.H.	197505032000122002	Ketua
2	Beny Sumarno, S.H., M.H.	197608292005021001	Hakim
3	Arief Heryogi, S.H.	199208302017121002	Hakim
4	Febdhy Setyana, S.H.	198602232017121001	Hakim
5	Eddy Montana, S.H.	199402012017121004	Hakim
6	Kharisma Laras Sulu, S.H.	199409072017121005	Hakim
7	Maria Faustina Beata, S.H.	199511132017122002	Hakim
8	Patwiansyah, S.H.	196908241993031001	Panitera
9	Rizal Biduri, S.H.	197201021994031001	Panitera Muda Perdata
10	Hendy Pradipta, S.H.	198704302011011014	Panitera Muda Pidana
11	Rony Oktavianus, S.H.	198410092009041005	Panitera Muda Hukum
12	Mairita	196805201991030021	Kasubbag. Umum dan Keuangan
13	Citra Adi Asmara, S.E.	198309092011011010	Kasubbag. Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
14	Widiya Ayu Rekti, S.H.	198901262012122001	Kasubbag. Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
15	Aulia Rachmi, S.H., M.H	198404082014032002	Panitera Pengganti
16	Sepende	196909091993031005	Panitera Pengganti
17	Nordin Asaddiq	197408271993031003	Jurusita
18	Zabal Akbar, S.H.	198810242014031001	Jurusita Pengganti
19	Hendra Pratama Marang, S.AB.	198309272010011018	Penyusun Laporan Keuangan
20	Hendy Saputra, S.E.	198103152009011003	Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
21	Riduan	198603072005021001	Pengadministrasi Kepegawaian
22	Hizkia Karunia Perangin Angin, S.H.	199309102020121005	CPNS/Analis Perkara Peradilan
23	Yaro Wivesto Peranginangin, A.Md. Kom	199803022020121002	CPNS/Pengadministras i Register Perkara
24	Akhmad Wardani, A.Md.	-	PPNPN
25	Arbatson	-	PPNPN
26	Pirmansyah	-	PPNPN
27	Tada Mawisa	-	PPNPN
28	Ifan Yuan Tanjung Sinduro	-	PPNPN
29	Siti Nurhasanah	-	PPNPN
30	Mahdalina	-	PPNPN
31	Feronika Lata Manjari, S.E.	-	PPNPN
32	Okta Putriani Manurung	-	PPNPN

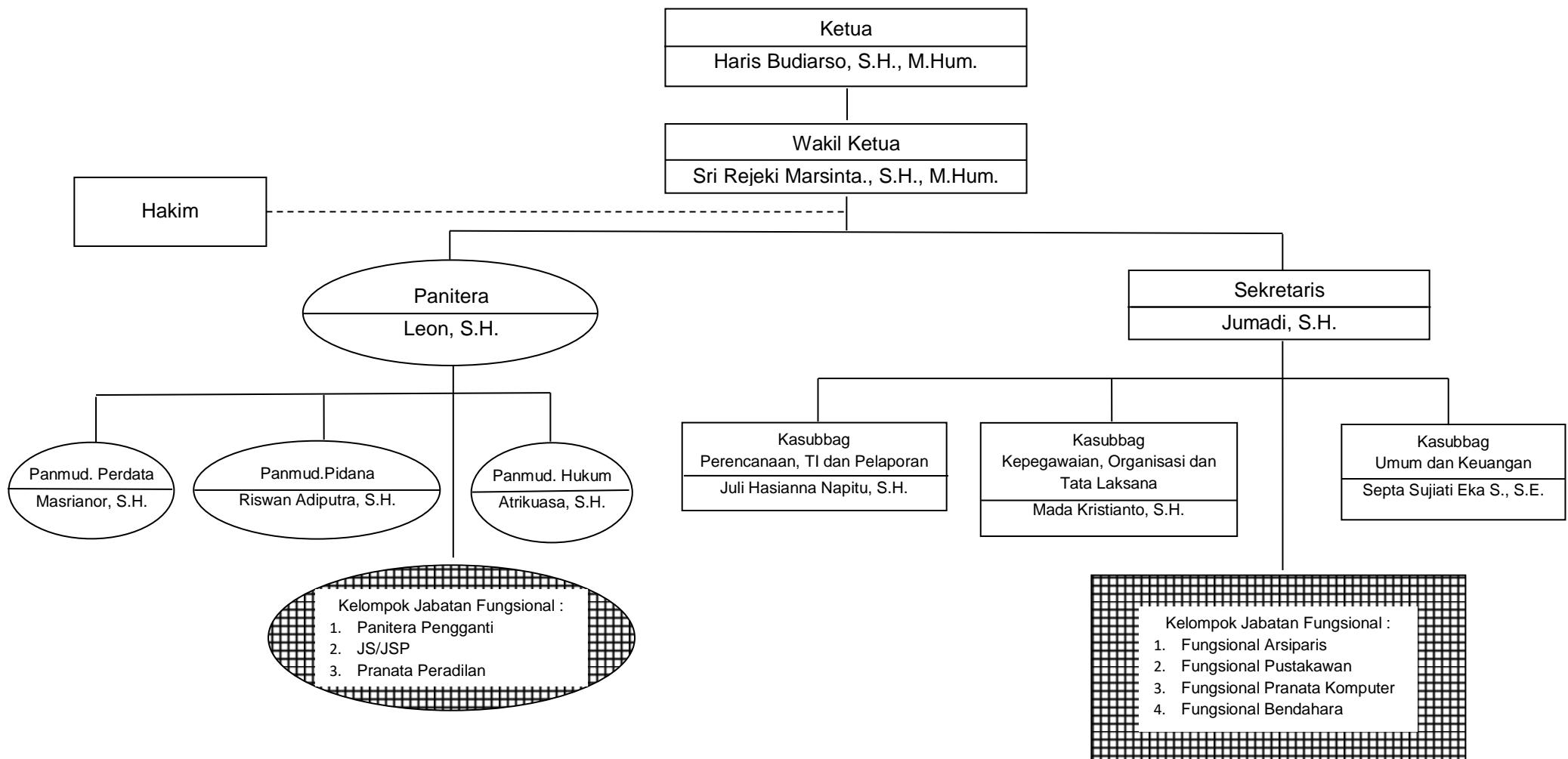
## Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Tamiang Layang Kelas II



## IX. Pengadilan Negeri Kasongan

No	Nama	NIP	Jabatan
1	Haris Budiarso, S.H., M.Hum.	197805052002121002	Ketua
2	Sri Rejeki Marsinta, S.H., M.Hum.	197609162002122002	Wakil Ketua
3	Qurratul Aini Fikasari, S.H., M.H.	198902282017122001	Hakim
4	Fega Uktolseja, S.H., M.H.	198905082017121001	Hakim
5	Cesar Antonio Munthe, S.H., M.H.	199007042017121003	Hakim
6	Afrian Faryandi, S.H.	199104212017121004	Hakim
7	Patar Panjaitan, S.H.	199208082017121006	Hakim
8	Win Widarti, S.H.	199405192017122002	Hakim
9	Leon, S.H.	196903111993031004	Panitera
10	Jumadi, S.H.	196807171993031010	Sekretaris
11	Riswan Adiputra, S.H.	198602172009041003	Panmud Pidana
12	Masrianor, S.H.	198310062009121008	Panmud Perdata
13	Atrikuasa, S.H.	198502012011011006	Panmud Hukum
14	Septa Sujati Eka Setia, S.E.	198509232006042001	Kasubbag. Umum dan Keuangan
15	Mada Kristianto, S.H.	198503092012121002	Kasubbag. Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
16	Juli Hasianna Napitu, S.H.	198707112012122001	Kasubbag PTIP
17	Muhamad Fadli, S.H.	198705262006041002	Panitera Pengganti
18	Ricky Darmawan, S.H., M.H.	198708182012121001	JSP
19	Faros Ashdaq, A.Md., S.H.	199005262015031001	JSP
20	Siti Martinah	198603312006042002	Bendahara
21	Devi Triana Hutabarat, S.H.	199609132020122007	CPNS/ Analis Perkara Peradilan
22	Toto Isnadi, A.Md.	199410082020121007	CPNS/Pengadministrasi Registrasi Perkara
23	Adhyatma	-	PPNPN
24	Sentosa	-	PPNPN
25	Teguh Setiawan	-	PPNPN
26	Harlis, S.H.	-	PPNPN
27	Natalia Dhevinda, S.H.	-	PPNPN
28	Muhammad Hasan, S.Pd.	-	PPNPN
29	Mensusana	-	PPNPN

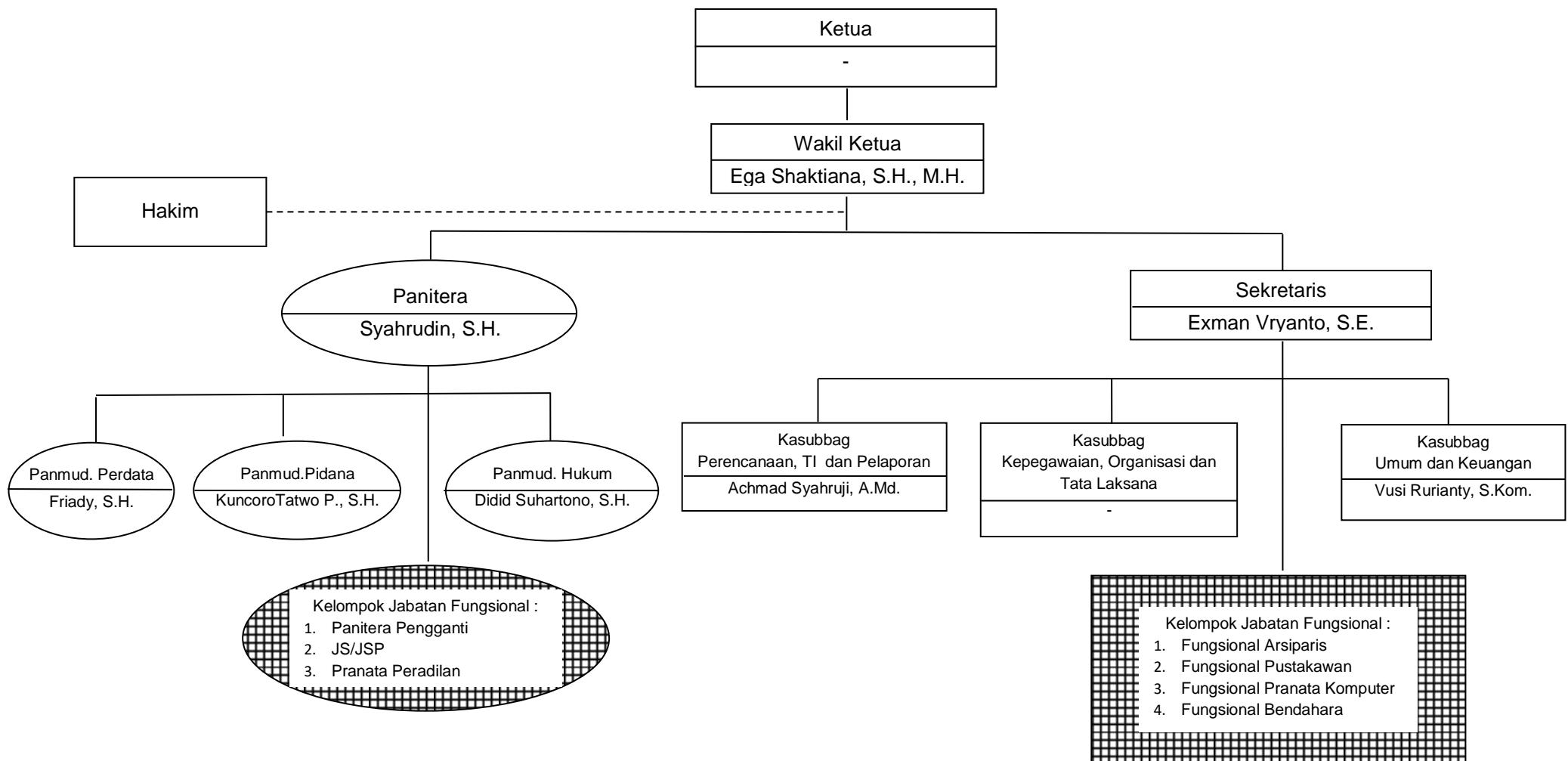
## Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Kasongan Kelas II



**X. Pengadilan Negeri Kuala Kurun**

No	Nama	NIP	Jabatan
1	Ega Shaktiana, S.H., M.H	197710012003121001	Wakil Ketua
2	Raden Guntar Anggaraputra Sudjata, S.H., M.H.	198709092017121001	Hakim
3	Kunti Kalma Syita, S.H., M.H.	199205142017122003	Hakim
4	Tumpak Hasiholan Manurung, S.H.	199311072017121003	Hakim
5	Fransiskus Sinurat, S.H.	199403222017121004	Hakim
6	Syahrudin, S.H.	196808271993031004	Panitera
7	Exman Vryanto, S.E.	197311211993031002	Sekretaris
8	Friady, S.H.	198210142009121005	Panitera Muda Perdata
9	Kuncoro Tatwo Pratisto, S.H.	197101171995031001	Panitera Muda Pidana
10	Didid Suhartono, S.H.	198305022009041009	Panitera Muda Hukum
11	Vusi Ruriyanti, S.Kom.	198603152009042008	Kasubbag. Umum dan Keuangan
12	Achmad Syahruji, A.Md.	198410232009041005	Kasubbag. PTIP
13	Mangisi Gultom	198408292006041001	Jurusita
14	Tubagus Ramdan, S.E.	198904232019031005	Analis SDM Aparatur
15	Abi Kusuma Friestiawan Ahmad, S.H.	199309212019031005	Analis Perkara Peradilan
16	Rahmat Salim Rumnie, S.E.	199102142020121006	CPNS/Verifikator Keuangan
17	Devi Tri Mulyani, S.H.	199303032020122005	CPNS/Analis Perkara Peradilan
18	Yulidian Pratama, A.Md.	199207172020121007	CPNS/ Pengadministrasi Registrasi Perkara
19	Mardona	-	PPNPN
20	Topan Brian	-	PPNPN
21	Solimah	-	PPNPN
22	Dede Rully Kurniawan	-	PPNPN
23	Hardiyono	-	PPNPN
24	Septi Novela	-	PPNPN
25	Yongki Pranata	-	PPNPN
26	FX. Ken Harrys Wikrama	-	PPNPN

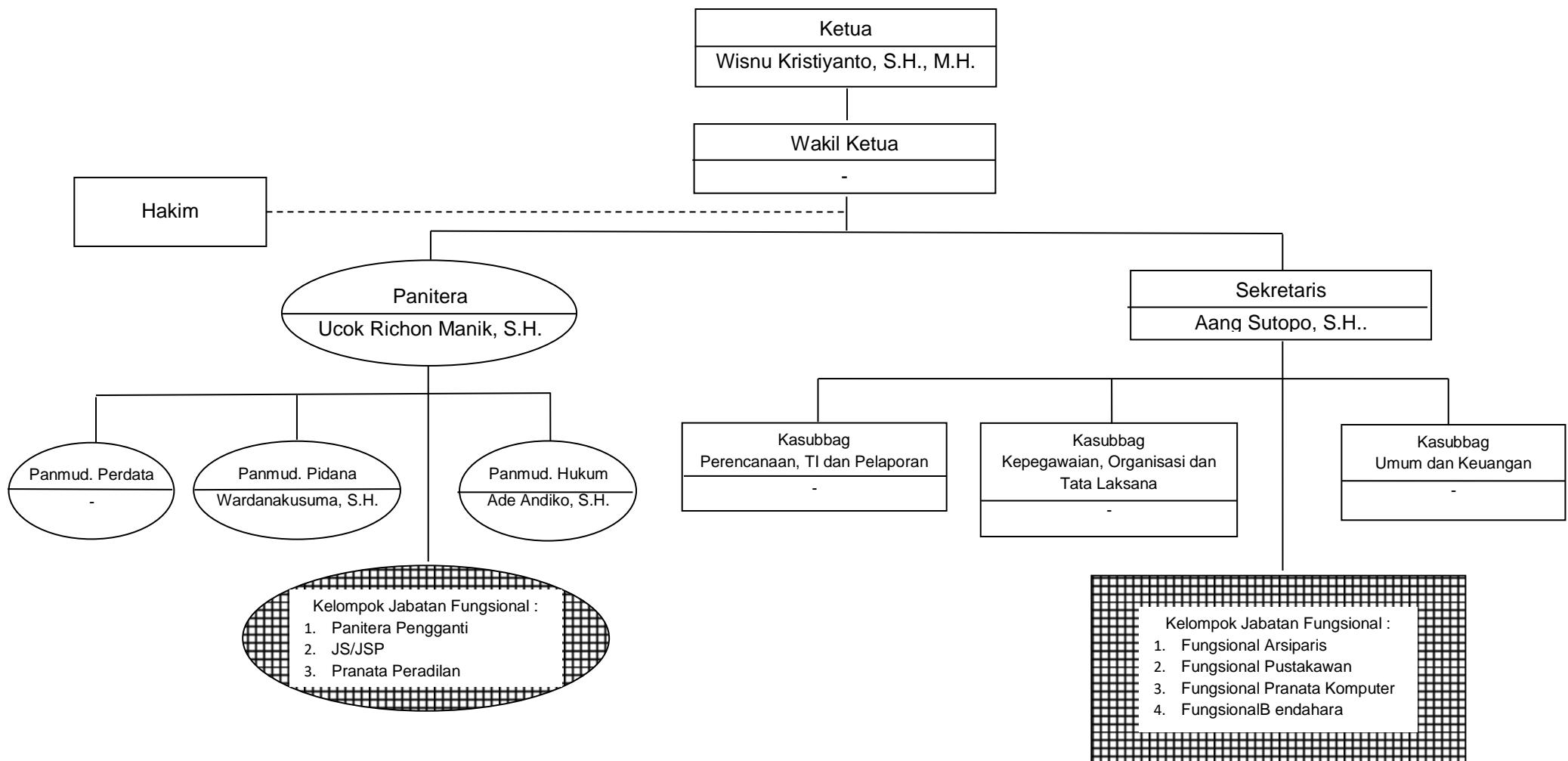
## Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II



**XI. Pengadilan Negeri Nanga Bulik**

No	Nama	NIP	Jabatan
1	Wisnu Kristiyanto, S.H., M.H.	197706222001121002	Ketua
2	Stephanus Yunanto Arywendho, S.H.	197706212003121001	Wakil Ketua
3	Tony Arifuddin Sirait, S.H., M.H.	198602012017121002	Hakim
4	Asterika, S.H.	199305262017122001	Hakim
5	Noor Ibni Hasanah, S.H.	199308102017122002	Hakim
6	Rendi Abednego Sinaga, S.H.	199402262017121005	Hakim
7	Istiani, S.H.	199504042017122004	Hakim
8	Rizkiyanti Amalia Septiani, S.H.	199509272017122005	Hakim
9	Ucok Richon Manik, S.H.	198306272006041003	Panitera
10	Aang Sutopo, S.H.	198201132009121002	Sekretaris
11	Wardanakusuma, S.H.	198310032009121006	Panitera Muda Pidana
12	Ade Andiko, S.H.	198711192011011005	Panitera Muda Hukum
13	Thio Doly Pakpahan, S.H.	198311062006041001	Jurusita
14	Aris Editio Telaumbanua, S.H., M.Han	198906232019031005	Plt. Kasubag Keportala
15	Toni Aprianto, S.H.	199404262019031003	Analis Perkara Peradilan
16	Beny Parlindungan Lumbantoruan, S.H.	198904192020121002	CPNS/Analis Perkara Peradilan
17	Periyaldi, A.Md	199402042020121006	CPNS/Pengelola Sistem dan Jaringan
18	T.Firdaus, A.Md	199305112020121007	CPNS/Pengadministrasi Register Perkara
19	Kasmawati	-	PPNPN
20	Suriyanto	-	PPNPN
21	Candra Derino Sinaga, S.Pd	-	PPNPN
22	Winda	-	PPNPN
23	Rija Romadan	-	PPNPN
24	Akhmad Faisul	-	PPNPN
25	Nyai Shintan Dadie	-	PPNPN
26	Alfian Prasetya Nugroho, S.Ak	-	PPNPN

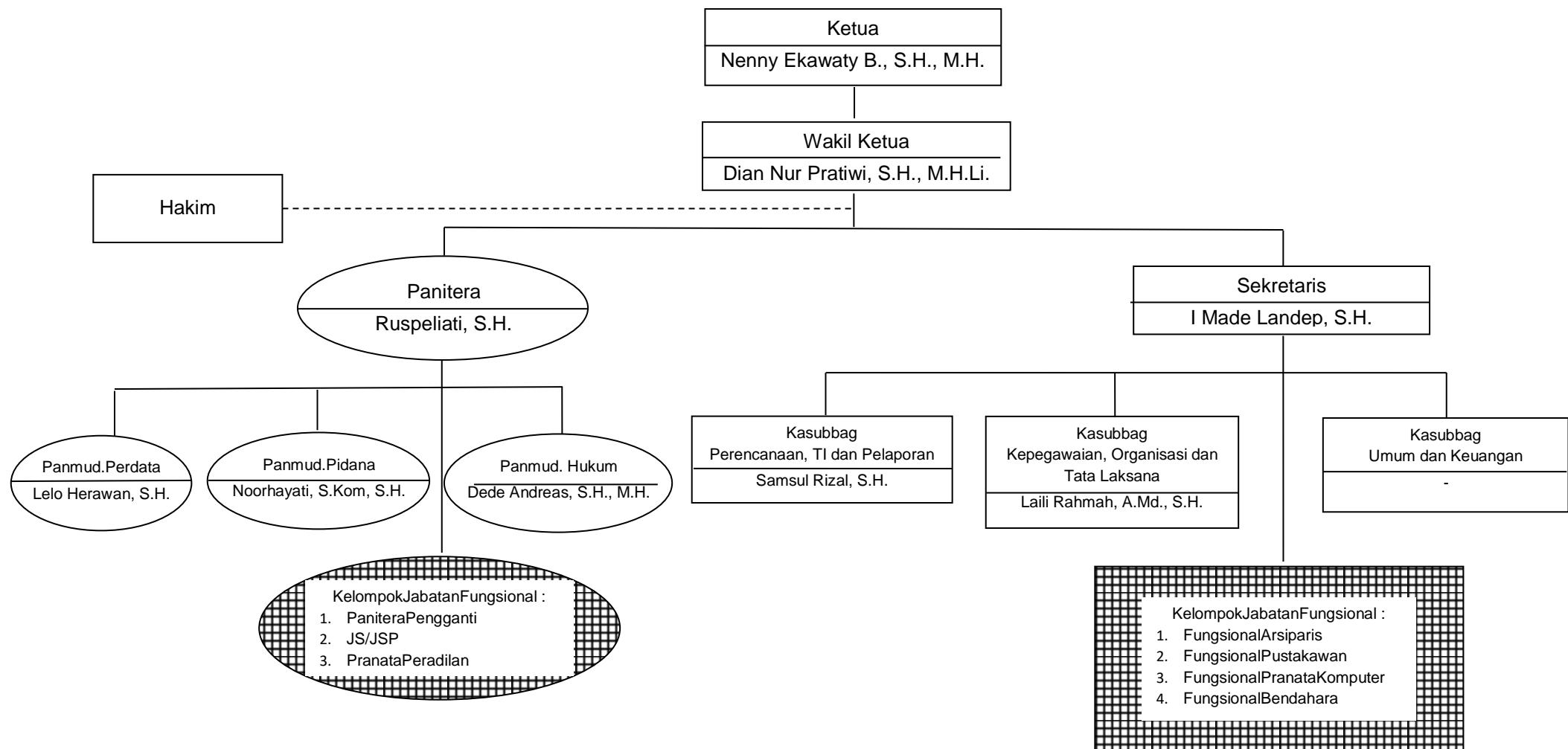
## Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Nanga Bulik Kelas II



**XII. Pengadilan Negeri Pulang Pisau**

No	Nama	NIP	Jabatan
1	Nenny Ekawaty Barus, S.H., M.H.	197701122001122001	Ketua
2	Dian Nur Pratiwi, S.H., M.H.Li	198101082003122001	Wakil Ketua
3	Ismaya Salindri, S.H., M.H.	199105012017122002	Hakim
4	Herjanriasto Bekti Nugroho, S.H., M.H.	199201042017121003	Hakim
5	Ishmatul Lu`Lu, S.H.	199312132017122001	Hakim
6	Dwi Fajriyah Suci Anggraini, S.H.	199402102017122002	Hakim
7	Silvia Kumalasari, S.H.	199408162017122002	Hakim
8	Niken Anggi Prajanti, S.H., M.Kn.	198910082017122001	Hakim
9	Ruspeliati, S.H.	196904011991032002	Panitera
10	I Made Landep, SH	197210041993031006	Sekretaris
11	Lelo Herawan, S.H.	198501142009041003	Panitera Muda Hukum
12	Dede Andreas, S.H., M.H.	198202122005021003	Panitera Muda Perdata
13	Noorhayati, S.Kom., S.H.	197708092009122002	Panitera Muda Pidana
14	Samsul Rizal, S.H.	198404042006041004	Kasubbag. Perencanaan, TI dan Pelaporan
15	Laili Rahmah, A.Md. S.H.	198012242009122005	Kasubbag. Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
16	Janward Sumuang Purba	197901102001121001	Juru Sita
17	Reinhard Simanjuntak, S.H.	199408202019031005	Analis SDM Aparatur
18	M. Zaldi Akbar, S.H.	199410122019031006	Analis Perkara Peradilan
19	Riviera Jesica Manurung, S.H.	199402082020122008	CPNS/Analis Perkara Peradilan
20	Arofah Azhar, A.Md.	198903242020121002	CPNS/Pengelola Sistem dan Jaringan
21	Romi Nevriyandra, A.Md.	198907262020121002	CPNS/Pengadministrasi Registrasi Perkara
22	Muhammad Dian G. M.	-	PPNPN
23	Lessa Wara'a Ezzana	-	PPNPN
24	Ahmad Faisal Rosadi	-	PPNPN
25	Alfi Fahmi	-	PPNPN
26	Geryawan	-	PPNPN
27	Vicky Krisli	-	PPNPN
28	Rony	-	PPNPN
29	Sinta Kartika Sari	-	PPNPN

## Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Pulang Pisau Kelas II



## A. Komposisi Sumber Daya Manusia

### I. Pengadilan Tinggi Palangkaraya

Berdasarkan Kepangkatan/Golongan

No	Pangkat	Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
			L	P	
1	Pembina Utama	IV/e	17	5	22
2	Pembina Utama Madya	IV/d	2	-	2
3	Pembina Utama Muda	IV/c	-	-	-
4	Pembina Tk. I	IV/b	-	1	1
5	Pembina	IV/a	2	2	4
6	Penata Tk. I	III/d	4	5	9
7	Penata	III/c	7	4	11
8	Penata Muda Tk. I	III/b	2	-	2
9	Penata Muda	III/a	2	3	5
10	Pengatur Tk. I	II/d	-	-	-
11	Pengatur	II/c	3	-	3
12	Pengatur Muda Tk. I	II/b	1	-	1
13	Pengatur Muda	II/a	-	-	-
14	Non Pangkat	-	11	1	12

Berdasarkan Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	Doktoral (S-3)	2	-	2
2	Magister (S-2)	18	4	22
3	Sarjana (S-1)	22	17	39
4	Diploma (D-3)	3	-	3
5	SLTA/Sederajat	6	-	6
6	SLTP/Sederajat	-	-	-
7	SD/Sederajat	-	-	-
8	Non Pendidikan	-	-	-

## II. Pengadilan Negeri Palangka Raya

Berdasarkan Kepangkatan/Golongan

No	Pangkat	Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
			L	P	
1	Pembina Utama	IV/e	-	-	-
2	Pembina Utama Madya	IV/d	3	-	3
3	Pembina Utama Muda	IV/c	-	-	-
4	Pembina Tk. I	IV/b	1	1	2
5	Pembina	IV/a	8	1	9
6	Penata Tk. I	III/d	2	9	11
7	Penata	III/c	3	5	8
8	Penata Muda Tk. I	III/b	2	4	6
9	Penata Muda	III/a	1	2	3
10	Pengatur Tk. I	II/d	-	-	-
11	Pengatur	II/c	1	-	1
12	Pengatur Muda Tk. I	II/b	-	-	-
13	Pengatur Muda	II/a	-	-	-
14	Non Pangkat	-	17	4	21

Berdasarkan Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	Doktoral (S-3)	1	-	1
2	Magister (S-2)	11	5	16
3	Sarjana (S-1)	7	17	24
4	Diploma (D-3)	1	-	1
5	SLTA/Sederajat	4	-	4
6	SLTP/Sederajat	-	-	-
7	SD/Sederajat	-	-	-
8	Non Pendidikan	-	-	-

### III. Pengadilan Negeri Sampit

Berdasarkan Kepangkatan/Golongan

No	Pangkat	Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
			L	P	
1	Pembina Utama	IV/e	-	-	-
2	Pembina Utama Madya	IV/d	-	-	-
3	Pembina Utama Muda	IV/c	-	-	-
4	Pembina Tk. I	IV/b	1	1	2
5	Pembina	IV/a	-	-	-
6	Penata Tk. I	III/d	11	1	12
7	Penata	III/c	3	-	3
8	Penata Muda Tk. I	III/b	1	1	2
9	Penata Muda	III/a	3	2	5
10	Pengatur Tk. I	II/d	-	-	-
11	Pengatur	II/c	1	-	1
12	Pengatur Muda Tk. I	II/b	-	-	-
13	Pengatur Muda	II/a	-	-	-
14	Non Pangkat	-	7	1	8

Berdasarkan Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	Doktoral (S-3)	-	-	-
2	Magister (S-2)	4	1	5
3	Sarjana (S-1)	17	4	21
4	Diploma (D-3)	2	-	2
5	SLTA/Sederajat	5	1	6
6	SLTP/Sederajat	-	-	-
7	SD/Sederajat	-	-	-
8	Non Pendidikan	-	-	-

#### IV. Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

Berdasarkan Kepangkatan/Golongan

No	Pangkat	Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
			L	P	
1	Pembina Utama	IV/e	-	-	-
2	Pembina Utama Madya	IV/d	-	-	-
3	Pembina Utama Muda	IV/c	1	-	1
4	Pembina Tk. I	IV/b	1	-	1
5	Pembina	IV/a	3	-	3
6	Penata Tk. I	III/d	4	-	4
7	Penata	III/c	4	-	4
8	Penata Muda Tk. I	III/b	1	-	1
9	Penata Muda	III/a	2	4	6
10	Pengatur Tk. I	II/d	-	-	-
11	Pengatur	II/c	1	-	1
12	Pengatur Muda Tk. I	II/b		1	1
13	Pengatur Muda	II/a	-	-	-
14	Non Pangkat	-	4	8	12

Berdasarkan Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	Doktoral (S-3)	-	-	-
2	Magister (S-2)	1	-	1
3	Sarjana (S-1)	13	4	17
4	Diploma (D-3)	1	-	1
5	SLTA/Sederajat	2	1	3
6	SLTP/Sederajat	-	-	-
7	SD/Sederajat	-	-	-
8	Non Pendidikan	-	-	-

## V. Pengadilan Negeri Kuala Kapuas

Berdasarkan Kepangkatan/Golongan

No	Pangkat	Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
			L	P	
1	Pembina Utama	IV/e	-	-	-
2	Pembina Utama Madya	IV/d	-	-	-
3	Pembina Utama Muda	IV/c	-	-	-
4	Pembina Tk. I	IV/b	-	-	-
5	Pembina	IV/a	1	-	1
6	Penata Tk. I	III/d	2	4	6
7	Penata	III/c	2	3	5
8	Penata Muda Tk. I	III/b	2	3	5
9	Penata Muda	III/a	3	4	7
10	Pengatur Tk. I	II/d	-	-	-
11	Pengatur	II/c	1	-	1
12	Pengatur Muda Tk. I	II/b	-	-	-
13	Pengatur Muda	II/a	-	-	-
14	Non Pangkat	-	8	-	8

Berdasarkan Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	Doktoral (S-3)	-	-	-
2	Magister (S-2)	1	2	3
3	Sarjana (S-1)	9	10	19
4	Diploma (D-3)	1	-	1
5	SLTA/Sederajat	-	2	2
6	SLTP/Sederajat	-	-	-
7	SD/Sederajat	-	-	-
8	Non Pendidikan	-	-	-

## VI. Pengadilan Negeri Muara Teweh

Berdasarkan Kepangkatan/Golongan

No	Pangkat	Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
			L	P	
1	Pembina Utama	IV/e	-	-	-
2	Pembina Utama Madya	IV/d	-	-	-
3	Pembina Utama Muda	IV/c	-	-	-
4	Pembina Tk. I	IV/b	-	-	-
5	Pembina	IV/a	3	-	3
6	Penata Tk. I	III/d	2	1	3
7	Penata	III/c	2	2	4
8	Penata Muda Tk. I	III/b	5	1	6
9	Penata Muda	III/a	2	-	2
10	Pengatur Tk. I	II/d	1	-	1
11	Pengatur	II/c	1	-	1
12	Pengatur Muda Tk. I	II/b	1	-	1
13	Pengatur Muda	II/a	1	-	1
14	Non Pangkat	-	3	5	8

Berdasarkan Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	Doktoral (S-3)	-	-	-
2	Magister (S-2)	5	-	5
3	Sarjana (S-1)	8	3	11
4	Diploma (D-3)	1	-	1
5	SLTA/Sederajat	4	1	5
6	SLTP/Sederajat	-	-	-
7	SD/Sederajat	-	-	-
8	Non Pendidikan	-	-	-

## VII. Pengadilan Negeri Buntok

Berdasarkan Kepangkatan/Golongan

No	Pangkat	Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
			L	P	
1	Pembina Utama	IV/e	-	-	-
2	Pembina Utama Madya	IV/d	-	-	-
3	Pembina Utama Muda	IV/c	-	-	-
4	Pembina Tk. I	IV/b	-	-	-
5	Pembina	IV/a	1	-	1
6	Penata Tk. I	III/d	1	-	1
7	Penata	III/c	3	2	5
8	Penata Muda Tk. I	III/b	2	3	5
9	Penata Muda	III/a	3	1	4
10	Pengatur Tk. I	II/d	-	-	-
11	Pengatur	II/c	1	-	1
12	Pengatur Muda Tk. I	II/b	2	-	2
13	Pengatur Muda	II/a	-	-	-
14	Non Pangkat	-	3	4	7

Berdasarkan Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	Doktoral (S-3)	-	-	-
2	Magister (S-2)	3	1	4
3	Sarjana (S-1)	7	4	11
4	Diploma (D-3)	1	1	2
5	SLTA/Sederajat	2	-	2
6	SLTP/Sederajat	-	-	-
7	SD/Sederajat	-	-	-
8	Non Pendidikan	-	-	-

### VIII. Pengadilan Negeri Tamiang Layang

Berdasarkan Kepangkatan/Golongan

No	Pangkat	Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
			L	P	
1	Pembina Utama	IV/e	-	-	-
2	Pembina Utama Madya	IV/d	-	-	-
3	Pembina Utama Muda	IV/c	-	-	-
4	Pembina Tk. I	IV/b	-	1	1
5	Pembina	IV/a	1	-	1
6	Penata Tk. I	III/d	2	-	2
7	Penata	III/c	2	2	4
8	Penata Muda Tk. I	III/b	5	1	6
9	Penata Muda	III/a	6	1	7
10	Pengatur Tk. I	II/d	1	-	1
11	Pengatur	II/c	1	-	1
12	Pengatur Muda Tk. I	II/b	-	-	-
13	Pengatur Muda	II/a	-	-	-
14	Non Pangkat	-	5	4	9

Berdasarkan Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	Doktoral (S-3)	-	-	-
2	Magister (S-2)	2	1	3
3	Sarjana (S-1)	12	4	16
4	Diploma (D-3)	2	-	2
5	SLTA/Sederajat	6	4	10
6	SLTP/Sederajat	1	-	1
7	SD/Sederajat	-	-	-
8	Non Pendidikan	-	-	-

## IX. Pengadilan Negeri Kasongan

Berdasarkan Kepangkatan/Golongan

No	Pangkat	Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
			L	P	
1	Pembina Utama	IV/e	-	-	-
2	Pembina Utama Madya	IV/d	-	-	-
3	Pembina Utama Muda	IV/c	-	-	-
4	Pembina Tk. I	IV/b	-	1	1
5	Pembina	IV/a	1	-	1
6	Penata Tk. I	III/d	3		3
7	Penata	III/c	5	2	7
8	Penata Muda Tk. I	III/b	2	1	3
9	Penata Muda	III/a	3	2	5
10	Pengatur Tk. I	II/d	-	1	1
11	Pengatur	II/c	1	-	1
12	Pengatur Muda Tk. I	II/b	-	-	-
13	Pengatur Muda	II/a	-	-	-
14	Non Pangkat	-	5	2	7

Berdasarkan Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	Doktoral (S-3)	-	-	-
2	Magister (S-2)	4	2	6
3	Sarjana (S-1)	12	5	17
4	Diploma (D-3)	1	-	1
5	SLTA/Sederajat	3	2	5
6	SLTP/Sederajat	-	-	-
7	SD/Sederajat	-	-	-
8	Non Pendidikan	-	-	-

## X. Pengadilan Negeri Kuala Kurun

Berdasarkan Kepangkatan/Golongan

No	Pangkat	Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
			L	P	
1	Pembina Utama	IV/e	-	-	-
2	Pembina Utama Madya	IV/d	-	-	-
3	Pembina Utama Muda	IV/c	-	-	-
4	Pembina Tk. I	IV/b	-	-	-
5	Pembina	IV/a	1	-	1
6	Penata Tk. I	III/d	2	-	2
7	Penata	III/c	2	1	3
8	Penata Muda Tk. I	III/b	3	1	4
9	Penata Muda	III/a	5	1	6
10	Pengatur Tk. I	II/d	1	-	1
11	Pengatur	II/c	1	-	1
12	Pengatur Muda Tk. I	II/b	-	-	-
13	Pengatur Muda	II/a	-	-	-
14	Non Pangkat	-	6	2	8

Berdasarkan Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	Doktoral (S-3)	-	-	-
2	Magister (S-2)	2	1	3
3	Sarjana (S-1)	13	3	16
4	Diploma (D-3)	2	-	2
5	SLTA/Sederajat	4	1	5
6	SLTP/Sederajat	-	-	-
7	SD/Sederajat	-	-	-
8	Non Pendidikan	-	-	-

## XI. Pengadilan Negeri Nanga Bulik

Berdasarkan Kepangkatan/Golongan

No	Pangkat	Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
			L	P	
1	Pembina Utama	IV/e	-	-	-
2	Pembina Utama Madya	IV/d	-	-	-
3	Pembina Utama Muda	IV/c	-	-	-
4	Pembina Tk. I	IV/b	-	-	-
5	Pembina	IV/a	2	-	2
6	Penata Tk. I	III/d	1	-	1
7	Penata	III/c	3	-	3
8	Penata Muda Tk. I	III/b	2	-	2
9	Penata Muda	III/a	4	4	8
10	Pengatur Tk. I	II/d	-	-	-
11	Pengatur	II/c	2	-	2
12	Pengatur Muda Tk. I	II/b	-	-	-
13	Pengatur Muda	II/a	-	-	-
14	Non Pangkat	-	5	3	8

Berdasarkan Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	Doktoral (S-3)	-	-	-
2	Magister (S-2)	3	-	3
3	Sarjana (S-1)	11	4	15
4	Diploma (D-3)	2	-	2
5	SLTA/Sederajat	3	3	6
6	SLTP/Sederajat	-	-	-
7	SD/Sederajat	-	-	-
8	Non Pendidikan	-	-	-

## XII. Pengadilan Negeri Pulang Pisau

Berdasarkan Kepangkatan/Golongan

No	Pangkat	Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
			L	P	
1	Pembina Utama	IV/e	-	-	-
2	Pembina Utama Madya	IV/d	-	-	-
3	Pembina Utama Muda	IV/c	-	-	-
4	Pembina Tk. I	IV/b	-	-	-
5	Pembina	IV/a	-	2	2
6	Penata Tk. I	III/d	1	1	2
7	Penata	III/c	2	1	3
8	Penata Muda Tk. I	III/b	2	2	4
9	Penata Muda	III/a	2	6	8
10	Pengatur Tk. I	II/d	-	-	-
11	Pengatur	II/c	2	-	2
12	Pengatur Muda Tk. I	II/b	-	-	-
13	Pengatur Muda	II/a	-	-	-
14	Non Pangkat	-	6	2	8

Berdasarkan Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	Doktoral (S-3)	-	-	-
2	Magister (S-2)	2	4	6
3	Sarjana (S-1)	5	7	12
4	Diploma (D-3)	3	-	2
5	SLTA/Sederajat	7	2	9
6	SLTP/Sederajat	-	-	-
7	SD/Sederajat	-	-	-
8	Non Pendidikan	-	-	-

B. Mutasi

- Data Mutasi Masuk Tahun 2021

No	Nama	Jabatan/Satker Lama	Jabatan/Satker Baru
1	Ahmad Gazali, S.H.	Panitera Muda Hukum PN Sampit	PP PT Palangkaraya
2	Tri Andita Juristiawati, S.H., M.Hum.	Hakim PN Jakarta Timur	Hakim Tinggi PT Palangkaraya
3	S.H.D. Sinuraya, S.H., M.H.	Hakim Tinggi PT Maluku Utara	Hakim Tinggi PT Palangkaraya
4	M. Yunan, S.H.	Panitera PN Pulang Pisau	PP PT Palangkaraya
5	Togar, S.H., M.H.	Hakim Tinggi PT Maluku Utara	Hakim Tinggi PT Palangkaraya
6	Udjianti, S.H., M.H.	Hakim PN Surakarta	Hakim Tinggi PT Palangkaraya
7	Ajidinnor, S.H., M.H.	Hakim Tinggi PT Banjarmasin	Hakim Tinggi PT Palangkaraya
8	Didit Susilo Guntono, S.H., M.H.	Hakim PN Tangerang	Hakim Tinggi PT Palangkaraya
9	DR. H. Zainuddin, S.H., M.Hum.	KPT Ambon	KPT Palangkaraya
10	H. Suwidya, S.H., L.L.M.	WKPT Jayapura	WKPT Palangkaraya
11	M. Rusgiansyah, S.Hut., S.H.	Kasubbag. PTIP PN Pulang Pisau	Kasubbag. RPA PT Palangkaraya
12	Totok Sapto Indrato, S.H., M.H.	KPN Mungkid	WKPN Palangkaraya
13	Yudi Eka Putra, S.H., M.H.	Hakim PN Tulung Agung	Hakim PN Palangkaraya
14	Erni Kusumawati, S.H., M.H.	Hakim PN Sukoharjo	Hakim PN Palangkaraya
15	Boxgie Agus Santoso, S.H., M.H	Hakim PN Sukoharjo	Hakim PN Palangkaraya
16	Dony Hardiyanto, S.H., M.Hum.	Hakim PN Pamekasan	Hakim PN Palangkaraya
17	Berly, S.E., S.H.	Panmud Perdata PN Sampit	Panmud Tipikor PN Palangkaraya
18	Jurmani, S.H.	Panmud Perdata PN Pangkalan Bun	Panmud PHI PN Palangkaraya
19	Sopyani Devi, S.H.	Panitera Pengganti PN Sampit	Panitera Pengganti PN Palangkaraya
20	Gustia Ningsih, A.Md., S.H.	Analis Perkara Peradilan PT Palangkaraya	PP PN Sampit
21	Bobby Ertanto, S.H.	PP PN Palangkaraya	Panmud. Pidana PN Sampit
22	Dr. Ardhi Wijayanto, S.H., M.Hum.	KPN Pandeglang	WKPN Sampit
23	Abdul Rasyid, S.H.	Hakim PN Sintang	Hakim PN Sampit
24	Hendra Novryandie, S.H., M.H.	Hakim PN Rantau	Hakim PN Sampit
25	Saiful HS, S.H., M.H.	Hakim PN Maros	Hakim PN Sampit

26	Firdaus Sodiqin, S.H.	Hakim PN Ngabang	Hakim PN Sampit
27	Supriadi, S.H.	Panitera Pengadilan Negeri Buntok	Panitera Pengadilan Negeri Sampit
28	Teguh Budiono, S.H.	PP PN Palangkaraya	Panmud. Perdata PN Sampit
29	I Gusti Bagus Sandhi, S.H.	PP PN Palangkaraya	Panmud. Hukum PN Sampit
30	Febri Purnamavita, S.H., M.H.	KPN Kuningan	WKPN Sampit
31	Ahmad Husaini, S.H.	Hakim PN Bangkalan	Hakim PN Pangkalan Bun
32	Reza Apriadi, S.H.	Hakim/ Pengadilan Negeri Ngawi	Hakim PN Pangkalan Bun
33	Erick Ignatius Christoffel, S.H.	Hakim/ Pengadilan Negeri Amurang	Hakim PN Pangkalan Bun
34	Wahyudi, S.H.	PP PN Sampit	Panmud. Perdata PN Pangkalan Bun
35	I Gede Putu Saptawan, S.H., M.Hum.	Hakim PN Denpasar	WKPN Pangkalan Bun
36	Edi Zarqoni, S.H.	Panmud. Perdata PN Nanga Bulik	Panmud. Pidana PN Pangkalan Bun
37	Diyah Eka Prasetya Rini, S.I.P	Analis SDM Aparatur PN Bojonegoro	Analis SDM Aparatur PN Pangkalan Bun
38	Eulis Nur Komariah, SH.,MH	Hakim PN Sleman	WKPN Kuala Kapuas
39	Pebrina Permata Sari, SH	Hakim PN Siak Sri Indrapura	Hakim PN Kuala Kapuas
40	Zuraidah, SH	Panmud Pidana PN Banjarmasin	Panitera PN Kuala Kapuas
41	Leo Sukarno, S.H.	Wakil Ketua PN Buntok	KPN Muara Teweh
42	M. Aunur Rofiq, S.H., M.H	Hakim PN Lamongan	WKPN Muara Teweh
43	Frans Effendi Manurung, S.H.,M.H.	WKPN Wamena	KPN Buntok
44	Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum	Hakim Non Palu PT Palangkaraya	Hakim PN Buntok
45	Bambang Sukino, SH	Panmud. Perdata PN Palangkaraya	Panitera PN Buntok
46	Martin, S.H.	Kasubbag. Umum dan Keuangan PN Amuntai	Kasubbag. PTIP PN Buntok
47	Maria Faustina Beata, S.H.	Cakim PN Pulang Pisau	Hakim PN Tamiang Layang
48	Eva Meita Theodora Pasaribu, S.H.	WKPN Kotabumi	KPN Tamiang Layang
49	Hendy Pradipta, S.H.	PP PN Kasongan	Panmud. Pidana PN Tamiang Layang
50	Haris Budiarso, S.H., M.Hum	WKPN Melonguane	KPN Kasongan
51	Sri Rejeki Marsinta, S.H., M.Hum.	WKPN Tanjung Redeb	WKPN Kasongan
52	Ega Shaktiana, S.H., M.H.	Hakim PN Sampit	WKPN Kuala Kurun

<b>53</b>	Stephanus Y Arywendho, S.H.	Hakim PN Temanggung	WKPN Nanga Bulik
<b>54</b>	Ucok Richon Manik, S.H.	Panmud. Pidana PN Pangkalan Bun	Panitera PN Nanga Bulik
<b>55</b>	Dian Nur Pratiwi, S.H., M.H.Li	Hakim PN Mungkid	WKPN Pulang Pisau
<b>56</b>	Ruspeliati, S.H.	Panmud Khusus Penyelesaian PHI PN Palangkaraya	Panitera PN Pulang Pisau

- Data Mutasi Keluar Tahun 2021

No	Nama	Jabatan/Satker Lama	Jabatan/Satker Baru
<b>1</b>	Wiwik Dwi Wisnuningdyah, S.H., M.H.	Hakim Tinggi PT Palangkaraya	Hakim Tinggi PT Samarinda
<b>2</b>	Indria Miryani, S.H.	Hakim Tinggi PT Palangkaraya	Hakim Tinggi PT Banjarmasin
<b>3</b>	F.X. Supriyadi, S.H., M.Hum.	Hakim Tinggi PT Palangkaraya	Hakim Tinggi PT Jambi
<b>4</b>	Udjianti, S.H., M.H.	Hakim Tinggi PT Palangkaraya	Hakim Yustisial Bawas MA-RI
<b>5</b>	Mochamad Hatta, S.H., M.H.	KPT Palangkaraya	KPT Denpasar
<b>6</b>	Nani Indrawati, S.H., M.Hum.	WKPT Palangkaraya	WKPT Pontianak
<b>7</b>	Zulkifli, S.H., M.H.	Hakim PN Palangkaraya	Wakil Ketua PN Sungailiat
<b>8</b>	Dian Kurniawati, S.H., M.H.	Hakim PN Palangkaraya	Wakil Ketua PN Barabai
<b>9</b>	Evelyne Napitupulu, S.H., M.H.	Hakim PN Palangkaraya	Wakil Ketua PN Balige
<b>10</b>	Jimmy Ray Ie, S.H.	Hakim PN Palangkaraya	Wakil Ketua PN Trenggalek
<b>11</b>	Ruspeliati, S.H.	Panmud Khusus PHI PN Palangkaraya	Panitera PN Pulang Pisau
<b>12</b>	Bambang Sukino, S.H.	Panmud. Perdata PN Palangkaraya	Panitera PN Buntok
<b>13</b>	Teguh Budiono, S.H.	PP PN Palangkaraya	Panmud. Perdata PN Sampit
<b>14</b>	I Gusti Bagus Sandhi, S.H.	PP PN Palangkaraya	Panmud. Hukum PN Sampit
<b>15</b>	Ida Purwanti, S.H.	Jurusita PN Palangkaraya	Jurusita PN Malang
<b>16</b>	Anung Handono, S.H.	Panmud. Perdata PN Sampit	Panitera PN Tanah Grogot
<b>17</b>	Ahmad Gazali, S.H.	Panmud. Hukum PN Sampit	PP PT Palangkaraya
<b>18</b>	Atrikuasa, S.H.	PP PN Sampit	Panmud. Hukum PN Kasongan
<b>19</b>	Sopyani Devi, S.H.	PP PN Sampit	PP PN Palangkaraya
<b>20</b>	Ega Shaktiana, S.H., M.H.	Hakim PN Sampit	WKPN Kuala Kurun
<b>21</b>	Muslim Setiawan, S.H.	Hakim PN Sampit	WKPN Banjar

22	Akhmad Fijarsyah Joko Sutrisno, S.H., M.H.	Ketua PN Sampit	WKPN Pontianak
23	Phutut Rully Kushardian, S.H., M.H.	Hakim PN Sampit	Hakim PN Ungaran
24	Berly, S.E., S.H.	Panitera Muda Perdata PN Sampit	Panmud. Khusus Tipikor PN Palangkaraya
25	Wahdani, S.H.	Panitera PN Sampit	Panitera PN Jepara
26	Dr. Ardhi Wijayanto, S.H., M.Hum.	WKPN PN Sampit	Pengadilan Negeri Subang
27	Wahyudi, S.H.	Panitera Pengganti PN Sampit	Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Pangkalan Bun
28	Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H.	KPN Pangkalan Bun	KPN Situbondo
29	Muhammad Ikhsan, S.H.	Hakim PN Pangkalan Bun	Hakim PN Tebing Tinggi
30	Iqbal Albanna, S.H., M.H.	Hakim PN Pangkalan Bun	Hakim PN Rembang
31	Jurmani, S.H.	Panmud. Perdata PN Pangkalan Bun	Panmud. PHI PN Palangkaraya
32	Mantiko S. Moechtar, S.H., M.Kn.	Hakim PN Pangkalan Bun	Hakim PN Curup
33	Ucok Richon Manik, S.H.	Panmud. Pidana PN Pangkalan Bun	Panitera PN Nanga Bulik
34	Ruslan Hendra Irawan, S.H., M.H.	KPN Kuala Kapuas	KPN Raba Bima
35	Eulis Nur Komariah, S.H., M.H.	WKPN Kuala Kapuas	Hakim PN Klaten
36	Emna Aulia, SH.,MH	Hakim PN Kuala Kapuas	Hakim PN Martapura
37	Agustinus Herwindu Wicaksono, S.H., M.H.	Hakim PN Kuala Kapuas	Hakim PN Kandangan
38	H. Muhammad Jailani, S.H., M.H.	Panitera PN Kuala Kapuas	Panitera PN Martapura
39	Cipto Hosari Parsaoran Nababan, S.H., M.H	KPN Muara Teweh	KPN Sanggau
40	Fredy Tanada, S.H., M.H	Hakim PN Muara Teweh	Hakim PN Magetan
41	Muhammad Sabil Ryandika, S.H., M.H	Hakim PN Muara Teweh	Hakim PN Amurang
42	Bayu Seno Mahartoyo Sukmo, S.H.,M.H.	KPN Buntok	Hakim PN Bandung
43	Leo Sukarno, S.H.	WKPN Buntok	KPN Muara Teweh
44	John Ricardo, S.H.	Hakim PN Buntok	Hakim PN Purworejo
45	Supriadi, S.H.	Panitera PN Buntok	Panitera PN Sampit
46	Bagus Rahmatillah Prima, S.H.	Kasubbag. PTIP PN Buntok	Kasubbag. Umum dan Keuangan PN Amuntai
47	Helka Rerung, S.H.	Hakim PN Tamiang Layang	Hakim PN Makale
48	Riswan Adiputra, S.H.	Panmud. Pidana PN Tamiang Layang	Panmud. Pidana PN Kasongan

<b>49</b>	Deni Indrayana, S.H., M.H.	KPN Tamiang Layang	Hakim PN Sukoharjo
<b>50</b>	Rudita Setya Hermawan, S.H. M.H.	KPN Kasongan	Hakim PN Bale Bandung
<b>51</b>	Maria Rina Sulistiawati, S.H., M.Hum.	WKPN Kasongan	Hakim PN Cilacap
<b>52</b>	GT. Risna Mariana, S.H.	Hakim PN Kasongan	Hakim PN Martapura
<b>53</b>	Hendy Pradipta, S.H.	PP PN Kasongan	Panmud Pidana PN Tamiang Layang
<b>54</b>	Rudy Ruswoyo, S.H., M.H	KPN Kuala Kurun	KPN Banyumas
<b>55</b>	Tommy Manik, S.H.	KPN Nanga Bulik	Hakim PN Pekanbaru
<b>56</b>	Edi Zarqoni, S.H.	Panmud. Perdata PN Nanga Bulik	Panmud. Pidana PN Pangkalan Bun
<b>57</b>	Agung Nugroho, S.H.	KPN Pulang Pisau	WKPN Kawarang
<b>58</b>	M. Yunan, S.H.	Panitera PN Pulang Pisau	PP PT Palangkaraya
<b>59</b>	Rusgiansyah, S.Hut., S.H.	Kasubbag. Umum dan Keuangan PN Pulang Pisau	Kasubbag. Rencana Program dan Anggaran PT Palangkaraya

### C. Promosi

No	Nama	Jabatan Lama	Jabatan Baru
<b>1</b>	Isti Yani, S.Si.	Kasubbag. Rencana Program dan Anggaran PT Palangkaraya	Kepala Bagian Umum dan Keuangan PT Palangkaraya
<b>2</b>	Tiomina Simanjuntak, S.H.	Panitera Muda Pidana PN Palangkaraya	Panitera Muda Perdata PN Palangkaraya
<b>3</b>	Rabiatal Adawiyah, S.H.	Panitera Muda Khusus Tipikor PN Palangkaraya	Panitera Muda Pidana PN Palangkaraya
<b>4</b>	Salundik, S.H.	Analis Perkara Peradilan PN Palangkaraya	Jurusita Pengganti PN Palangkaraya
<b>5</b>	Muhammad Ramdes, S.H.	WKPN Pangkalan Bun	KPN Pangkalan Bun
<b>6</b>	Haga Sentosa Lase, S.H., M.H.	WKPN Kuala Kapuas	KPN Kuala Kapuas
<b>7</b>	Amran Halim Zunaedi Pasaribu, S.H., M.H	Panmud. Perdata PN Muara Teweh	Panmud. Pidana PN Muara Teweh
<b>8</b>	Hendra Sabar Parulian Siregar, S.H	Panmud. Pidana PN Muara Teweh	Panmud. Perdata PN Muara Teweh
<b>9</b>	Kuncoro Tatwo Pratisto, S.H.	Panmud. Hukum PN Kuala Kurun	Panmud. Pidana PN Kuala Kurun
<b>10</b>	Didid Suhartono, S.H.	PP PN Kuala Kurun	Panmud. Hukum PN Kuala Kurun
<b>11</b>	Wisnu Kristiyanto, S.H., M.H.	WKPN Nanga Bulik	KPN Nanga Bulik

D. Pensiun dan Pemberhentian

No	Nama	Jabatan	TMT	Keterangan
1	Patmawaty, S.H.	Panitera Pengganti PN Pangkalan Bun	1 Mei 2021	Meninggal Dunia
2	Bobby Rahman	Pengadministrasi Registrasi Perkara PN Muara Teweh	5 Mei 2021	Meninggal Dunia
3	Muryani, S.H	Panitera PN Muara Teweh	4 November 2021	Meninggal Dunia
4	Lamsiah Noor, S.H.	Sekretaris PN Tamiang Layang	1 September 2021	Batas Usia Pensiun Normal
5	Mario Reymond Pandey Silalahi, S.H.	Hakim PN Kuala Kurun	18 Juli 2021	Meninggal Dunia
6	Irwansyah Jayaputra, S.H.	Panitera PN Nanga Bulik	28 Juli 2021	Meninggal Dunia

D. Pendidikan dan Pelatihan

No	Nama	Jabatan	Diklat yang Diikuti
1.	Fitriya Nor Aini, S.E.	Kasubbag. Kepegawaian dan TI PT Palangkaraya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelatihan Kepemimpinan Pengawas</li> <li>- Pelatihan <i>English Effective Presentation</i></li> <li>- Bimtek Penyusunan RPA</li> <li>- Bimtek Pengelolaan Kepegawaian</li> </ul>
2.	Monalisa Agustina Toewak, S.E.	Kasubbag. Keuangan dan Pelaporan PT Palangkaraya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelatihan Kepemimpinan Pengawas</li> <li>- Pelatihan E-Learning Peyegaran PPSPM</li> <li>- Bimtek Penyusunan RPA</li> <li>- Bimtek Pengelolaan Kepegawaian</li> </ul>
3.	Wahyu Teguh, S.E., S.H.	Kasubbag. Tata Usaha dan Rumah Tangga PT Palangkaraya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelatihan Kepemimpinan Pengawas</li> <li>- Pelatihan Manajemen Aset</li> <li>- Bimtek Penyusunan RPA</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bimtek Pengelolaan Kepegawaian</li> </ul>
4.	Isti Yani, S.Si.	Kepala Bagian Umum dan Keuangan PT Palangkaraya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelatihan Efektivitas Pribadi</li> <li>- Webinar <i>Design Thinking</i> untuk Inovasi Peradilan</li> <li>- Pelatihan <i>Public Speaking and Effective Communication Skill</i></li> <li>- Pelatihan Kepemimpinan Administrator</li> <li>- Pelatihan Manajemen Aset</li> <li>- Pelatihan E-Learning Penyegaran PPK</li> <li>- Bimtek Penyusunan RPA</li> <li>- Bimtek Pengelolaan Kepegawaian</li> </ul>
5.	Tri Andita Juristiawati, S.H., M.Hum.	Hakim Tinggi PT Palangkaraya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelatihan Penanganan TPPU Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan</li> <li>- Pelatihan Sertifikasi Asesor</li> </ul>
6.	Didit Susilo Guntono, S.H., M.H.	Hakim Tinggi PT Palangkaraya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelatihan Teknis Yudisial Hakim Berkelanjutan Pengadilan Tingkat Banding</li> <li>- Pelatihan Sertifikasi Asesor</li> </ul>
7.	Akri Yuliani, S.H.	Panitera Pengganti PT Palangkaraya	Pelatihan Teknis Yudisial PP Pengadilan Tingkat Banding
8.	Yuhana Sari Yasmini, S.H.	Panitera Pengganti PT Palangkaraya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelatihan Teknis Yudisial PP Pengadilan Tingkat Banding</li> <li>- Bimtek Kepaniteraan</li> </ul>
9.	John Morton Abdurrahman, S.H.	Panitera Muda Khusus Tipikor PT Palangkaraya	Bimtek Kepaniteraan
10.	Masni, S.H.	Panitera Muda Perdata PT	Bimtek Kepaniteraan

		Palangkaraya	
11.	Harly Marlyn Simanjuntak, S.H.	Panitera Muda Hukum PT Palangkaraya	Bimtek Kepaniteraan
12.	I Wayan Wasta, S.H.	Panitera Muda Pidana PT Palangkaraya	Bimtek Kepaniteraan
13.	Evi Ernawati, S.H., M.H.	Panitera Pengganti PT Palangkaraya	Bimtek Kepaniteraan
14.	M. Yunan, S.H.	Panitera Pengganti PT Palangkaraya	Bimtek Kepaniteraan
15.	Ahmad Gazali, S.H.	Panitera Pengganti PT Palangkaraya	Bimtek Kepaniteraan
16.	Yudi Yusliannoor, S.H.	Analis Perkara Peradilan PT Palangkaraya	Bimtek Kepaniteraan
17.	Gatut Sulistyo, S.H., M.H.	Hakim Ad Hoc Tipikor PT Palangkaraya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelatihan Teknik Menyusun Resume Putusan Pengadilan</li> <li>- Pelatihan Sertifikasi Asesor</li> </ul>
18.	Mikhael Jan Tonggo Tua Sihombing, A.Md.	CPNS/Pengadministrasi Registrasi Perkara PT Palangkaraya	<p>Pelatihan Membangun Pola Pikir Berkelanjutan dan Kecepatan Pembelajaran</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelatihan Penyusunan Laporan Kinerja</li> <li>- Webinar <i>Design Thinking</i> untuk Inovasi Peradilan</li> <li>- Bimtek Penyusunan RPA</li> <li>- Bimtek Pengelolaan Kepegawaian</li> <li>- Seminar Memimpin Tim Virtual</li> </ul>
19.	Apridius, S.E., M.Si.	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran PT Palangkaraya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelatihan Manajemen ASN</li> <li>- Pelatihan Efektivitas Pribadi</li> <li>- Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Teknis MASN</li> <li>- Pelatihan Sertifikasi Asesor</li> <li>- Pelatihan <i>Public Speaking and Effective Communication Skill</i></li> <li>- Pelatihan Basic</li> </ul>
20.	DR. Andreas Eno Tirtakusuma, S.H., M.H.	Hakim Ad Hoc Tipikor PT Palangkaraya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelatihan Manajemen ASN</li> <li>- Pelatihan Efektivitas Pribadi</li> <li>- Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Teknis MASN</li> <li>- Pelatihan Sertifikasi Asesor</li> <li>- Pelatihan <i>Public Speaking and Effective Communication Skill</i></li> <li>- Pelatihan Basic</li> </ul>

			<i>English Effective Communication Skill for Court Officials</i>
21.	Meidyawati, S.E.	Sekretaris PT Palangkaraya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelatihan Jaringan Media dan Kehumasan di Pengadilan</li> <li>- Pelatihan Kompetensi Kehumasan Pengadilan</li> <li>- Webinar Mengelola Stress di Lembaga Peradilan</li> <li>- Bimtek Penyusunan RPA</li> <li>- Bimtek Pengelolaan Kepegawaian</li> </ul>
22.	Faisal Sru Bramantyo, S.E.	Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian PT Palangkaraya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bimtek Penyusunan RPA</li> <li>- Bimtek Pengelolaan Kepegawaian</li> </ul>
23.	Djoko Indiarto, S.H., M.H.	Hakim Tinggi PT Palangkaraya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelatihan Ilmu Jurnalistik</li> <li>- Pelatihan Sertifikasi Asesor</li> </ul>
24.	Joni Petrus, S.H.	Analis Protokol PT Palangkaraya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelatihan <i>Basic Motion Graphic with Adobe After Effect</i></li> <li>- Webinar Membangun Kerjasama Tim Peradilan</li> <li>- Bimtek Penyusunan RPA</li> <li>- Bimtek Pengelolaan Kepegawaian</li> </ul>
25.	Roberto Asintongan P., A.Md.	Pengelola Sistem dan Jaringan PT Palangkaraya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelatihan <i>Basic Motion Graphic with Adobe After Effect</i></li> <li>- Bimtek Penyusunan RPA</li> <li>- Bimtek Pengelolaan Kepegawaian</li> </ul>
26.	Suko Priyowidodo, S.H.	Hakim Tinggi PT Palangkaraya	Pelatihan Sertifikasi Asesor
27.	Maurid Sinaga, S.H., M.Hum.	Hakim Tinggi PT	Pelatihan Sertifikasi

		Palangkaraya	Asesor
28.	Ajidinnor, S.H., M.H.	Hakim Tinggi PT Palangkaraya	Pelatihan Sertifikasi Asesor
29.	Dwi Prapti Maryudiat, S.H.	Hakim Tinggi PT Palangkaraya	Pelatihan Sertifikasi Asesor
30.	Heru Prakosa, S.H., M.H.	Hakim Tinggi PT Palangkaraya	Pelatihan Sertifikasi Asesor
31.	Wahyu Prasetyo Wibowo, S.H., M.H.	Hakim Tinggi PT Palangkaraya	Pelatihan Sertifikasi Asesor
32.	Richard Silalahi, S.H.	Hakim Tinggi PT Palangkaraya	Pelatihan Sertifikasi Asesor
33.	Nawaji, S.H.	Hakim Tinggi PT Palangkaraya	Pelatihan Sertifikasi Asesor
34.	Mohammad Noor, S.H., M.H.	Hakim Tinggi PT Palangkaraya	Pelatihan Sertifikasi Asesor
35.	Abdul Ra'uf, S.H., M.H.	Hakim Tinggi PT Palangkaraya	Pelatihan Sertifikasi Asesor
36.	Siti Djamzana, S.H., M.H.	Hakim Tinggi PT Palangkaraya	Pelatihan Sertifikasi Asesor
37.	Anne Rusiana, S.H., M.Hum.	Hakim Tinggi PT Palangkaraya	Pelatihan Sertifikasi Asesor
38.	H. Irwan Effendi, S.H., M.H.	Hakim Tinggi PT Palangkaraya	Pelatihan Sertifikasi Asesor
39.	Siti Rochmah, S.H.	Hakim Tinggi PT Palangkaraya	Pelatihan Sertifikasi Asesor
40.	Desbenneri Sinaga, S.H., M.H.	Hakim Tinggi PT Palangkaraya	Pelatihan Sertifikasi Asesor
41.	Julius Siberium Timbung, S.E.	Analisis Kepgawaiian Ahli Pertama PT Palangkaraya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bimtek Penyusunan RPA</li> <li>- Bimtek Pengelolaan Kepgawaiian</li> </ul>
42.	Abdul Yusuf, S.Sos.	Analisis Kepgawaiian Ahli Pertama PT Palangkaraya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bimtek Penyusunan RPA</li> <li>- Bimtek Pengelolaan Kepgawaiian</li> </ul>
43.	Bangga Chrysto Tarigan, A.Md.	Pengelola Sistem dan Jaringan PT Palangkaraya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bimtek Penyusunan RPA</li> <li>- Bimtek Pengelolaan Kepgawaiian</li> </ul>
44.	Julianto, S.H.	Penyusun Laporan Keuangan PT Palangkaraya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bimtek Penyusunan RPA</li> <li>- Bimtek Pengelolaan Kepgawaiian</li> </ul>
45.	Junaldi Singarimbun, S.E., S.H.	Bendahara Pengeluaran PT Palangkaraya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bimtek Penyusunan RPA</li> <li>- Bimtek Pengelolaan Kepgawaiian</li> </ul>
46.	Susilawati, S.H.	Bendahara Penerimaan PT Palangkaraya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bimtek Penyusunan RPA</li> <li>- Bimtek</li> </ul>

			Pengelolaan Kepegawaian
47.	Uner	Pengadministrasi Persuratan PT Palangkaraya	- Bimtek Penyusunan RPA - Bimtek Pengelolaan Kepegawaian
48.	I Gusti Bagus Sandhi, S.H	Panitera Pengganti PN Palangkaraya	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas
49.	Teguh Budiono, S.H	Panitera Pengganti PN Palangkaraya	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas
50.	Sopyani Devi, S.H.	Panitera Pengganti PN Palangkaraya	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas
51.	Marliyani, S.E	Kasubbag. Perencanaan, TI dan Pelaporan PN Palangkaraya	- Pelatihan <i>Online Basic User Interface Design</i> - Pelaksanaan <i>End User training (EUT)</i> Sakti Full Module Satker Non Piloting - Bimtek Penyusunan RPA
52.	Mandes, S.Kom	Analis SDM Aparatur PN Palangkaraya	Pelatihan <i>Online English Effective Presentation</i>
53.	Boxgie Agus Santoso, S.H., M.H	Hakim PN Palangkaraya	Pelatihan Terpadu SPPA
54.	Irfanul Hakim, S.H., M.H	Hakim PN Palangkaraya	Pelatihan Sertifikasi Niaga Kepailitan dan PKPU
55.	Dony Hardiyanto, S.H., M.Hum.	Hakim PN Palangkaraya	Pelatihan Sertifikasi Hakim Lingkungan
56.	Irfanul Hakim, S.H.	Hakim PN Palangkaraya	Pelatihan Sertifikasi Niaga Bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI)
57.	Ika Murtianingsih, S.H	Jurusita Pengganti PN Palangkaraya	Pelatihan Teknis Yudisial Jurusita/Jurusita Pengganti
58.	Ainun Zaryah, S.E	Bendahara Penerima PN Palangkaraya	- Kegiatan E Learning Bendahara Penerima - Penyelengaraan Microlearning Program Pendidikan Berkelanjutan Bendahara - Pelaksanaan End User training

			(EUT) Sakti Full Module Satker Non Piloting
59.	Amelia Sofia Nurlita, S.H	CPNS/Analisis Perkara Peradilan PN Palangkaraya	Sosialisasi Manajemen Kepegawaian Dasar bagi CPNS
60.	Nanda Mario Fernandos, A., Md	CPNS/Pengadministrasi Registrasi Perkara PN Palangkaraya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sosialisasi Manajemen Kepegawaian Dasar bagi CPNS</li> <li>- Sosialisasi tentang Pengawasan, perlindungan dan pencegahan Bidang Kekayaan Intelektual</li> </ul>
61.	Siti Nor Asiah, S.H., M.H.	Bendahara Pengeluaran PN Palangkaraya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyelengaraan Microlerning Program Pendidikan Berkelanjutan Bendahara</li> <li>- Pelaksanaan End User training (EUT) Sakti Full Module Satken Non Piloting</li> </ul>
62.	Hj. Sri Widarti, S., Sos., S.H	Sekretaris PN Palangkaraya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan Edukasi/Himbauan tentang Pencegahan Pelanggaran HAKI</li> <li>- Bimtek Penyusunan RPA</li> <li>- Bimtek Pengelolaan Kepegawaian</li> </ul>
63.	Efraim, S.H	Panitera Muda Hukum PN Palangkaraya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sosialisasi tentang Pengawasan, perlindungan dan pencegahan Bidang Kekayaan Intelektual</li> <li>- Bimtek Kepaniteraan</li> </ul>
64.	Nova Iraini, S.E., Msi	Kasubbag. Umum dan Keuangan PN Palangkaraya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undangan Edukasi dan Sosialisasi Sukuk Negara Ritel Seri Srois</li> <li>- Pelaksanaan End User training (EUT) Sakti Full Module Satken</li> </ul>

			Non Piloting
65.	Harif Jauhari, S.H., M.H	Panitera PN Palangkaraya	Bimtek Kepaniteraan
66.	Linda, S.H	Panitera Pengganti PN Palangkaraya	Bimtek Kepaniteraan
67.	Tiomina Simanjuntak, S.H	Panitera Muda Perdata PN Palangkaraya	Bimtek Kepaniteraan
68.	Russianna, S.H.	Kasubbag. Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana PN Palangkaraya	Bimtek Pengelolaan Kepegawaian
69.	Laila Hayati, A.Md.	Pengelola Sistem Informasi Kepegawaian PN Palangkaraya	Bimtek Pengelolaan Kepegawaian
70.	Hendra Novryandie, S.H., M.H.	Hakim PN Sampit	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup</li> <li>- Pelatihan Teknis Yudisial Tindak Pidana Penodaan/ Penistaan Agama <i>(Blasphemy)</i></li> </ul>
71.	Firdaus Sodiqin, S.H.	Hakim PN Sampit	Pelatihan Online Argumentasi Gagasan Pengadilan di Media Massa
72.	I Gusti Bagus Sandhi, S.H.	Panitera Muda Hukum PN Sampit	<i>Training on Trainers</i> (TOT) Reguler bagi Hakim dan Panitera
73.	Bobby Ertanto, S.H.	Panitera Muda Pidana PN Sampit	Pelatihan Teknis Yudisial Panitera Pengganti
74.	Dimas Amoroso Aning Wijanarko, S.Kom.	Kasubbag. Umum dan Keuangan PN Sampit	Pelatihan <i>E-Learning</i> PPK
75.	Mario Tyson Nadapdap, S.E.	Analisis SDM Aparatur PN Sampit	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelatihan Penyusunan Laporan Kinerja</li> <li>- Bimtek Pengelolaan Kepegawaian</li> </ul>
76.	Anis Aprilia, S.E.I.	CPNS/Analisis Perkara Peradilan PN Sampit	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelatihan Dasar CPNS</li> <li>- Pelatihan <i>English Effective Presentation</i></li> </ul>
77.	Indra Lasmono, A.Md.	Pengelola Sistem dan Jaringan PN Sampit	Pelatihan Manajemen Aset
78.	Mohammad Noor, S.Kom.	Sekretaris PN Sampit	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bimtek Penyusunan RPA</li> <li>- Bimtek Pengelolaan Kepegawaian</li> </ul>

79.	Mewikristya, S.Kom.	Kasubbag. Perencanaan, TI dan Pelaporan PN Sampit	Bimtek Penyusunan RPA
80.	Deni Nurmansyah, S.E.	Kasubbag. Umum dan Keuangan PN Pangkalan Bun	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas
81.	Chanro Simamora, S.H.	Kasubbag Kepegawaian Organisasi dan Tatalaksana PN Pangkalan Bun	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelatihan Kepemimpinan Pengawas</li> <li>- Bimtek Pengelolaan Kepegawaian</li> </ul>
82.	Ahmad Husaini, S.H.	Hakim PN Pangkalan Bun	Pelatihan Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup
83.	Husni Thamrin, ST.	Sekretaris PN Pangkalan Bun	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Teknis Manajemen ASN</li> <li>- Bimtek Penyusunan RPA</li> <li>- Bimtek Pengelolaan Kepegawaian</li> </ul>
84.	Sulistyawati	Bendahara Penerimaan PN Pangkalan Bun	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelatihan e-Learning Penyusunan Laporan Kinerja</li> <li>- e-Learning Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu</li> </ul>
85.	Didik Sulaiman, S.H.	Bendahara Pengeluaran PN Pangkalan Bun	Pelatihan e-Learning Bendahara Penerimaan
86.	Mulia Rizky, S.E.	Analis SDM Aparatur PN Pangkalan Bun	e-Learning Bendahara Pengeluaran (BPP)
87.	Reza Apriadi, S.H.	Hakim PN Pangkalan Bun	Pelatihan Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup
88.	Erick Ignatius Christoffel, S.H.	Hakim PN Pangkalan Bun	Pelatihan Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup
89.	Yogi Nugraha Putra, A.Md.T	Pengelola Sistem dan Jaringan PN Pangkalan Bun	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelatihan e-Learning Bendahara Penerimaan</li> <li>- Bimtek Penyusunan RPA</li> </ul>
90.	Ucok Richon Manik, S.H.	Panitera Muda Pidana PN Pangkalan Bun	Bimtek Kepaniteraan

91.	Yohanis, S.H.	Panitera PN Pangkalan Bun	Bimtek Kepaniteraan
92.	Wahyudi, S.H.	Panitera Muda Perdata PN Pangkalan Bun	Bimtek Kepaniteraan
93.	Hariyanto	Panitera Muda Hukum PN Pangkalan Bun	Bimtek Kepaniteraan
94.	Emna Aulia, S.H., M.H.	Hakim PN Kuala Kapuas	Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup
95.	Eulis Nur Komariah, S.H., M.H.	Hakim PN Kuala Kapuas	Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup
96.	Jandelsem Andrevo Khairum, S.Kom.	Kasubbag. Perencanaan, TI dan Pelaporan PN Kuala Kapuas	- E-Learning PPK - Pelatihan Pengawasan Kepemimpinan - Pelatihan PPK - Bimtek. Penyusunan RPA
97.	Khadijah Nur Arafah, S.H.	CPNS/Analisis Perkara Peradilan PN Kuala Kapuas	- Pelatihan Dasar CPNS - Pelatihan <i>English Effective Presentation</i>
98.	Ilham Salim Tampubolon, A.Md	CPNS/Pengadministrasi Registrasi Perkara PN Kuala Kapuas	Pelatihan Dasar CPNS
99.	Akhmad Rusadi, SH	Panitera Muda Perdata PN Kuala Kapuas	- Pelatihan Pengawasan Kepemimpinan - Pelatihan Online Manajemen Laporan Kinerja - Bimtek Kepaniteraan
100.	Pebrina Permata Sari, S.H.	Hakim PN Kuala Kapuas	Pelatihan Teknis Yudisial Hakim Berkelanjutan (CJE)
101.	Zuraidah, S.H.	Panitera PN Kuala Kapuas	Bimtek Kepaniteraan
102.	Rahmadi, S.H.	Panitera Muda Pidana PN Kuala Kapuas	Bimtek Kepaniteraan
103.	Kiki Hidayanti, S.H.	Panitera Pengganti PN Kuala Kapuas	Bimtek Kepaniteraan
104.	Fernandos Pasaribu, S.H.	Kasubbag. Umum dan Keuangan PN Kuala Kapuas	- Pelatihan Pengawasan Kepemimpinan - E-Learning PPSPM
105.	Tilai, S.H.	Sekretaris PN Kuala Kapuas	- Bimtek Pengelolaan Kepegawaian - Bimtek Penyusunan RPA
106.	Mardiana	Kasubbag. Kepegawaian, Organisasi dan Tata	Bimtek Pengelolaan Kepegawaian

		Laksana PN Kuala Kapuas	
107.	Jandelsem Andrevo Khairum, S.Kom.	Kasubbag. Perencanaan, TI dan Pelaporan PN Kuala Kapuas	Bimtek Penyusunan RPA
108.	Citra Sri Lestari, S. Kom	Kasubbag. Perencanaan, TI dan Pelaporan PN Muara Teweh	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelatihan Kepemimpinan Pengawas</li> <li>- Pelatihan Online English Effective Presentation</li> <li>- Pelatihan E-Learning PPK</li> </ul>
109.	Muhammad Sabil Ryandika, S.H	Hakim PN Muara Teweh	Pelatihan Online Preparation For The Toefl
110.	Mohammad Pandi Alam, S.H.	Hakim PN Muara Teweh	Pelatihan Online Efektivitas Pribadi
111.	Amran Halim Zunaedi Pasaribu, S.H., M.H.	Panitera Muda Perdata PN Muara Teweh	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas
112.	Yulie Christie Dewi Uda, S.Kom	Sekretaris PN Muara Teweh	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelatihan Online Public Speaking And Effective Communication Skill</li> <li>- Bimtek Penyusunan RPA</li> <li>- Bimtek Pengelolaan Kepegawaian</li> </ul>
113.	Arif Ferdian Junaedi, S.H	CPNS/Analisis Perkara Peradilan PN Muara Teweh	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendidikan Dasar CPNS</li> <li>- Pelatihan Online English Effective Presentation</li> </ul>
114.	Leo Sukarno, S.H	Ketua PN Muara Teweh	Pelatihan Online Mentoring bagi Mentor Peserta PKP
115.	Teguh Indrasto, S.H	Hakim PN Muara Teweh	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelatihan Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup.</li> <li>- Pelatihan Sertifikasi Hakim Pengadilan Hubungan Industrial</li> </ul>
116.	Maryanti Aritonang, S.E	Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana PN Muara Teweh	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelatihan E-Learning PPK</li> <li>- Bimtek Pengelolaan Kepegawaian</li> </ul>
117.	Alqoerlah Reza Fahlevi, A.Md	CPNS/Pengadministrasi Registrasi Perkara	Pelatihan Dasar CPNS

		PN Muara Teweh	
118.	Richard Rinaldy Sampiterson Petrus, S.H	Panitera Pengganti PN Muara Teweh	Pelatihan Teknis Yudisial Panitera/Panitera Pengganti
119.	Ricky Rahman, S.H	Panitera Muda Hukum PN Muara Teweh	Pelatihan Teknis Yudisial Panitera Pengganti
120.	Anita Selvia, S.E.	Sekretaris PN Buntok	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bimtek Pengelolaan Kepegawaian</li> <li>- Bimtek Penyusunan RPA</li> </ul>
121.	Bagus Rahmatillah Prima, S.H.	Kasubbag. Perencanaan, TI dan Pelaporan PN Buntok	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effective Presentation</li> <li>- Practical Problem Solving</li> <li>- E-Learning Penyegaran PPK Angkatan II</li> <li>- Bimtek Penyusunan RPA</li> </ul>
122.	Oktavia Mega Rani, S.H., M.H.	Hakim PN Buntok	Pelatihan Abstraksi Putusan
123.	Anjar Koholifano Mukti, S.H., M.H.	Hakim PN Buntok	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelatihan Abstraksi Putusan</li> <li>- Pelatihan Hakim Berkelanjutan</li> </ul>
124.	Sripah Nadiawati, S.H.	Panitera Muda Perdata PN Buntok	Pelatihan Teknis Yudisial Panitera Pengganti
125.	Bambang Sukino, SH	Panitera PN Buntok	Bimtek Kepaniteraan
126.	Fridho Tumon, SH	Panitera Muda Pidana PN Buntok	Bimtek Kepaniteraan
127.	Shifa Natasa, SH	Panitera Muda Hukum PN Buntok	Bimtek Kepaniteraan
128.	Firdaus Amin, S.E.	Analisis SDM Aparatur PN Buntok	Bimtek Pengelolaan Kepegawaian
129.	Kian Teguh, S.H.	CPNS/Analisis Perkara Peradilan PN Buntok	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelatihan Dasar CPNS</li> <li>- Pelatihan Online English Effective Presentation</li> </ul>
130.	Arnold Jhon Hanry Sinaga, A.Md	CPNS/Pengadministrasi Registrasi Perkara PN Buntok	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelatihan Dasar Calon PNS Gol. II</li> <li>- Pelatihan Online English Effective Presentation</li> </ul>
131.	Aulia Rachmi, S.H., M.H.	Panitera Pengganti PN Tamiang Layang	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas
132.	Citra Adi Asmara, S.E.	Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelatihan Online Basic Modeling 3D Max Kelas 01</li> </ul>

		Laksana PN Tamiang Layang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- s.d 02</li> <li>- Pelatihan Online <i>Basic User Experience Design</i> Kelas 08</li> <li>- Pelatihan Online <i>Basic User Interface Design</i> Kelas 09 s.d 10</li> <li>- Bimtek Penyusunan RPA</li> <li>- Bimtek Pengelolaan Kepegawaian</li> </ul>
133.	Widiya Ayu Rekti, S.H.	Kasubbag. Perencanaan, TI dan Pelaporan PN Tamiang Layang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelatihan Online Manajemen Laporan Kinerja</li> <li>- Bimtek Penyusunan RPA</li> </ul>
134.	Zabal Akbar, S.H.	Jurusita Pengganti PN Tamiang Layang	Diklat Teknis Fungsional Jurusita/Jurusita Pengganti Peradilan Umum
135.	Kharisma Laras Sulu, S.H.	Hakim PN Tamiang Layang	Pelatihan Teknis Yustisial Hakim Berkelanjutan 1
136.	Haris Budiarso, S.H., M.Hum	Ketua PN Kasongan	Pelatihan bagi Mentoring Peserta PKP
137.	Sri Rejeki Marsinta, S.H., M.Hum.	Wakil Ketua PN Kasongan	Pelatihan Perma 3 dan Perma 5
138.	Qurratul Aini Fikasari, S.H., M.Hum.	Hakim PN Kasongan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelatihan Basic English Communication Skill For Court Official</li> <li>- Pelatihan Perma 3 dan Perma 5</li> </ul>
139.	Afrian Faryandi, S.H.	Hakim PN Kasongan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelatihan Perma 3 dan Perma 5</li> <li>- Pelatihan Basic English Communication Skill For Court Official</li> <li>- Pelatihan Basic Motion Graphic With Adobe After Effect</li> </ul>
140.	Cesar Antonio Munthe, S.H., M.H.	Hakim PN Kasongan	Pelatihan Efektivitas Pribadi
141.	Patar Panjaitan, S.H.	Hakim PN Kasongan	Pelatihan Inhouse Argumentasi
142.	Jumadi, S.H.	Sekretaris PN	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelatihan PIPK</li> </ul>

		Kasongan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bimtek Penyusunan RPA</li> <li>- Bimtek Pengelolaan Kepegawaian</li> </ul>
143.	Leon, S.H.	Panitera PN Kasongan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelatihan Kepemimpinan Pengawas</li> </ul>
144.	Masrianor, S.H.	Panmud Perdata PN Kasongan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelatihan Kepemimpinan Pengawas</li> </ul>
145.	Mada Kristianto, S.H.	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala PN Kasongan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelatihan Kepemimpinan Pengawas</li> <li>- Pelatihan E-Learning Penyegaran PPK</li> <li>- Pelatihan Penyusunan Laporan Kinerja</li> <li>- Pelatihan English For Presentation</li> <li>- Bimtek Pengelolaan Kepegawaian</li> </ul>
146.	Septa Sujiati Eka Setia, S.E.	Kasubbag Umum dan Keuangan PN Kasongan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelatihan Kepemimpinan Pengawas</li> <li>- Pelatihan E-Learning Penyegaran PPSPM</li> <li>- Pelatihan Penyusunan Laporan Kinerja</li> <li>- Pelatihan Manajemen Aset</li> <li>- Pelatihan English For Presentation</li> </ul>
147.	Juli Hasianna Napitu, S.H.	Kasubbag PTIP PN Kasongan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bimtek Penyusunan RPA</li> <li>- Pelatihan Manajemen Aset</li> </ul>
148.	Siti Martinah	Bendahara Pengeluaran PN Kasongan	Diklat E-Learning Penyegaran Bendahara
149.	Faros Ashdaq, A.Md., S.H.	Jurusita Pengganti PN Kasongan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelatihan Mengelola Tim Virtual</li> <li>- Pelatihan Mengelola Streets di Pengadilan</li> </ul>
150.	Toto Isnadi, A.Md.	CPNS/Pengadministrasi Register Perkara PN Kasongan	Pendidikan Dasar CPNS

151.	Ricky Darmawan, S.H., M.H.	JSP PN Kasongan	Pelatihan E-Learning Penyegaran PPK
152.	Muhamad Fadli, S.H.	Panitera Pengganti PN Kasongan	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas
153.	Rudy Ruswoyo, S.H., M.H.	Ketua PN Kuala Kurun	Pelatihan Terpadu SPPA
154.	Ega Shaktiana, S.H., M.H.	Wakil Ketua PN Kuala Kurun	Pelatihan Terpadu SPPA
155.	Syahrudin, S.H.	Panitera PN Kuala Kurun	Bimtek Kepaniteraan
156.	Exman Vryanto, S.E.	Sekretaris PN Kuala Kurun	- Bimtek Pengelolaan Kepegawaian - Bimtek Penyusunan RPA
157.	Friady, S.H.	Panitera Muda Perdata PN Kuala Kurun	Bimtek Kepaniteraan
158.	Didid Suhartono, S.H.	Panitera Muda Hukum PN Kuala Kurun	Bimtek Kepaniteraan
159.	Achmad Syahruji, A.Md.	Kasubbag. Perencanaan, TI dan Pelaporan PN Kuala Kurun	Bimtek Penyusunan RPA
160.	Tubagus Ramdan, S.E.	Analisis SDM Aparatur PN Kuala Kurun	- Bimtek Pengelolaan Kepegawaian - Pelatihan E- Learning Penyegaran PPK - Pelatihan E- Learning Penyegaran Bendahara
161.	Abi Kusuma Friestiwani Ahmad, S.H.	Analisis Perkara Peradilan PN Kuala Kurun	Pelatihan E-Learning Penyegaran Bendahara
162.	Rahmat Salim Rumnie, S.E.	CPNS/ Verifikator Keuangan PN Kuala Kurun	Pendidikan Dasar CPNS
163.	Devi Tri Mulyani, S.H.	CPNS/Analisis Perkara Peradilan PN Kuala Kurun	Pendidikan Dasar CPNS
164.	Yuldian Pratama, A.Md.	CPNS/Pengadmninist rasi Registrasi Perkara PN Kuala Kurun	Pendidikan Dasar CPNS
165.	Topan Brian	PPNPN PN Kuala Kurun	Bimtek Pengelolaan Kepegawaian
166.	Wardanakusuma, S.H.	Panitera Muda Pidana PN Nanga Bulik	- Pelatihan Kepegawaian Pengawasan - Bimtek

			Kepaniteraan
167.	Wisnu Kristiyanto, S.H., M.H.	Ketua PN Nanga Bulik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelatihan Terpadu SPPA</li> <li>- Pelatihan Penerapan Prinsip dan Kerangka Hak Asasi Manusia</li> </ul>
168.	Periyaldi, A.Md	Pengelola Sistem dan Jaringan PN Nanga Bulik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelatihan Dasar CPNS</li> <li>- Bimtek Pengelolaan Kepegawaian</li> </ul>
169.	T.Firdaus, A.Md	Pengadministrasi Register Perkara PN Nanga Bulik	Pelatihan Online Literasi Digital di Pengadilan bagi CPNS
170.	Tony Arifuddin Sirait, S.H.	Hakim PN Nanga Bulik	Pelatihan Teknik Menyusun Resume Putusan Pengadilan
171.	Noor Ibni Hasanah, S.H.	Hakim PN Nanga Bulik	Pelatihan Teknik Yudisial Hakim Berkelanjutan
172.	Thio Doly Pakpahan, S.H.	Jurusita PN Nanga Bulik	Diklat Anggaran
173.	Toni Aprianto, S.H.	Analisis Perkara Peradilan PN Nanga Bulik	Diklat Anggaran
174.	Beny Parlindungan Lumbantoruan, S.H.	Analisis Perkara Peradilan PN Nanga Bulik	Pembinaan dan Pelatihan Pengelolaan Perpustakaan
175.	Rija Romadan	PPNPN PN Nanga Bulik	Bimtek Pengelolaan Kepegawaian
176.	Aris Editio Telaumbanua, S.H.	Plt. Kasubag Keportala PN Nanga Bulik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bimtek Pengelolaan Kepegawaian</li> <li>- Diklat Anggaran</li> </ul>
177.	Aang Sutopo, S.H.	Sekretaris PN Nanga Bulik	Bimtek Penyusunan RPA
178.	Nenny Ekawaty Barus, S.H., M.H.	Ketua PN Pulang Pisau	Pelatihan Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup Peradilan Umum
179.	Laili Rahmah, A.Md., S.H.	Kasubbag. Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana PN Pulang Pisau	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelatihan Online Basic User Experience Design</li> <li>- Pelatihan Manajemen Aset</li> <li>- Pelatihan Kepemimpinan Pengawas</li> <li>- Pelatihan Online English Effective Presentation</li> <li>- Pelatihan E-</li> </ul>

			Learning Penyusunan laporan Kinerja <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelatihan Online</li> <li>- Peengelolaan Arsip Dinamis</li> <li>- Bimtek Pengelolaan Kepegawaian</li> </ul>
180.	Herjanriasto Bekti Nugroho, S.H.	Hakim PN Pulang Pisau	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelatihan Online Efektivitas Pribadi</li> <li>- Pelatihan Teknis Yudisial Hakim Berkelanjutan</li> </ul>
181.	Samsul Rizal, S.H.	Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan PN Pulang Pisau	Bimtek Penyusunan RPA
182.	Reviera Jesica Manurung, S.H.	Analis Perkara Peradilan PN Pulang Pisau	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sosialisasi Manajemen Kepegawaian Dasar bagi CPNS</li> <li>- Pendidikan Dasar CPNS</li> <li>- Pelatihan Online English Effective Presentation</li> </ul>
183.	Arofah Azhar, A.Md.	Pengelola Sistem dan jaringan PN Pulang Pisau	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sosialisasi Manajemen Kepegawaian Dasar bagi CPNS</li> <li>- Pendidikan Dasar CPNS</li> </ul>
184.	Romi Nevriyandra, A.Md.	Pengadministrasi Registrasi Perkara PN Pulang Pisau	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sosialisasi Manajemen Kepegawaian Dasar bagi CPNS</li> <li>- Pendidikan Dasar CPNS</li> </ul>
185.	I Made Landep, S.H.	Sekretaris PN Pulang Pisau	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelatihan Online Mentoring bagi Mentor Peserta PKP</li> <li>- Bimtek Penyusunan RPA</li> <li>- Bimtek Pengelolaan Kepegawaian</li> </ul>
186.	Ismaya Salindri, S.H.	Hakim PN Pulang Pisau	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelatihan Online Basic English Communication Skills For Court Officials</li> <li>- Sosialisasi PERMA 5 Tahun</li> </ul>

			2019
187.	Ruspeliati, S.H.	Panitera PN Pulang Pisau	Bimtek Kepaniteraan
188.	Niken Anggi Prajanti, S.H.	Hakim PN Pulang Pisau	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelatihan Online Teknik Menyusun resume Putusan Pengadilan (Executive Summary)</li> <li>- Sosialisasi PERMA 5 Tahun 2019</li> </ul>
189.	Dede Andreas, S.H., M.H.	Panitera Muda Perdata PN Pulang Pisau	Bimtek Kepaniteraan
190.	Noorhayati, S.kom., S.H.	Panitera Muda Pidana PN Pulang Pisau	Bimtek Kepaniteraan
191.	Dian Nur Pratiwi., S.H., M.H.Li	Wakil Ketua PN Pulang Pisau	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelatihan Sertifikasi Hakim Mediator Bagi Hakim Lingkungan Peradilan Umum</li> <li>- Pelatih Lanjutan Hak Asasi Manusia</li> <li>- Sosialisasi PERMA 3 Tahun 2017 dan PERMA 5 Tahun 2019</li> <li>- Pelatihan Teknis Yudisial Tindak Pidana Narkotika</li> <li>- Training of Trainers (TOT) Reguler</li> </ul>

#### E. Hukuman Disiplin

No	Nama	Jabatan	Hukdis yang Diberikan	Tingkat Hukdis
1	Supriyadi, S.H.	Panitera PN sampit	Pemotongan Tunjangan Kinerja 75% selama 3 (tiga) bulan	Ringan
2	Edi Rahmad, S.H	Hakim PN Muara Teweh	Teguran Lisan	Ringan
3	Nordin Asaddiq	Jurusita PN Tamiang Layang	Pembebasan dari Jabatan Jurusita dan pemotongan tunjangan kinerja sebesar 100% selama 18 bulan	Berat
4	Mangisi Gultom	Jurusita	Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 12 bulan dan pemotongan tunjangan kinerja sebesar 90% selama 12 bulan	Sedang



## BAB IV

# PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANAN DAN PRASARANA DAN TI

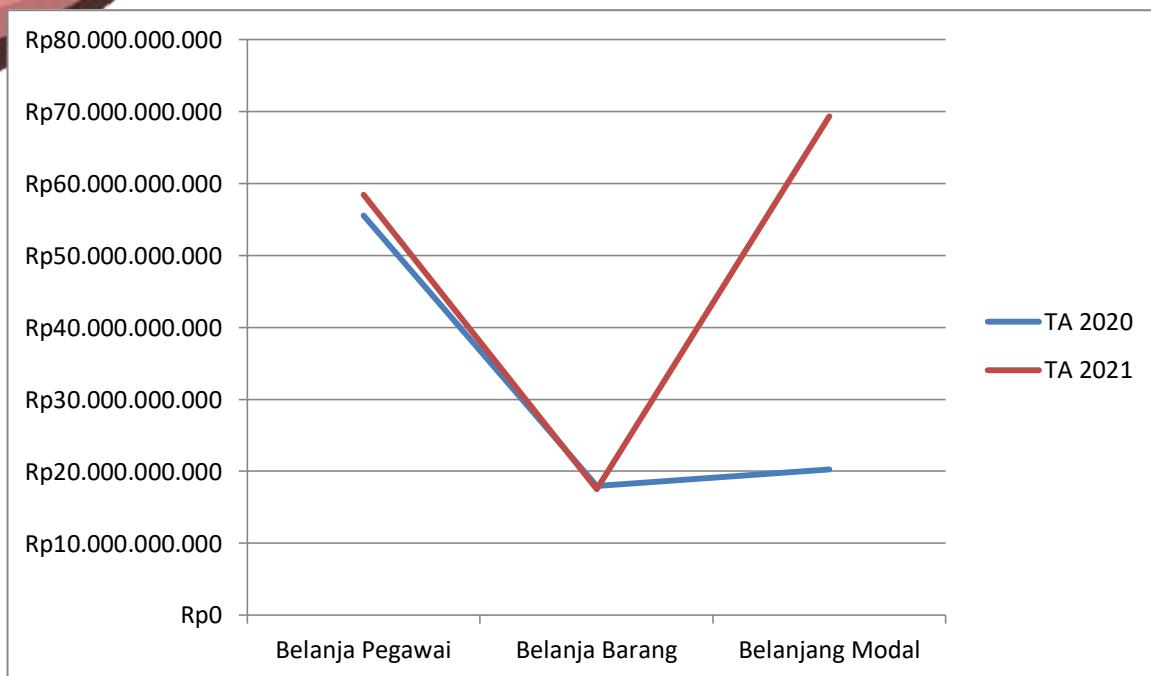
### A. PENGELOLAAN KEUANGAN

Pada Tahun Anggaran 2021 Pengadilan Tinggi Palangkaraya dan Peradilan Umum se-Wilayah Hukum Kalimantan Tengah memperoleh anggaran sebesar **Rp. 146.923.964.000** yang terdiri dari DIPA 01 BUA (Badan Urusan Administrasi) sebesar **Rp. 145.264.437.000** dan DIPA 03 BADILUM (Badan Peradilan Umum) sebesar **Rp. 1.659.527.000**

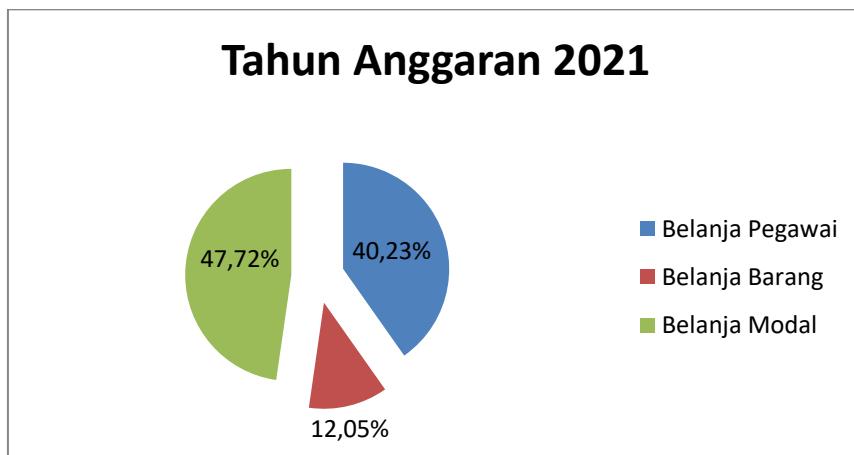
Anggaran tahun ini lebih besar jika dibandingkan dengan anggaran tahun lalu karena pada tahun ini anggaran untuk Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palangkaraya lebih tinggi dibandingkan tahun 2020. Akibat adanya Pandemic Covid 19 maka berdampak pada Angaran yang telah ditetapkan, sehingga mengkibatkan adanya revisi akun terutama untuk Belanja Barang yang menimbulkan akun khusus penggunaan covid serta kebijakan pemerintah atas penggunaan belanja modal (fisik) yang menggunakan multi years (tahun jamak) terutam untuk 3 (tiga) Satker di Bawah Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang melakukan pembangunan fisik gedung baru. Angaran Belanja terbagi ke dalam 3 (tiga) jenis belanja yaitu Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal. Jika dilihat dari pagu anggaran selama tahun 2021, maka anggaran paling besar adalah Belanja Modal yaitu sebesar **Rp. 69.327.060.000** atau sekitar 47,72% dari jumlah Pagu anggaran yang ada, kemudian disusul oleh Belanja Pegawai sebesar **Rp. 58.440.963.000** atau 40.23% dari total pagu anggaran, dan Belanja Barang dengan nilai pagu **Rp. 17.496.414.000** atau 12.05%.

Tabel : Perbandingan Anggaran Tahun 2020 dan Tahun 2021

Jenis Belanja	Tahun 2020	Tahun 2021
Belanja Pegawai	Rp. 55.518.609.000	Rp. 58.440.963.000
Belanja Barang	Rp. 17.974.030.000	Rp. 17.496.414.000
Belanja Modal	Rp. 20.221.840.000	Rp. 69.327.060.000
Jumlah	<b>Rp. 93.714.479.000</b>	<b>Rp. 145.264.437.000</b>

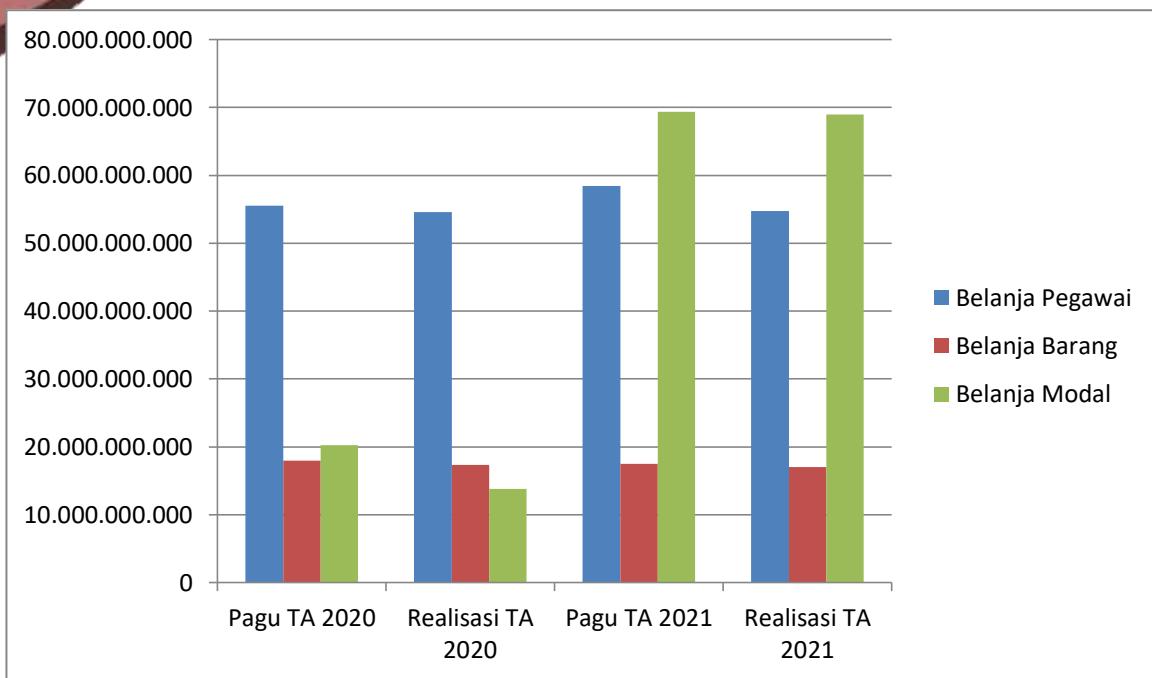


**Grafik: Perbandingan Anggaran Tahun 2020 dan Tahun 2021**



**Grafik: Perbandingan Jenis Belanja**

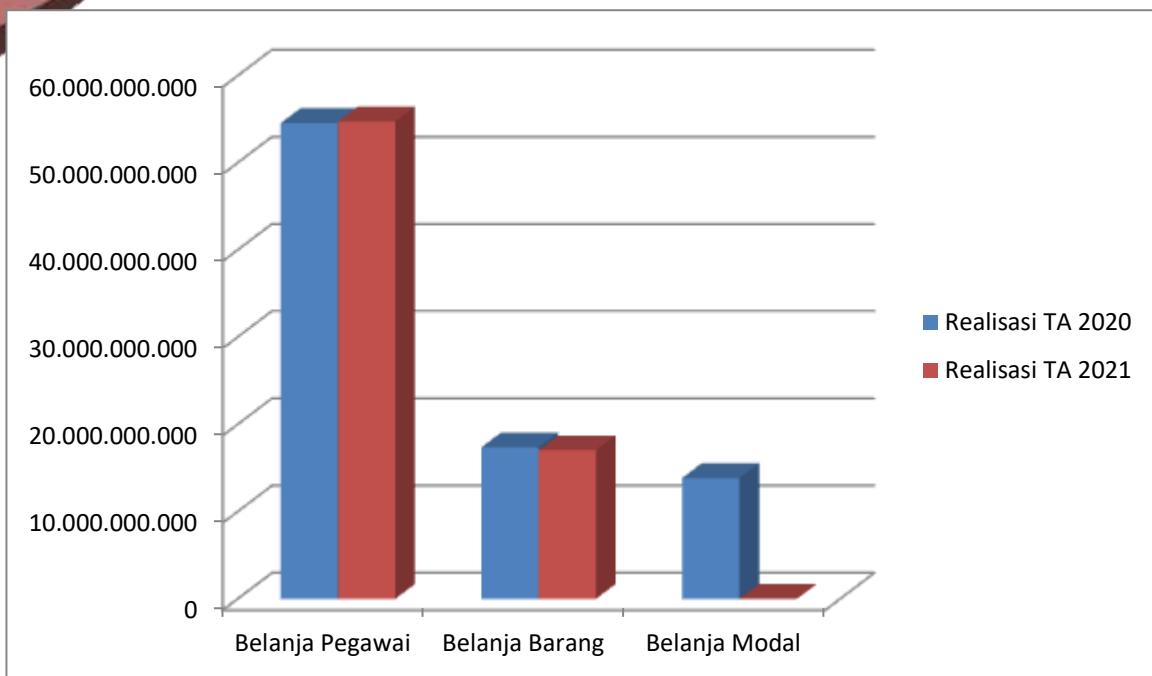
Realisasi belanja untuk tahun anggaran 2021 sebesar **Rp. 142.867.950.306** dengan persentase 97,24 % dari besarnya pagu anggaran, sedangkan tahun anggaran 2020 sebesar **Rp. 85.746.686.089** atau sebesar 91,50% dari besar Pagu anggaran. Jika dilihat dari persentase realisasi anggaran tahun ini realisasi anggaran tidak melebihi pagu anggaran yang tersedia karena tidak ada terdapat pagu minus. Realisasi DIPA 01 sebesar **Rp. 141.294.914.303** atau 97,27% sedangkan untuk DIPA 03 realisasinya sebesar **Rp. 142.867.950.306** atau 97,24%.



Grafik: Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran TA. 2020 dan TA. 2021

Tabel: Anggaran Tahun 2020 dan Tahun 2021

Jenis Belanja	TA. 2020		TA. 2021	
	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja Pegawai	55.518.609.000	54.549.574.283	58.440.963.000	54.721.315.307
Belanja Barang	17.974.030.000	17.357.817.386	17.496.414.000	17.014.283.207
Belanja Modal	20.221.840.000	13.839.294.420	69.327.060.000	68.965.321.791
<b>Jumlah</b>	<b>93.714.479.000</b>	<b>85.746.686.089</b>	<b>145.264.437.000</b>	<b>140.700.920.305</b>



**Grafik: Perbandingan Realisasi TA.2020 dan TA.2021**

Adapun secara rinci Pagu dan realisasi pada setiap Pengadilan per DIPA dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### 1. DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi)

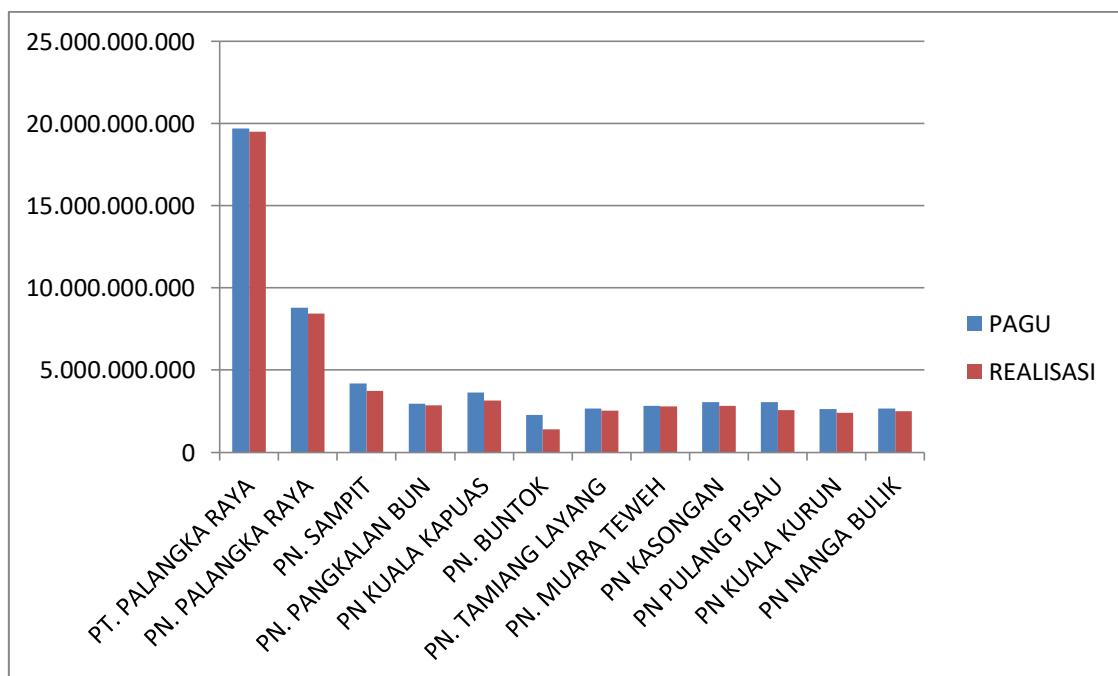
DIPA 01 (Badan Urusan Admisitrasii) terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal. Total Pagu tahun 2021 sebesar Rp. 145.264.437.000 dan realisasi sebesar Rp. 140.700.920.305 atau 96,86%.

##### A. Belanja Pegawai

Anggaran Belanja Pegawai untuk Pengadilan Tinggi Palangkaraya dan Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palangkaraya tahun 2021 Pagu sebesar Rp. 58.440.963.000 dengan realisasi sebesar Rp. 54.721.315.307 atau 93,64%. Anggaran Belanja Pegawai pada setiap satuan kerja dapat dilihat pada tabel berikut :

NO	SATUAN KERJA	PAGU	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1	PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA	19.705.802.000	19.497.096.058	208.705.942	98,94
2	PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA	8.794.424.000	8.434.785.229	359.638.771	95,91
3	PENGADILAN NEGERI SAMPIT	4.180.787.000	3.741.732.845	439.054.155	89,50
4	PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN	2.951.527.000	2.857.526.773	94.000.227	96,82

<b>5</b>	PENGADILAN NEGERI KUALA KAPUAS	3.637.030.000	3.164.341.858	472.688.142	87,00
<b>6</b>	PENGADILAN NEGERI BUNTOK	2.286.735.000	1.384.850.377	901.884.623	60,56
<b>7</b>	PENGADILAN NEGERI TAMIANG LAYANG	2.667.046.000	2.525.320.307	141.725.693	94,69
<b>8</b>	PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH	2.812.496.000	2.786.614.128	25.881.872	99,08
<b>9</b>	PENGADILAN NEGERI KASONGAN	3.049.216.000	2.829.153.642	220.062.358	92,78
<b>10</b>	PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU	3.036.114.000	2.576.839.454	459.274.546	84,87
<b>11</b>	PENGADILAN NEGERI KUALA KURUN	2.641.230.000	2.409.569.357	231.660.643	91,23
<b>12</b>	PENGADILAN NEGERI NANGA BULIK	2.678.556.000	2.513.485.279	165.070.721	93,84
<b>JUMLAH</b>		<b>58.440.963.000</b>	<b>54.721.315.307</b>	<b>3.719.647.693</b>	93,64



Grafik: Pagu dan Realisasi Belanja Pegawai TA.2021

## B. Belanja Barang (52)

Pada tahun anggaran 2021 Pengadilan Tinggi Palangkaraya dan Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palangkaraya mendapat anggaran sebesar Rp. 146.923.964.000 dengan pencapaian realisasi sebesar Rp. 142.867.950.306 dengan persentase sebesar 97,24%. Belanja Barang terdiri dari:

### a) Belanja Barang Operasional

Belanja Barang Operasional merupakan pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai yang dipergunakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar suatu satuan kerja dan umumnya pelayanan yang bersifat internal. Jenis pengeluaran terdiri:

- a. Belanja keperluan perkantoran;
- b. Belanja Langganan Daya dan Jasa;
- c. Belanja Pemeliharaan Kantor;
- d. Belanja Perjalanan Dinas
- e. Honor yang terkait dengan operasional Satker;
- f. Belanja barang operasional lainnya yang diperlukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

### b) Belanja Barang Non Operasional

Belanja Barang Non Operasional merupakan pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai dikaitkan dengan strategi pencapaian target kinerja suatu satuan kerja dan umumnya pelayanan yang bersifat eksternal.

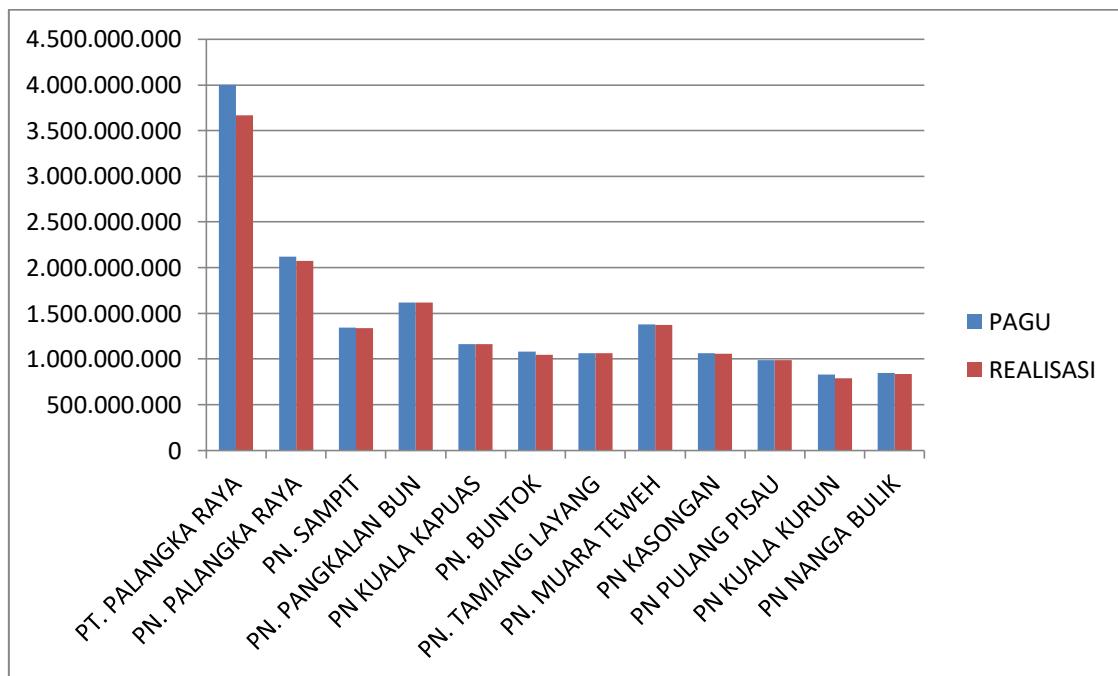
Jenis pengeluaran terdiri antara lain:

- a. Honor yang terkait dengan output kegiatan;
- b. Belanja operasional terkait dengan penyelenggaraan administrasi kegiatan di luar kantor, antara lain biaya paket rapat/pertemuan, ATK, uang saku, uang transportasi lokal, biaya sewa peralatan yang mendukung penyelenggaraan kegiatan berkenaan;

**Tabel: Belanja Barang**

NO	SATUAN KERJA	PAGU	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1	PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA	4.000.101.000	3.670.625.301	329.475.699	91,76
2	PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA	2.122.057.000	2.075.802.716	46.254.284	97,82
3	PENGADILAN NEGERI SAMPIT	1.341.187.000	1.340.165.209	1.021.791	99,92

<b>4</b>	PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN	1.616.519.000	1.616.431.639	87.361	99,99
<b>5</b>	PENGADILAN NEGERI KUALA KAPUAS	1.162.430.000	1.161.027.892	1.402.108	99,88
<b>6</b>	PENGADILAN NEGERI BUNTOK	1.079.179.000	1.046.172.350	33.006.650	96,94
<b>7</b>	PENGADILAN NEGERI TAMIANG LAYANG	1.065.483.000	1.062.821.869	2.661.131	99,75
<b>8</b>	PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH	1.380.574.000	1.372.385.725	8.188.275	99,41
<b>9</b>	PENGADILAN NEGERI KASONGAN	1.064.264.000	1.055.806.387	8.457.613	99,21
<b>10</b>	PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU	987.023.000	985.599.311	1.423.689	99,86
<b>11</b>	PENGADILAN NEGERI KUALA KURUN	828.513.000	791.234.192	37.278.808	95,50
<b>12</b>	PENGADILAN NEGERI NANGA BULIK	849.084.000	836.210.616	12.873.384	98,48
<b>JUMLAH</b>		<b>17.496.414.000</b>	<b>17.014.283.207</b>	<b>482.130.793</b>	<b>97,24</b>



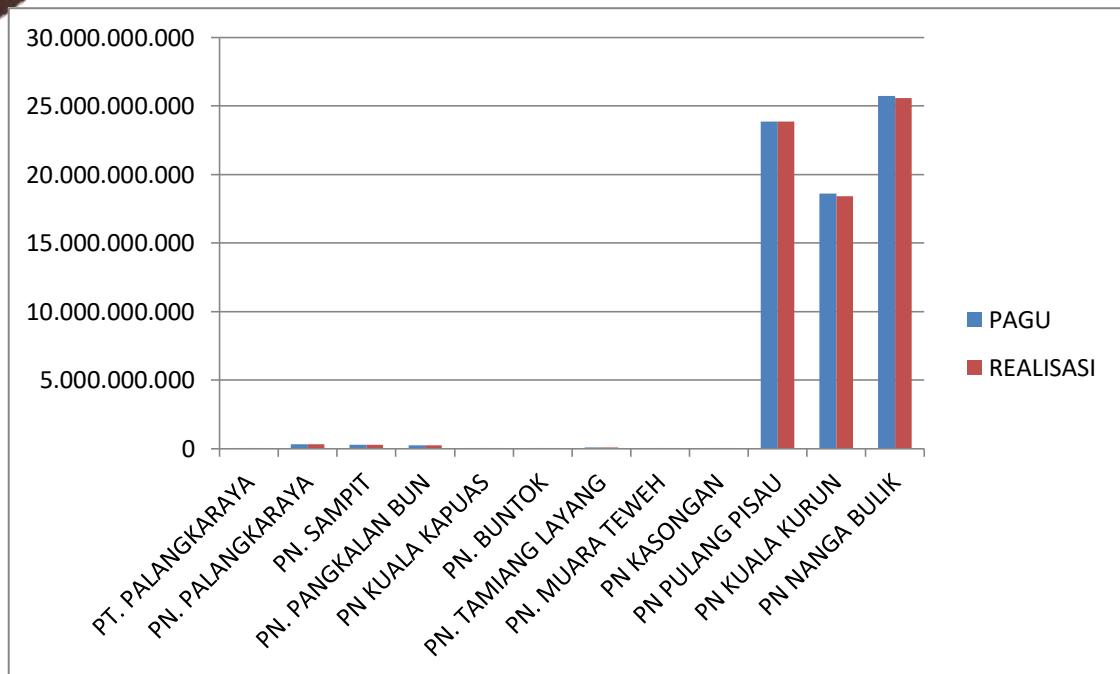
Grafik: Pagu dan Realisasi Belanja Barang TA.2021

### C. Belanja Modal (Akun 53)

Pada Tahun 2021 Belanja Modal untuk Pengadilan Tinggi Palangkaraya dan Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palangkaraya sebesar Rp. 69.327.060.000 dengan realisasi sebesar Rp. 68.965.321.791 atau mencapai 99,48 %. Apabila dilihat, belanja modal yang terlaksana yaitu berupa program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung, program tersebut dapat dikategorikan sudah mencapai sasaran sesuai target, yang bertujuan meningkatkan penyediaan fasilitas sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan peradilan. Anggaran Belanja Modal pada satuan kerja dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel: Belanja Modal**

NO	SATUAN KERJA	PAGU	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1	PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA	37.500.000	36.900.000	600.000	98,40
2	PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA	310.000.000	310.000.000	0	100
3	PENGADILAN NEGERI SAMPIT	265.000.000	264.551.000	449.000	99,83
4	PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN	237.500.000	237.500.000	0	100
5	PENGADILAN NEGERI KUALA KAPUAS	37.500.000	37.500.000	0	100
6	PENGADILAN NEGERI BUNTOK	37.500.000	37.500.000	0	100
7	PENGADILAN NEGERI TAMIANG LAYANG	92.400.000	92.300.000	100.000	99,89
8	PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH	37.500.000	37.500.000	0	100
9	PENGADILAN NEGERI KASONGAN	37.500.000	37.500.000	0	100
10	PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU	23.887.455.000	23.886.342.896	1.112.104	99,99
11	PENGADILAN NEGERI KUALA KURUN	18.601.580.000	18.420.670.390	180.909.610	99,03
12	PENGADILAN NEGERI NANGA BULIK	25.745.625.000	25.567.057.505	178.567.495	99,31
<b>JUMLAH</b>		<b>69.327.060.000</b>	<b>68.965.321.791</b>	<b>361.738.209</b>	<b>99,48</b>



**Grafik: Pagu dan Realisasi Belanja Modal TA. 2021**

Perbandingan Pagu Anggaran Belanja Modal (Akun 53) tahun 2020 dan 2021 terlihat pada grafik di atas bahwa Pagu 2021 lebih besar dari pada pagu 2020 hal ini akibat adanya Belanja Modal untuk pembuatan gedung baru untuk 3 (tiga) satuan kerja. Akibat dari adanya pandemic Covid berpengaruh terhadap penggunaan Belanja Modal (Akun 53) dimana system pembangunan untuk 3 (tiga) satuan kerja yang terdiri dari Pengadilan Negeri Pulang Pisau, Pengailan Negeri Nanga Bulik dan Pengadilan Negeri Kuala Kurun menggunakan kontrak *multi years* (Tahun Jamak), pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 12 (dua belas) bulan atau lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran;

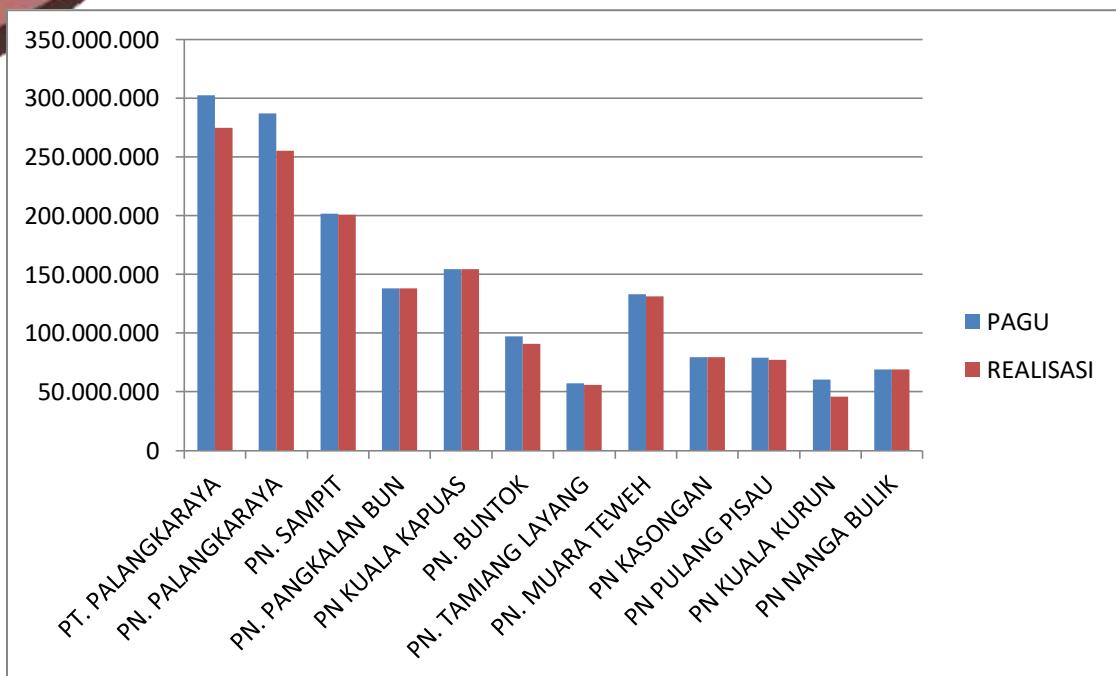
## 2. DIPA 03 (Dirjen Badilum)

Tahun Anggaran 2021 Pengadilan Tinggi Palangkaraya dan Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palangkaraya untuk DIPA 03 (Dirjen Badilum) mendapatkan anggaran sebesar Rp. 1.659.527.000 dengan realisasi sebesar Rp. 1.573.036.000 atau 94,79% dari pagu anggaran. DIPA 03 (Dirjen Badilum) hanya terdiri dari belanja barang saja. Belanja Barang tersebut digunakan untuk mendukung peningkatan manajemen peradilan, dengan tujuan agar perkara dapat terselesaikan tepat waktu baik pada Peradilan Tingkat Banding maupun Peradilan Umum lainnya. Belanja Barang terdiri dari :

- a) Belanja operasional terdiri dari belanja pengiriman surat dinas pos pusat.
- b) Belanja non operasional terdiri dari belanja bahan dan belanja non operasional lainnya.
- c) Belanja persediaan
- d) Belanja jasa untuk konsultasi
- e) Belanja perjalanan dinas

**Tabel: Anggaran DIPA 03**

NO	SATUAN KERJA	PAGU	REALISASI	SISA	%
1	PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA	302.711.000	274.985.248	27.725.752	90,84%
2	PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA	287.130.000	255.521.855	31.608.145	88,99
3	PENGADILAN NEGERI SAMPIT	201.764.000	200.879.500	884.500	99,56
4	PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN	138.293.000	138.105.000	188.000	99,86
5	PENGADILAN NEGERI KUALA KAPUAS	154.470.000	154.400.000	70.000	99,95
6	PENGADILAN NEGERI BUNTOK	97.260.000	90.907.950	6.352.050	93,47
7	PENGADILAN NEGERI TAMIANG LAYANG	57.204.000	55.853.500	1.350.500	97,64
8	PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH	132.980.000	131.130.900	1.849.100	98,61
9	PENGADILAN NEGERI KASONGAN	79.648.000	79.543.500	104.500	99,87
10	PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU	78.945.000	77.099.300	1.845.700	97,66
11	PENGADILAN NEGERI KUALA KURUN	60.260.000	45.748.500	14.511.500	75,92
12	PENGADILAN NEGERI NANGA BULIK	68.862.000	68.860.750	1.250	100
	<b>JUMLAH</b>				



Grafik: Pagu dan Realisasi Belanja Barang TA. 2021

## B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

### 1. PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA

Pengadilan Tinggi Palangkaraya khususnya pada pengelolaan sarana dan prasarana merinci tentang pelaksanaan pengelolaan Sarana dan Prasarana Gedung yang meliputi pengadaan, pemeliharaan dan usulan penghapusan Barang Milik Negara (BMN) dalam kurun waktu tahun anggaran 2021.

Pengadilan Tinggi Palangkaraya saat ini mempunyai gedung perkantoran dengan sarana dan prasarana sebagai berikut:

#### 1. Gedung Kantor

a) Gedung kantor Pengadilan Tinggi Palangkaraya terbagi menjadi 2 gedung yaitu gedung depan dan gedung belakang. Gedung depan direnovasi pada tahun 2009 dengan 2 lantai dengan luas bangunan 2.544 m<sup>2</sup> serta gedung belakang juga dibangun pada tahun 2006 dengan 2 lantai dengan luas bangunan 1.600 m<sup>2</sup>. Bangunan tersebut berdiri di atas tanah dengan luas 6.000 m<sup>2</sup> Sertifikat Hak Pakai No. 15 tanggal 17 Mei 1980 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Mahkamah Agung Republik Indonesia yang terletak di jalan RTA. Milono No. 9 Palangka Raya, Kalimantan Tengah.

No	Sarana/Prasarana Gedung	Jumlah	Ket
1	Ruang KPT	1	
2	Ruang WKPT	1	
3	Ruang Panitera	1	
4	Ruang Hakim Ad-Hoc Tipikor	1	
5	Ruang Sekretaris	1	
6	Ruang Panitera Pengganti	-	
7	Ruang Hakim Tinggi	5	
8	Ruang Kabag Umum dan Keuangan	1	
9	Ruang Sub bagian TU dan RT	1	
10	Ruang ATK	1	
11	Ruang Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan	1	
12	Ruang Kabag Perencanaan dan Kepegawaian	1	
13	Ruang Sub Bagian KP & IT	1	
14	Ruang Sub Bagian Rencana Program & Anggaran	1	
15	Ruang Pengaduan / Akreditasi	1	
16	Ruang Kepaniteraan Tipikor	1	
17	Ruang IT/Server	1	
18	Ruang Arsip Pidana	1	

<b>19</b>	Ruang Arsip Perdata	1	
<b>20</b>	Ruang Kepaniteraan Hukum	1	
<b>21</b>	Ruang Kepaniteraan Pidana dan Perdata	1	
<b>22</b>	Ruang Laktasi	1	
<b>23</b>	Ruang Perpustakaan	1	
<b>24</b>	Ruang Sidang	1	
<b>25</b>	Ruang Aula Pertemuan	1	
<b>26</b>	Ruang Arsip Kesekretariatan	1	
<b>27</b>	Mushola	1	
<b>28</b>	Ruang Kebaktian	1	
<b>29</b>	Gudang	2	
<b>30</b>	Toilet	15	

- Ruang Ketua yang terdiri dari ruang rapat, ruang tamu dan ruang kerja ketua;
- Ruang Wakil Ketua yang terdiri dari ruang kerja yang menyatu dengan ruang tamu;
- Ruang Panitera yang terdiri dari ruang kerja dan ruang tamu;
- Ruang Sekretaris yang terdiri dari ruang kerja dan ruang tamu;
- Ruang Hakim Tinggi pada tahun 2019 menjadi dari 5 (lima) ruangan;
- Ruang Hakim Ad-Hoc TIPIKOR;
- Ruang Panitera Pengganti dijadikan sebagai ruang Hakim Tinggi dikarenakan semua panitera pengganti diperlukan di kepaniteraan pidana, perdata dan tipikor;
- Ruang Perpustakaan;
- Ruang Laktasi;
- Ruang ATK berada dalam ruang khusus yang bergabung dengan ruang sub bagian tata usaha dan rumah tangga;
- Ruang Kepaniteraan Pidana dan Perdata;
- Ruang Kepaniteraan TIPIKOR;
- Ruang Kepaniteraan Hukum;
- Ruang Arsip Perdata;
- Ruang Arsip Pidana;
- Ruang IT/ Server;
- Ruang Pengaduan/Akreditasi;
- Ruang Sub Bagian Kepegawaian dan IT
- Ruang Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran;
- Ruang Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan;

- Ruang Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga;
- Ruang Kabag Umum dan Keuangan;
- Ruang Kabag Perencanaan dan Kepegawaian;
- Ruang Aula Pertemuan Isen Mulang;
- Ruang Sidang;
- Ruang Arsip Kesekretariatan
- Mushola;
- Ruang Kebaktian/Ibadah;
- Gudang;
- Toilet yang terdiri dari 5 (enam) toilet umum, 10 (sepuluh) toilet yang berada di dalam ruangan dan 1 toilet difabel, 1 toilet umum yang lama difungsikan sebagai gudang dikarenakan tidak bisa berfungsi lagi.

## 2. Rumah Dinas

No	Uraian	Jumlah	Kondisi			*Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
<b>Rumah Dinas</b>						
1	Rumah Dinas Ketua	1	√			Jl. M.H. Thamrin No. 27
2	Rumah Dinas Wakil Ketua	1	√			Jl. M.H. Thamrin No. 29
3	Rumah Dinas Hakim Tinggi	6	√			- Jl. Lambung Mangkurat No. 7 dan 9 - Jl. G. Obos No. 1 dan 3 Jl. Baban No. 18 dan 26
4	Rumah Dinas Panitera	1	√			Jl. G. Obos No. 5
5	Rumah Dinas Sekretaris	1	√			Ditempati oleh Hakim Tinggi Jl. Baban No. 28

- a) Satu unit rumah dinas dengan luas bangunan 120 m<sup>2</sup> Golongan I tipe B Permanen, berdiri diatas tanah dengan luas 2.000 m<sup>2</sup> Sertifikat nomor 22 tanggal 08 januari 2014 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Mahkamah Agung Republik Indonesia yang terletak di jalan M.H. Thamrin No. 27 Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Digunakan sebagai rumah dinas Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya.

- b) Satu unit rumah dinas dengan luas bangunan 70 m<sup>2</sup> Golongan I tipe C Permanen, berdiri diatas tanah dengan luas 1.500 m<sup>2</sup> Sertipikat nomor 23 tanggal 19 maret 1981 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Mahkamah Agung Republik Indonesia yang terletak di jalan M.H. Thamrin No. 29 Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Digunakan sebagai rumah dinas Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya.
- c) Satu unit rumah dinas dengan luas bangunan 70 m<sup>2</sup> Golongan I tipe C Permanen, berdiri diatas tanah dengan luas 1.200 m<sup>2</sup> Sertipikat nomor 34 tanggal 17 mei 1980 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Mahkamah Agung Republik Indonesia yang terletak di jalan G. Obos No. 5 Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Diperuntukan sebagai rumah dinas Panitera Pengadilan Tinggi Palangkaraya.
- d) Satu unit rumah dinas dengan luas bangunan 120 m<sup>2</sup> Golongan I tipe B Permanen, berdiri diatas tanah dengan luas 1.200 m<sup>2</sup> Sertipikat nomor 372 tanggal 12 april 1982 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Mahkamah Agung Republik Indonesia yang terletak di jalan Lambung Mangkurat No. 7 Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Digunakan sebagai rumah dinas Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palangkaraya.
- e) Satu unit rumah dinas dengan luas bangunan 120 m<sup>2</sup> Golongan I tipe B Permanen, berdiri diatas tanah dengan luas 1.181 m<sup>2</sup> Sertipikat nomor 373 tanggal 12 april 1982 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Mahkamah Agung Republik Indonesia yang terletak di jalan Lambung Mangkurat No. 9 Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Digunakan sebagai rumah dinas Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palangkaraya.
- f) Satu unit rumah dinas dengan luas bangunan 120 m<sup>2</sup> Golongan I tipe B Permanen, berdiri diatas tanah dengan luas 1.200 m<sup>2</sup> Sertipikat nomor 37 tanggal 17 mei 1980 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Mahkamah Agung Republik Indonesia yang terletak di jalan G. Obos No. 3 Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Digunakan sebagai rumah dinas Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palangkaraya.
- g) Satu unit rumah dinas dengan luas bangunan 120 m<sup>2</sup> Golongan I tipe B Permanen, berdiri diatas tanah dengan luas 750 m<sup>2</sup> dengan Sertipikat nomor 824 tanggal 20 februari 1985 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Mahkamah Agung Republik Indonesia yang terletak di jalan Baban No. 18 Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Digunakan sebagai rumah dinas Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palangkaraya.
- h) Satu unit rumah dinas dengan luas bangunan 120 m<sup>2</sup> Golongan I tipe B Permanen, berdiri diatas tanah dengan luas 1.200 m<sup>2</sup> Sertipikat nomor

36 tanggal 17 mei 1980 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Mahkamah Agung Republik Indonesia yang terletak di jalan G. Obos No. 1 Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Digunakan sebagai rumah dinas Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palangkaraya.

- i) Satu unit rumah dinas dengan luas bangunan 70 m<sup>2</sup> Golongan I tipe C Permanen, berdiri diatas tanah dengan luas 600 m<sup>2</sup> Sertifikat nomor 1394 tanggal 04 juli 1989 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Mahkamah Agung Republik Indonesia yang terletak di jalan Baban No. 26 Palangka Raya, Kalimantan Tengah.
- j) Satu unit rumah dinas dengan luas bangunan 70 m<sup>2</sup> Golongan I tipe C Permanen, berdiri diatas tanah dengan luas 600 m<sup>2</sup> Sertifikat nomor 1395 tanggal 04 juli 1989 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Mahkamah Agung Republik Indonesia yang terletak di jalan Baban No. 28 Palangka Raya, Kalimantan Tengah.

Berkaitan dengan pengelolaan sarana dan prasarana gedung secara umum pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya sebagai berikut:

1. Pengadaan/pembangunan dan pengembangan

Tidak ada anggaran pengadaan pembangunan dan pengembangan pada DIPA Pengadilan Tinggi Palangkaraya Tahun Anggaran 2021.

2. Pemeliharaan/perawatan

Pemeliharaan sarana dan prasarana tetap dilakukan setiap tahunnya untuk menjaga dan mengoptimalkan sarana dan prasarana yang memadai. Kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana di Pengadilan Tinggi Palangkaraya pada tahun 2021 meliputi perbaikan/service AC, PC Komputer, Printer, Jaringan Instalasi Listrik, Kendaraan Dinas/Operasional baik roda 4 (empat) maupun roda 2 (dua), rumah dinas serta pemeliharaan taman dan gedung kantor.

No.	Sarana/Prasarana Fasilitas Perkantoran Peralatan dan Mesin	Jumlah per 01 Januari 2020	Jumlah per 31 Desember 2020
1	Stationary Generating Set	1	1
2	Lemari Besi/metal	3	3
3	Lemari Kayu	53	53
4	Rak Besi	16	16
5	Rak Kayu	12	12
6	Filing Cabinet Besi	9	9
7	Brandkas	2	2
8	Buffet	4	4
9	Tabung Pemadam Api	8	8
10	CCTV	2	2

11	White Board	7	7
12	Mesin Absensi	2	2
13	Penangkal Petir	1	1
14	Lcd Projector/infocus	1	1
15	Alat Perekam Suara (voice pen)	1	1
16	Perkakas Kantor Lainnya	4	4
17	Alat Kantor Lainnya	3	3
18	Meja Kerja Kayu	63	63
19	Kursi Besi/metal	214	214
20	Kursi Kayu	41	41
21	Sice	15	15
22	Meja Rapat	9	9
23	Meja Komputer	10	10
24	Meja Telepon	4	4
25	Meja Resepsiionis	8	8
26	Meja Makan Kayu	1	1
27	Jam Elektronik	1	1
28	Mesin Penghisap Debu/vacum Cleaner	1	1
29	Mesin Pemotong Rumput	1	1
30	Lemari Es	1	1
31	A.c. Split	36	36
32	Kipas Angin	4	4
33	Alat Pendingin Lainnya	2	2
34	Televisi	10	10
35	Loudspeaker	7	7
36	Sound System	2	2
37	Microphone	15	15
38	Microphone Table Stand	4	4
39	Unit Power Supply	6	6
40	Stabilisator	1	1
41	Tiang Bendera	2	2
42	Tangga Aluminium	1	1
43	Kaca Hias	7	7
44	Mimbar/podium	1	1
45	Palu Sidang	1	1
46	Lambang Instansi	1	1
47	Handycam	1	1
48	Karpet	4	4
49	Gordyn/kray	3	3
50	Asbak Tinggi	5	5
51	Kabel	3	3
52	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1	1
53	Audio Mixing Portable	2	2
54	Compact Disc Player (peralatan Studio Audio)	1	1
55	Modulation Monitor Speaker Kabaret	1	1
56	Microphone/wireless Mic	3	3
57	Microphone/boom Stand	2	2
58	Uninterruptible Power Supply (ups)	7	7
59	Power Amplifier	1	1
60	Digital Keyboard Technics	1	1
61	Camera Digital	1	1

<b>62</b>	Lcd Monitor	2	2
<b>63</b>	Telephone (pabx)	1	1
<b>64</b>	Handy Talky (ht)	4	4
<b>65</b>	Facsimile	2	2
<b>66</b>	P.c Unit	24	27
<b>67</b>	Lap Top	30	30
<b>68</b>	Monitor	3	3
<b>69</b>	Printer (peralatan Personal Komputer)	29	29
<b>70</b>	Scanner (peralatan Personal Komputer)	4	4
<b>71</b>	Peralatan Personal Komputer Lainnya	4	4
<b>72</b>	Server	3	3
<b>73</b>	Router	4	4
<b>74</b>	Hub	2	3
<b>75</b>	Rak Server	1	1
<b>76</b>	Wireless Access Point	13	13
<b>77</b>	Peralatan Jaringan Lainnya	3	3
<b>78</b>	Network Monitoring System	0	1

### 3. Penghapusan

Pada tahun 2020, Pengadilan Tinggi Palangkaraya tidak melakukan penghapusan terhadap aset Barang Milik Negara (BMN).

### 4. Hibah

Pada tahun 2021, Pengadilan Tinggi Palangkaraya tidak ada menerima hibah.

### 5. Transfer Masuk

Pada tahun 2021, Pengadilan Tinggi Palangkaraya ada menerima Transfer Masuk Barang Milik Negara (BMN) dari Badan Peradilan Umum (Badilum) yang difungsikan sebagai alat penyambung CCTV pada ruang/lobby PTSP dan ruang sidang Pengadilan Tinggi Palangkaraya dengan ruang Comand Center Dirjen Badilum yaitu berupa:

No.	Nama BMN				Kuantitas/Unit
<b>1</b>	Network System	Video Recording	Network Monitoring		1
<b>2</b>	Hub				1

Pengadilan Tinggi Palangkaraya dalam melaksanakan tugas agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien sesuai dengan harapan maka perlu didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Pengadaan sarana dan prasarana pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang dilaksanakan dalam tahun 2021 ini dengan uraian pekerjaan sebagai berikut:

1. Sarana dan Prasarana

- a. Pekerjaan pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi PC kepaniteraan sebanyak 3 (tiga) unit dan telah tercatat sebagai asset/BMN kantor Pengadilan Tinggi Palangkaraya.

NO	NAMA	KUANTITAS
1	LENOVO ThinkCentre V50t (i5-10400, 8GB, 2TB HDD, 21.5 Inch, Integrated, Win10Pro, 3Yr)	3 unit

Berikut rincian aset kendaraan dinas roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) yang dimiliki oleh kantor Pengadilan Tinggi Palangkaraya sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun Perolehan	Kondisi			*Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
<b>Jenis Kendaraan Roda 4</b>						
1	Sedan Toyota/Camry V 2.5 A/T	2018	✓			Tercatat sebagai barang Pihak Ketiga dan digunakan oleh Ketua
2	SUV Toyota/Fortuner G 2.4 A/T	2018	✓			Tercatat sebagai barang Pihak Ketiga dan digunakan oleh Wakil Ketua
3	MPV Toyota Kijang Innova 2.0 G A/T	2019	✓			Tercatat sebagai barang Pihak Ketiga digunakan untuk Operasional
4	Minibus Toyota Hiace Commuter	2020	✓			Tercatat sebagai barang Pihak Ketiga Operasional Kantor
5	SUV Mitsubishi/Pajero Sport 2.4L	2017	✓			Operasional Kantor dan digunakan oleh Ketua
6	Sedan Toyota Corolla 1800 (KH 26)	2005	✓			Sekretaris
7	Sedan Toyota	2009	✓			Kabag

	Vios 1.5 G MT (KH 1250 TU)					Perencanaan dan Kepegawaian
8	Minibus Kijang Innova E (KH 1162 TU)	2008	✓			Kabag Umum dan Keuangan
9	Minibus Kijang Innova V (KH 97)	2011	✓			Panitera
II	<b>Jenis Kendaraan Roda 2</b>					
1	Sepeda Motor Solo Honda NF 125 D (KH 2616 AY)	2003	✓			Sub bagian Kepegawaian dan IT
2	Sepeda Motor Solo Honda NF 125 TR (KH 5002 AY)	2009	✓			Kasubbag TU dan RT
3	Sepeda Motor Solo Honda NF 125 D (KH 2617 AY)	2003	✓			Sub bagian TU dan RT
4	Sepeda Motor Solo Suzuki EN 125 A (KH 4889 AY)	2008			✓	-
5	Sepeda Motor Solo Honda NF 125 D (KH 3646 AY)	2005	✓			Panmud Hukum
6	Sepeda Motor Solo Suzuki EN 125 A (KH 4890 AY)	2008	✓			Kabag Perencanaan dan Kepegawaian
7	Sepeda Motor Solo Honda NF 125 D (KH 3647 AY)	2005	✓			Staf Sub bagian TU dan RT
8	Sepeda Motor Solo Honda MCB (KH 3829 AU)	1995			✓	-

- a) Mobil dengan nomor polisi KH 5; type Sedan; merk Toyota Altis; tahun pembuatan 2005; nomor mesin: 1ZZ4460122; nomor rangka: MR053ZEC257402486; nomor BPKB: D8456618G; tahun perolehan 2008, tercatat atas nama Pengadilan Tinggi Palangkaraya dan digunakan sebagai mobil dinas Sekretaris Pengadilan Tinggi Palangkaraya.
- b) Mobil dengan nomor polisi KH 26; type Vios 1,5 G M/T; merk Toyota Vios G G/T; tahun pembuatan 2008; nomor mesin: 1NZX847105; nomor rangka: MR053HY9389018098; nomor BPKB: F7391880G; tahun perolehan 2009, tercatat atas nama Pengadilan Tinggi Palangkaraya dan digunakan

sebagai mobil dinas Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Pengadilan Tinggi Palangkaraya.

- c) Mobil dengan nomor polisi KH 97; type Kijang V; merk Toyota; tahun pembuatan 2011; nomor mesin: 1TR7153119; nomor rangka: MHFXW4367B4058717; nomor BPKB: I-06795484M; tahun perolehan 2011, tercatat atas nama Pengadilan Tinggi Palangkaraya dan digunakan sebagai mobil dinas Panitera Pengadilan Tinggi Palangkaraya.
- d) Mobil dengan nomor polisi KH 1162 TU; type Kijang Innova; merk Toyota; tahun pembuatan 2008; nomor mesin: 1TR6639606; nomor rangka: MHFXW41G580032720; nomor BPKB: F6668783M; tahun perolehan 2009, tercatat atas nama Pengadilan Tinggi Palangkaraya dan digunakan sebagai mobil operasional umum Pengadilan Tinggi Palangkaraya.
- e) Mobil dengan nomor polisi KH 1764 AU; type Pajero Sport 2.4L DAKAR 4x2 8A/T; merk Mitsubishi; tahun pembuatan 2017; nomor mesin: 4N15UBP3620; nomor rangka: MK2KRPNUHJ000502; nomor BPKB: -; digunakan sebagai mobil dinas operasional yang digunakan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya.
- f) Mobil dengan nomor polisi B 1046 UAH; type Camry 2.5V AT; merk Toyota; tahun pembuatan 2018; nomor mesin: 2AR1948790; nomor rangka: MRO53AK50J4510669; nomor BPKB: N09460941; tercatat sebagai barang Pihak Ketiga pada aplikasi SIMAK BMN Pengadilan Tinggi Palangkaraya berdasarkan BAST Kendaraan Nomor: 69/BUA.7/BAST/BMN/7/2018 pada tanggal 19 Juli 2018 dengan pengguna Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya.
- g) Mobil dengan nomor polisi B 1409 UJR; type Fortuner 2,4G 4x2 AT; merk Toyota; tahun pembuatan 2018; nomor mesin: 2GDC382682; nomor rangka: MHFJB8GSXJ1555896; nomor BPKB: N09467239; tercatat sebagai barang Pihak Ketiga pada aplikasi SIMAK BMN Pengadilan Tinggi Palangkaraya berdasarkan BAST Kendaraan Nomor: 69/BUA.7/BAST/BMN/7/2018 pada tanggal 19 Juli 2018 dengan pengguna Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya.
- h) Mobil dengan nomor polisi KH 1438 TK; type MPV; merk Toyota Kijang Innova 2.0 G A/T; tahun pembuatan 2019; nomor mesin: 1TRA621536; nomor rangka: MHFJW8EM9K2370243; nomor BPKB: P02921905M; tercatat sebagai barang Pihak Ketiga pada aplikasi SIMAK BMN Pengadilan Tinggi Palangkaraya berdasarkan BAST Kendaraan Nomor: 122/BUA.7/RT/BAST/BMN/03/2020 pada tanggal 10 Maret 2020 digunakan untuk operasional Pengadilan Tinggi Palangkaraya.

- i) Mobil dengan nomor polisi KH 7040 AH; type Minibus; merk Toyota Hiace Commuter 2.5 4x2 MT D 2020; tahun pembuatan 2020; nomor mesin: 2KDB032113; nomor rangka: JTFSS22P9L0189753; nomor BPKB: QG4053741M; tercatat sebagai barang Pihak Ketiga pada aplikasi SIMAK BMN Pengadilan Tinggi Palangkaraya berdasarkan BAST Kendaraan Nomor: 025/BUA.7/RT/BAST/BMN/03/2020 pada tanggal 10 Maret 2020 digunakan untuk operasional Pengadilan Tinggi Palangkaraya.
- j) Sepeda Motor dengan nomor polisi KH 2616 AM; merk Honda Kharisma 125; tahun pembuatan 2003; nomor mesin: JB21E1255450; nomor rangka: MH1JB21133K258193; nomor BPKB: C6280699M; tahun perolehan 2003 tercatat atas nama Pengadilan Tinggi Palangkaraya dan digunakan sebagai kendaraan dinas Operasional pada Sub Bagian Kepegawaian dan IT Pengadilan Tinggi Palangkaraya.
- k) Sepeda Motor dengan nomor polisi KH 2617 AM; merk Honda Kharisma 125; tahun pembuatan 2003; nomor mesin: JB21E1258271; nomor rangka: MH1JB21113K260850; nomor BPKB: C6280700M; tahun perolehan 2003 tercatat atas nama Pengadilan Tinggi Palangkaraya dan digunakan sebagai kendaraan dinas Operasional pada Sub bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga Pengadilan Tinggi Palangkaraya.
- l) Sepeda Motor dengan nomor polisi KH 3829 AY; merk Honda Win 100; tahun pembuatan 1996; nomor mesin: HAE2270994; nomor rangka: MH1HA000SSK171432; nomor BPKB: A3697858M; tahun perolehan 1996 tercatat atas nama Pengadilan Tinggi Palangkaraya dengan kondisi rusak berat.
- m) Sepeda Motor dengan nomor polisi KH 3646 AY; merk Honda Kharisma; tahun pembuatan 2005; nomor mesin: JB22E1553144; nomor rangka: MH1JB22105K554516; nomor BPKB: D8617805M; tahun perolehan 2005 tercatat atas nama Pengadilan Tinggi Palangkaraya dan digunakan sebagai kendaraan dinas Operasional Panitera Muda Hukum Pengadilan Tinggi Palangkaraya.
- n) Sepeda Motor dengan nomor polisi KH 3647 AY; merk Honda Kharisma; tahun pembuatan 2005; nomor mesin: JB22E1563566; nomor rangka: MH1JB221X5K564146; nomor BPKB: D8617806M; tahun perolehan 2005 tercatat atas nama Pengadilan Tinggi Palangkaraya dan digunakan sebagai kendaraan dinas Operasional Kepala Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga Pengadilan Tinggi Palangkaraya.
- o) Sepeda Motor dengan nomor polisi KH 4889 AY; merk Suzuki Thunder; tahun pembuatan 2008; nomor mesin: F4051D555259; nomor rangka:

MH8EN125A8J555657; nomor BPKB: F2394460M; tahun perolehan 2008 tercatat atas nama Pengadilan Tinggi Palangkaraya dan digunakan sebagai kendaraan dinas Operasional pada Sub bagian Tata Usaha dan Rumah Tanga Pengadilan Tinggi Palangkaraya.

- p) Sepeda Motor dengan nomor polisi KH 4890 AY; merk Suzuki Thunder; tahun pembuatan 2008; nomor mesin: F4051D555301; nomor rangka: MH8EN125A8J555740; nomor BPKB: F2394461M; tahun perolehan 2008 tercatat atas nama Pengadilan Tinggi Palangkaraya dan digunakan sebagai kendaraan dinas Operasional Kabag Perencanaan dan Kepegawaian Pengadilan Tinggi Palangkaraya.
- q) Sepeda Motor dengan nomor polisi KH 5002 AY; merk Honda Supra X; tahun pembuatan 2009; nomor mesin: JB91E1660806; nomor rangka: MH1JB91189K664018; nomor BPKB: F6090295M; tahun perolehan 2009 tercatat atas nama Pengadilan Tinggi Palangkaraya dan digunakan sebagai kendaraan dinas Operasional Kabag Umum dan Keuangan Pengadilan Tinggi Palangkaraya.

## C. PENGELOLAAN TI

Dalam Rangka terwujudnya Badan Peradilan yang Agung, peradilan umum sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Palangkaraya menempatkan pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) sebagai salah satu prioritas perubahan, yang diharapkan dapat memiliki manajemen informasi yang menjamin keterbukaan informasi, akuntabilitas, kredibilitas dan transparansi serta organisasi modern berbasis Teknologi Informasi (TI) terpadu. Kebijakan yang diambil salah satunya adalah pendampingan secara terus menerus baik dari tingkat supervisi, operator maupun user dalam implementasi dari masing-masing aplikasi dilakukan secara rutin.

Perangkat pendukung TI tersedia yakni :

No	Satuan Kerja	Alamat Website	Alamat Sipp Web	Versi Sipp	Versi Ptsp	Nama Provider Internet Dan Bandwitdh	Model/Type Server	Fungsi Server	Kondisi
1	Pengadilan Tinggi Palangkaraya	<a href="http://www.pt-palangkaraya.go.id">www.pt-palangkaraya.go.id</a>	<a href="https://banding.mahkamahagung.go.id/">https://banding.mahkamahagung.go.id/</a>	-	2.2-2	PT ICON + = 27 Mbps (Dedicated) ASTINET = Up to 10 Mbps	IBM 3250 MS Integrated Lenovo  Fujitsu PRIMERGY TX 1330 M4	<b>Server 1</b> (PTSP, MAKBIDA, APM ONLINE, SIMASDOK, ANTRIAN PTSP, E-BAPER, SIDAS, MONITORING SIPP, PTSP-ONLINE, SIGAWAI) <b>Server 2</b> (BACKUP SINKRONISASI SIPP PN)	Baik
2	Pengadilan Negeri Palangka Raya	<a href="http://www.pn-palangkaraya.go.id">www.pn-palangkaraya.go.id</a>	<a href="http://www.sipp.pn-palangkaraya.go.id">www.sipp.pn-palangkaraya.go.id</a>	4.1.1	2.2-2	ICON+ 30 Mbps 1:1	Fujitsu PRIMERGY RX 1330 M1	SIPP,PTSP, MIS,Sinkroniasi dan aplikasi lain-lain	Baik
							Fujitsu PRIMERGY TX 1330 M4	Backup Data SIPP dan MIS, Aplikasi Lain	
3	Pengadilan Negeri Sampit	<a href="http://www.pn-sampit.go.id">www.pn-sampit.go.id</a>	<a href="http://www.sipp.pn-sampit.go.id">www.sipp.pn-sampit.go.id</a>	4.1.1	2.2-2	ICON+ 25 Mbps 1:1	Fujitsu RX 1330 M1	<b>Server 1</b> (SIPP) <b>Server 2</b> (PTSP, ANTRIAN PTSP, MONITORING SIPP, ASIAP, SIBAD)	Baik
						Speedy up to 30 Mbps	Fujitsu PRIMERGYTX 1330 M4		
4	Pengadilan Negeri Pangkalan Bun	<a href="http://www.pn-pangkalabun.go.id">www.pn-pangkalabun.go.id</a>	<a href="http://www.sipp.pn-pangkalabun.go.id">www.sipp.pn-pangkalabun.go.id</a>	4.1.1	2.2-2	ASTINet 50 Mbps 1:4	Fujitsu RX 1330 M1	<b>Server 1</b> SIPP, PTSP, MIS	Baik
							Rainer Server SV110C4	<b>Server 2</b> Maintenance, Sinkronisasi, Otomatis Backup	
							Fujitsu TX 1330 M4	<b>Server 3</b> Backup Data SIPP dan MIS, Aplikasi Lain	Baik

<b>5</b>	Pengadilan Negeri Kuala Kapuas	<a href="http://www.pn-kualakapuas.go.id">www.pn-kualakapuas.go.id</a>	<a href="http://www.sipp.pn-kualakapuas.go.id">www.sipp.pn-kualakapuas.go.id</a>	4.1.1	2.2-2	PT ICON + = 30 Mbps (Dedicated)	Fujitsu RX 1330 M1,dan TX 1330 M4 Fujitsu TX 1330 M4	SIPP, PTSP, MIS	Baik
							Fujitsu TX 1330 M4	Backup Data	Baik
<b>6</b>	Pengadilan Negeri Muara Teweh	<a href="http://www.pn-muarateweh.go.id">www.pn-muarateweh.go.id</a>	<a href="http://sipp.pn-muarateweh.go.id">sipp.pn-muarateweh.go.id</a>	4.1.1	2.2-2	ASTINet Lite 50 Mbps 1:4	Fujitsu RX 1330 M1	SIPP, PTSP, MIS, E-Library, Backup Aplikasi dan Data	Baik
							Fujitsu TX 1330 M4	Back up Aplikasi dan Data	Baik
<b>7</b>	Pengadilan Negeri Kasongan	<a href="http://www.pn-kasongan.go.id">www.pn-kasongan.go.id</a>	<a href="http://www.sipp.pn-kasongan.go.id">www.sipp.pn-kasongan.go.id</a>	4.1.1	2.2-2	ICON+ 20M bps 1:1	Fujitsu RX 100 S7p	SIPP, PTSP, MIS	Baik
							Fujitsu TX 1330 M4	Backup Data	Baik
<b>11</b>	Pengadilan Negeri Buntok	<a href="http://www.pn-buntok.go.id">www.pn-buntok.go.id</a>	<a href="http://www.sipp.pn-buntok.go.id">www.sipp.pn-buntok.go.id</a>	4.1.1	2.2-2	ASTINet 50 Mbps	Fujitsu RX 1330 M1	SIPP,PTSP, MIS,Sinkronisasi	Baik
							Fujitsu TX 1330 M4	Backup Data	Baik
<b>8</b>	Pengadilan Negeri Tamiang Layang	<a href="http://www.pn-tamianglayang.go.id">www.pn-tamianglayang.go.id</a>	<a href="http://www.sipp.pn-tamianglayang.go.id">www.sipp.pn-tamianglayang.go.id</a>	4.1.1	2.2-2	ICON+ 17Mbps 1:1	Fujitsu RX 1330 M1	SIPP,PTSP, MIS,Sinkronisasi	Baik
							Fujitsu TX 1330 M4	Backup Data	Baik
<b>9</b>	Pengadilan Negeri Pulang Pisau	<a href="http://www.pn-pulangpisau.go.id">www.pn-pulangpisau.go.id</a>	<a href="http://www.sipp.pn-pulangpisau.go.id">www.sipp.pn-pulangpisau.go.id</a>	4.1.1	2.2-2	ICON+ 20Mbps 1:1	Fujitsu RX 1330 M2	Server 1(PTSP, SIPP, MIS, ONECLICK, E BESUK DLL)	Baik
							Fujitsu TX 1330 M4	Server 2(Backup Data)	Baik
<b>10</b>	Pengadilan Negeri Nanga Bulik	<a href="http://www.pn-nangabulik.go.id">www.pn-nangabulik.go.id</a>	<a href="http://www.sipp.pn-nangabulik.go.id">www.sipp.pn-nangabulik.go.id</a>	4.1.1	2.2-2	PT ICON + = 20 Mbps (Dedicated)	Fujitsu RX 1330 M1	SIPP,PTSP, MIS,Sinkronisasi	Baik
							Fujitsu TX 1330 M4	Backup Data	Baik
<b>11</b>	Pengadilan Negeri Buntok	<a href="http://www.pn-buntok.go.id">www.pn-buntok.go.id</a>	<a href="http://www.sipp.pn-buntok.go.id">www.sipp.pn-buntok.go.id</a>	4.1.1	2.2-2	PT ICON + = 27 Mbps (Dedicated)	Fujitsu RX 1330 M1	SIPP,PTSP, MIS,Sinkronisasi	Baik
							Fujitsu TX 1330 M4	Backup Data	Baik
<b>12</b>	Pengadilan Negeri Kuala Kurun	<a href="http://www.pn-kualakurun.go.id">www.pn-kualakurun.go.id</a>	<a href="http://www.sipp.pn-kualakurun.go.id">www.sipp.pn-kualakurun.go.id</a>	4.1.1	2.2-2	ASTINet 50 Mbps 1:4 + 60 Mbps Indihome Up To	Fujitsu RX 1330 M1	SIPP,PTSP, MIS,Sinkronisasi	Baik
							Fujitsu TX 1330 M4	Backup Data	Baik

Salah satu pemanfaatan Teknologi informasi adalah diwajibkannya setiap Pengadilan mempunyai website termasuk Pengadilan Tinggi Palangkaraya sendiri.

Dalam era digitalisasi sekarang ini website mempunyai peran sangat penting, karena dengan adanya website akan tercipta transparansi segala kegiatan yang ada di badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, khususnya Peradilan Umum. Melalui website keterbukaan informasi publik maupun keterbukaan pelayanan publik akan mudah diakses oleh masyarakat pengguna pengadilan.

Website Pengadilan Tinggi Palangkaraya dan Pengadilan Negeri se wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palangkaraya adalah sebagai berikut:

### 1. Pengadilan Tinggi Palangkaraya



### 2. Pengadilan Negeri Palangka Raya



### 3. Pengadilan Negeri Sampit

Selasa, 10 Januari 2022

Mahkamah Agung Republik Indonesia  
**Pengadilan Negeri Sampit**  
Jalan HM Arsyad No. 35, Mertawati Baru Kecamatan Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah 74521  
Telp. 0532-212249 / 0532-210088 Email: info@pn-sampit.go.id

W3C | 2D



The screenshot shows the homepage of the Pengadilan Negeri Sampit website. At the top, there's a banner for a general award (Juara Umum) from the High Court of Palangka Raya for the period January 31 to June 25, 2021. Below the banner is a digital certificate for the same award, issued by the Pengadilan Negeri Sampit.

### 4. Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

Selasa, 18 Januari 2022

Mahkamah Agung Republik Indonesia  
**PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN KELAS IB**  
Jalan Sultan Syarif Haji 10, Pangkalan Bun 74111 Telp: (0532) 211614 - Fax: (0532) 211729  
Website : www.pn-pangkalabun.go.id Email : pangkalabunpn@gmail.com  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT - KALIMANTAN TENGAH

W3C | 2D 



The screenshot shows the homepage of the Pengadilan Negeri Pangkalan Bun website. It features a green box titled "STANDAR PELAYANAN PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN" based on a resolution from the court's chairman. The box also includes the court's name and a reference number (W10-U3/046/KPN/KE/2021).

### 5. Pengadilan Negeri Kuala Kapuas

Selasa, Januari 18, 2022

Mahkamah Agung Republik Indonesia  
**Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II**  
Jl. Tambun Bungai No. 55 Kuala Kapuas Kab. Kapuas, Prov. Kalimantan Tengah  
Telp/Fax. 0513-21278

Pilih Bahasa 



The screenshot shows the homepage of the Pengadilan Negeri Kuala Kapuas website. It features a banner for an internal audit report titled "Audit Internal PN Kuala Kapuas Semester II Tahun 2021". The banner includes a video thumbnail showing a meeting room and the text "OPENING MEETING AUDIT INTERNAL PENGADILAN NEGERI KUALA KAPUAS SEMESTER II".

## 6. Pengadilan Negeri Buntok

Selasa, 18 Januari 2022

Mahkamah Agung Republik Indonesia  
**Pengadilan Negeri Buntok Kelas II**  
Jl. Felita Raya No. 20 Klt. Barito Selatan Telp. (0525) 21010 Fax. (0525) 21686  
Email: pn\_buntok@yahoo.co.id; pnbuntok@gmail.com

W3C | 20

H I S F G S P

Beranda Tentang Pengadilan Layanan Publik Layanan Hukum Link Pengadilan Publik Hubungi Kami

**JAM OPERASIONAL PENGADILAN NEGERI BUNTOK**  
Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor STT/RMA/SM/V/2008 Tentang Keterbatasan Penegakan Dikripsi Kewajiban Pelaksanaan Perintah Tuntutan Khusus Kinerja Hakim di Pengadilan Negeri Pada Mahkamah Agung dan Ketua Peradilan Yang Berada Di bawahnya

**JAM KERJA**

MINGGU	SENIN-KAMIS	JUMAT
BUKA	08.00	07.30
ISTIRAHAT	12.00 – 13.00	11.30 – 13.00
TUTUP	16.30	16.30

PENGADILAN NEGERI BUNTOK  
Selasa Petang Raya No. 20 Klt. Barito Selatan  
Telk. (0525) 21686 Fax. (0525) 21010

## 7. Pengadilan Negeri Muara Teweh

Selasa, Januari 18, 2022

Mahkamah Agung Republik Indonesia  
**PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH KELAS II**  
Jalan Setyo Sisingang No. 8 Muara Teweh - Kalimantan Tengah  
Telp./Fax. : (0819) 21044 Email : pnmuaraewehe@zimail.com

PN Muara Teweh @pnmuaraewehe Pengadilan Negeri Muara Teweh

Beranda Tentang Pengadilan Layanan Publik Layanan Hukum Bantuan Hukum Hubungi Kami Pengadilan

**SELAMAT DATANG**

Selamat Datang di Website Resmi Pengadilan Negeri Muara Teweh. Website ini merupakan website pengadilan yang sudah sesuai dengan Pedoman Rancangan dan Prinsip Aksidentalitas Website Pengadilan di Lingkungan Mahkamah Agung

LEBIH LALU/T



## 8. Pengadilan Negeri Kasongan

Mahkamah Agung Republik Indonesia  
**Pengadilan Negeri Kasongan Kelas II**  
Jl. A. Yani (Komplek Parkiran Pemkab Katingan), Katingan, Kalimantan Tengah - 74411  
Telp./Fax.: (0536) 4043610 ; E-mail: pn.kasongan@gmail.com

W3C | 20

Beranda Tentang Pengadilan Layanan Publik Layanan Hukum Bantuan Hukum Hubungi Kami Reformasi Birokrasi

**DOMISILI ELEKTRONIK  
PENGADILAN NEGERI KASONGAN  
(POS-EL)**



1. Email. : pn.kasongan@gmail.com  
2. Whatsapp : 0823 5882 6576  
3. SMS. : 0823 5882 6576

pn-kasongan.go.id pn\_kasongan pn\_kasongan@gmail.com pengadilan\_negeri\_kasongan PN Kasongan Pre Jusiticia

— SELAMAT DATANG DI SITUS RESMI PENGADILAN NEGERI KASONGAN — INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI (IPAK) 3.94 MUIRIDI DARI KORI

## 9. Pengadilan Negeri Tamiang Layang

Selasa, 18 Januari 2022

W3C | 20

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
**PENGADILAN NEGERI TAMIAng LAYANG**  
Jl. A. Yani, No.04 ,Tamiang Layang, Kab.Bartim, Kalimantan Tengah, Tlp.0526-2091-232  
Fax.0526-2091232, E-mail: pntamianglayang@yahoo.co.id

Beranda | Tertanggung Pendeklat | Layanan Publik | Layangan Hukum | Berita | Hubungi Kami | Referral Klinik | Testimoni | Gallery Foto

Akses Informasi Perkara Anda disini

Applikasi yang dirancang dan di desain untuk memudahkan monitoring perkara real time dimana saja dan kapan saja tidak hanya untuk internal tetapi lebih ditujukan kepada para manajer pencatatan.

LEBIH LANJUT

## 10. Pengadilan Negeri Kuala Kurun

Selasa, 18 Januari 2022

Search Language W3C | 20

Mahkamah Agung Republik Indonesia  
**PENGADILAN NEGERI KUALA KURUN**  
Jl. Bayangkara, Tampong Tumbang Arjat, Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah 74571  
e-mail: pnkkurun@gmail.com, Instagram: pnkkurun, Facebook: pengadilannegerkualakurun

WhatsApp | Sosmed

Beranda | Tertanggung Pendeklat | Layanan Publik | Layangan Hukum | Berita | Hubungi Kami | Referral Klinik | Testimoni | Galerry Foto

Lebih Cepat Dengan Gugatan Sederhana

Gugatan sederhana atau small claim court adalah tata cara perintisan di persidangan terhadap gugatan penilaian dengan nilai gugatan matang paling banyak Rp100 juta yang dilaksanakan dengan tata cara dan perintakannya sederhana.

SELENGKAPNYA

## 11. Pengadilan Negeri Pulang Pisau

Search Mahkamah Agung Republik Indonesia

W3C | 20

Mahkamah Agung Republik Indonesia  
**PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU**  
Jl. Trans Kalimantan Km. 86, Gohong, Kecamatan Kohenan Hilir, Kota Pulang Pisau, Kabupaten Pulang Pisau, Kode Pos : 74812 Telp.(05131) 2027518, Fax.(05131) 2027316- Email:pnpulangpisau@gmail.com

Selasa, 18 Januari 2022

Cari informasi | Cari

Beranda | Tertanggung Pendeklat | Layanan Publik | Layangan Hukum | Berita | Hubungi Kami | Referral Klinik | Testimoni | Galerry Foto

Seleksi Calon Penyedia Jasa Bantuan Hukum (POSBAKUM)

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Kelas II Tanggal 22 Desember 2023 Nomor: W16-U11/164/WPN/KR.00/SK/12/2023 tentang Penunjukan Tim Teknis Seleksi Lembaga Penyedia Jasa Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Negeri Pulang Pisau pada tahun anggaran 2023. Dengan ini kami umumkan kepada Lembaga Bantuan Hukum yang bertujuan mengikuti seleksi sebagai Calon Penyedia.

SELENGKAPNYA

1 2 3 4 5 6 7 Next

## 12. Pengadilan Negeri Nanga Bulik



Minimnya tenaga yang mempunyai keahlian di bidang TI, merupakan tantangan tersendiri bagi pengembangan pemanfaatan Teknologi Informasi, karena untuk masa yang akan datang, Teknologi Informasi adalah sarana utama dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing aparat Pengadilan. Pengadilan Tinggi Palangkaraya akan terus mendorong para pegawai di lingkungan Pengadilan Tinggi maupun pegawai di seluruh Pengadilan Negeri se-Kalimantan Tengah untuk senantiasa meningkatkan pengetahuan tentang Teknologi Informasi.

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan e-Court adalah inovasi andalan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam mewujudkan administrasi perkara secara elektronik. SIPP adalah aplikasi teknologi berbasis web dalam memberikan informasi perkara kepada masyarakat. Selain itu SIPP juga bisa digunakan oleh pimpinan untuk memonitor kinerja hakim di daerah. SIPP dibangun sebagai media kerja yang baik dan efektif bagi internal pengadilan, tertib administrasi, efektif dan efisien, monitoring dan pengawasan dan yang terpenting adalah media yang memudahkan masyarakat pencari informasi perkara untuk mengupdate informasi perkaranya dengan mudah, cepat dan berbiaya murah. Sedangkan e-Court adalah sebuah instrumen Pengadilan yang terintegrasi dengan SIPP sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara *online*, pembayaran secara *online*, pengiriman dokumen persidangan (replik, duplik, kesimpulan, dan jawaban), pemanggilan secara *online*, dan penyampaian salinan putusan secara *online*. Dengan aplikasi ini masyarakat melalui kuasanya akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara

## I. Implementasi E-COURT (*The Electronic Justice System*)

Layanan e-Court sudah aktif dan terimplementasi dengan baik pada 370 dari 382 satker Peradilan Umum di Indonesia. Pada 13 Juli 2019 diharapkan seluruh pengadilan di Indonesia sudah menerapkan Layanan e-Court. Untuk itu, Mahkamah Agung berhasil mendapatkan tambahan anggaran sebesar 413 miliar rupiah lewat BA BUN. Tambahan tersebut efektif per 1 Juni 2019 dan mayoritas akan dipergunakan untuk memastikan kesiapan pengadilan-pengadilan menerapkan layanan e-Court.

Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palangkaraya telah mengimplementasi E-Court dengan rincian sebagai berikut :

NO	KETERANGAN PERKARA	JUMLAH
1	Pendaftaran	1995
2	Berhasil Nomor Perkara	1979
3	Perkara Gugatan	1201
4	Perkara Gugatan Sederhana	80
5	Perkara Bantahan	24
6	Permohonan	1086

Pada tanggal 19 Agustus 2020 Ketua Mahkamah Agung meresmikan aplikasi e-court tingkat banding. E-court pengadilan tingkat banding diterapkan pada upaya hukum banding atas putusan-putusan pengadilan tingkat pertama yang sejak awal diproses dengan menggunakan acara secara elektronik. Pada sistem baru ini, pernyataan upaya hukum serta segala proses administrasi permohonan banding termasuk pengiriman berkas perkara banding dilakukan secara elektronik melalui aplikasi e-court oleh pengadilan tingkat pertama kepada pengadilan tingkat banding Pengadilan Tinggi Palangkaraya sebagai pengadilan tingkat banding sudah menerapkan layanan e-Court sejak tanggal 2 November 2020

Pada Tahun 2020 Pengadilan Tinggi Palangkaraya telah menerima Perkara Banding melalui E- Court sebanyak **17** perkara.

## II. SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara)

Kualitas pelayanan publik yang prima merupakan muara dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Terdapat sinergi positif dan hubungan kualitas yang sangat erat antara Reformasi Birokrasi dengan penyelenggaraan pelayanan publik. Hal itu didasarkan pada satu prinsip utama bahwa setiap penyelenggara negara merupakan Pelayanan Publik, dari level tinggi sampai dengan jajaran paling bawah demi terwujudnya good governance.

Begini pentingnya keterbukaan (transparansi) dan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi, maka diciptakanlah sebuah sistem baru yang diberi nama SIPP. SIPP adalah aplikasi teknologi berbasis web dalam memberikan informasi perkara

kepada masyarakat. Selain itu SIPP juga bisa digunakan oleh pimpinan untuk memonitor kinerja hakim di daerah. SIPP dibangun sebagai media kerja yang baik dan efektif bagi internal pengadilan, tertib administrasi, efektif dan efisien, monitoring dan pengawasan dan yang terpenting adalah media yang memudahkan masyarakat mencari informasi perkara untuk mengupdate informasi perkaranya dengan mudah, cepat dan berbiaya murah, karena melalui SIPP mulai dari pendaftaran, perjalanan perkara dan biaya perkara semua bisa ditelusuri oleh masyarakat kapanpun dimanapun

Bahwa dari 11 (sebelas) Pengadilan Negeri di Kalimantan Tengah telah terpasang SIPP versi 4.1.1, dan implementasi SIPP oleh Pengadilan Negeri SeKalimantan Tengah, telah dapat dipantau oleh Pengadilan Tinggi Palangkaraya melalui aplikasi yang disebut dengan Monitoring Implementasi SIPP (MIS) dan berdasarkan Aplikasi MIS yang beralamatkan di <https://badilum.mahkamahagung.go.id/evaluasisipp.html> yang saat ini belum diakses karena masih sedang dalam pengembangan.

Sedangkan statistik dan keadaan penanganan perkara di Pengadilan Tinggi Palangkaraya dan Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palangkaraya adalah sebagai berikut:



### Keadaan Penanganan Perkara Pengadilan Tinggi Palangkaraya Bulan Desember Tahun 2021



# BAB V

## PENINGKATAN

## PELAYANAN PUBLIK

### A. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU

#### PELAKSANAAN AKREDITASI PENJAMINAN MUTU

Program Akreditasi Penjamin Mutu yang telah digagas oleh Badan Peradilan Umum sejak tahun 2015 telah membawa banyak perubahan dalam hal sistem manajemen mutu layanan pengadilan. Perbaikan layanan pengadilan tersebut dirumuskan dalam tujuh kriteria penilaian Akreditasi Penjamin Mutu yang ditetapkan oleh Badan Peradilan Umum. Tujuh kriteria tersebut meliputi: kepemimpinan, perencanaan strategis, fokus pelanggan, manajemen proses, sistem dokumentasi, manajemen sumber daya dan hasil kinerja. Penjelasan rinci mengenai apa saja yang perlu dilakukan oleh setiap stakeholder pengadilan negeri untuk melaksanakan akreditasi telah termuat dalam "Buku Pedoman Praktis Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum" dan telah dibentuk tim khusus untuk menilai akreditasi pengadilan yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1385a/DJU/SK/OT.01.3/09/2016.

Pengadilan Tinggi Palangkaraya mempunyai wilayah hukum se-wilayah Provinsi Kalimantan Tengah yang membawahi 11 (Sebelas) Satuan Kerja yaitu:

1. Pengadilan Negeri Palangkaraya Kelas I A
2. Pengadilan Negeri Sampit Kelas I B
3. Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas I B
4. Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II
5. Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas II
6. Pengadilan Negeri Buntok Kelas II
7. Pengadilan Negeri Tamiang Layang Kelas II
8. Pengadilan Negeri Kasongan Kelas II
9. Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II
10. Pengadilan Negeri Nanga Bulik Kelas II
11. Pengadilan Negeri Pulang Pisau Kelas II

Sejak diraihnya predikat "A" *excellent* oleh Pengadilan Tinggi Palangkaraya pada tanggal 24 Juli 2017, maka sesuai surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI tanggal 05 Mei 2017 Nomor 468/DJU/OT.01.3/5/2017, hal Audit/Asesmen Akreditasi oleh Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Palangkaraya telah melakukan asesmen terhadap pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan

Negeri Kelas I B dan Kelas II di wilayah hukumnya. Sedangkan untuk asesmen Pengadilan Negeri Palangkaraya kelas I A adalah kewenangan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

Pada tahun 2021, Pengadilan Tinggi Palangkaraya telah melakukan asesmen surveilans kepada 10 (sepuluh) satker dibawahnya yakni:

No.	Satker	Pelaksanaan Asesmen	Usulan Nilai
1	Pengadilan Negeri Sampit	16 - 17 Maret 2021	A
2	Pengadilan Negeri Pangkalan Bun	3 - 4 Maret 2021	A
3	Pengadilan Negeri Kuala Kapuas	4 - 5 Maret 2021	A
4	Pengadilan Negeri Muara Teweh	7 - 9 Maret 2021	A
5	Pengadilan Negeri Buntok	15 - 17 Maret 2021	A
6	Pengadilan Negeri Tamiang Layang	11 – 13 Oktober 2021	A
7	Pengadilan Negeri Kasongan	9 – 10 Maret 2021	A
8	Pengadilan Negeri Kuala Kurun	15 – 17 Maret 2021	A
9	Pengadilan Negeri Nanga Bulik	16 – 17 Maret 2021	A
10	Pengadilan Negeri Pulang Pisau	3 – 4 Maret 2021	A

Hasil asesmen telah diajukan kepada Komite Keputusan Akreditasi (KEKA) Pengadilan Tinggi Palangkaraya dan telah dilaksanakan rapat KEKA pada tanggal 11 November 2021. Hasil rapat KEKA tersebut diteruskan kepada TAPM Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum sebagai tahapan selanjutnya yaitu penentuan penilaian akreditasi yang diputuskan dalam suatu rapat KEKA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

Tim asesmen Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum juga telah melakukan asesmen terhadap Pengadilan Tinggi Palangkaraya. Asesmen tersebut dilaksanakan secara *on the spot* yang dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 2021.

Predikat yang diraih oleh Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palangkaraya sejak asesmen yang pertama sampai dengan tahun 2021, berdasarkan hasil KEKA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dengan nilai sebagai berikut:

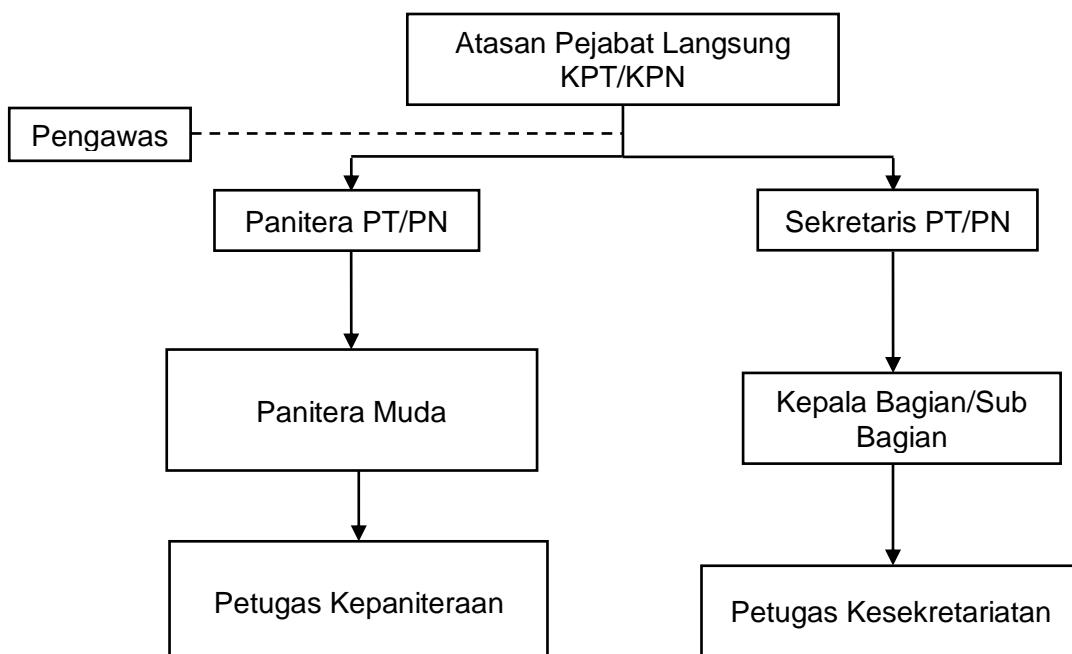
No	Satuan Kerja	Predikat				
		Asesmen I	Asesmen II	Asesmen III	Asesmen IV	Asesmen V
1	Pengadilan Tinggi Palangkaraya	A (14/7/2017)	A (23/7/2018)	A (18/9/2019)	A (6/1/2021)	Menunggu hasil KEKA Badilum
2	Pengadilan Negeri Palangkaraya	A (22/6/2018)	A (18/9/2019)	A (6/1/2021)	Menunggu hasil KEKA Badilum	
3	Pengadilan Negeri Sampit	A (19/7/2017)	A (5/1/2018)	A (29/1/2020)	A (10/3/2021)	Menunggu hasil KEKA Badilum

<b>4</b>	Pengadilan Negeri Pangkalan Bun	A (19/7/2017)	A (5/1/2018)	A (29/1/2020)	A (10/3/2021)	Menunggu hasil KEKA Badilum
<b>5</b>	Pengadilan Negeri Kuala Kapuas	A (31/10/2016)	A (5/3/2019)	A (29/1/2020)	A (10/3/2021)	Menunggu hasil KEKA Badilum
<b>6</b>	Pengadilan Negeri Muara Teweh	A (26/10/2017)	A (15/8/2018)	A (29/1/2020)	A (10/3/2021)	Menunggu hasil KEKA Badilum
<b>7</b>	Pengadilan Negeri Buntok	A (19/7/2017)	A (9/3/2018)	A (29/1/2020)	A (10/3/2021)	Menunggu hasil KEKA Badilum
<b>8</b>	Pengadilan Negeri Tamiang Layang	B (23/7/2018)	B (18/9/2019)	B (10/3/2021)	Menunggu hasil KEKA Badilum	
<b>9</b>	Pengadilan Negeri Kasongan	A (19/7/2017)	A (18/9/2019)	A (29/1/2020)	A (10/3/2021)	Menunggu hasil KEKA Badilum
<b>10</b>	Pengadilan Negeri Kuala Kurun	A (18/9/2019)	A (10/3/2021)	Menunggu hasil KEKA Badilum		
<b>11</b>	Pengadilan Negeri Nanga Bulik	B (18/9/2019)	B (10/3/2021)	Menunggu hasil KEKA Badilum		
<b>12</b>	Pengadilan Negeri Pulang Pisau	B (18/9/2019)	A (10/3/2021)	Menunggu hasil KEKA Badilum		

## B. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)

Dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat, dan pelaksanaan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, maka Pengadilan Tinggi Palangkaraya dan Pengadilan Negeri se Wilayah Kalimantan Tengah telah melaksanakan Sistem Satu Pintu yang dikenal dengan istilah Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) atau *One Gate System*.

Berdasarkan kedua Surat Keputusan tersebut, struktur Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah sebagai berikut:



1. Atasan Pejabat Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah Ketua Pengadilan Tinggi untuk PTSP pada Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Negeri untuk PTSP pada Pengadilan Negeri.
2. Pejabat Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah Panitera dan Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
3. Penanggungjawab pelaksanaan pada setiap Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah masing-masing Panitera Muda dan seluruh Kepala Bagian/Sub Bagian pada Kesekretariatan.
4. Petugas pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah pegawai atau staf Kepaniteraan Muda Perdata/Pidana/Tipikor/PHI yang bertugas pada Meja I, staf

Kepaniteraan Muda Hukum dan staf pada Bagian/Sub Bagian Umum dan Keuangan.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Keterpaduan;
- b. Efektif, Efisien, Ekonomis;
- c. Koordinasi;
- d. Akuntabilitas; dan
- e. Aksesibilitas.

### I. PTSP Pengadilan Negeri.

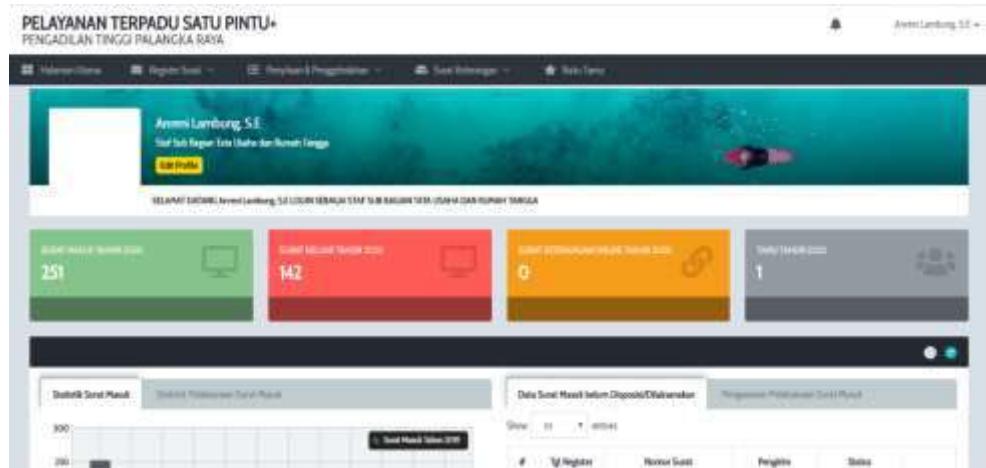
Dalam sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) ini seluruh layanan bagi masyarakat pengguna pengadilan cukup dilayani melalui satu pintu dalam rangka menghindari kontak langsung Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Peradilan dengan masyarakat pengguna pengadilan, sehingga dapat mencegah terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) maupun perbuatan tercela lainnya yang bisa dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;

Sebagian besar layanan yang disediakan di dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) telah dilakukan secara elektronik. Pelayanan dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di semua Pengadilan Negeri pada prinsipnya dibagi menjadi dua bagian/bidang, yaitu:

#### 1. Bidang Kesekretariatan, meliputi:

Bidang Kesekretariatan bertugas untuk menerima dan menyerahkan seluruh surat-surat yang ditujukan dan yang dikeluarkan kesekretariatan Pengadilan Negeri.

Tata persuratan, baik tata kelola surat masuk dan surat keluar sudah menggunakan aplikasi elektronik, telah didokumentasikan/diinput secara elektronik, sehingga memudahkan dan mempercepat dalam pendistribuan surat.



**Register Surat Masuk**

#	Tanggal Registrasi	Nomor Surat	Sifat Surat	Pengirim	Pemohon	Status	Pelaksana	Masa	#
1	14/03/2020	20/03/2020	Rumah	Pengadilan Negeri Palangka Raya	Pengajuan keterangan kelayakan dan tunduk dalam undang-undang tahun 2020	Pendeklarasi	Pendeklarasi Ofis. Amanah Lembang, S.C (Set Sub-Bagian Tata Usaha dan Rambu Tanggap)	0 Hari	
2	14/03/2020	25/03/2020	Rumah	PD Palangka Raya	Pernyataan dalam surat permohonan tunduk perihal perihal perihal No. 18/Pdt.G/2018/PN.PB	Diproses	Kepala Sekretariat	0 Hari	
3	14/03/2020	14/03/2020	Pering	BPS Prov Kalimantan	Pernyataan dalam perihal tunduk perihal perihal 2020	Diproses	Kepala Dikti Akademik Hubungan Internasional	0 Hari	
4	14/03/2020	348/0003	Pering	PA Palangka Raya	Pernyataan dalam perihal	Diproses	Kepala Sekretariat S.H.NH	0 Hari	

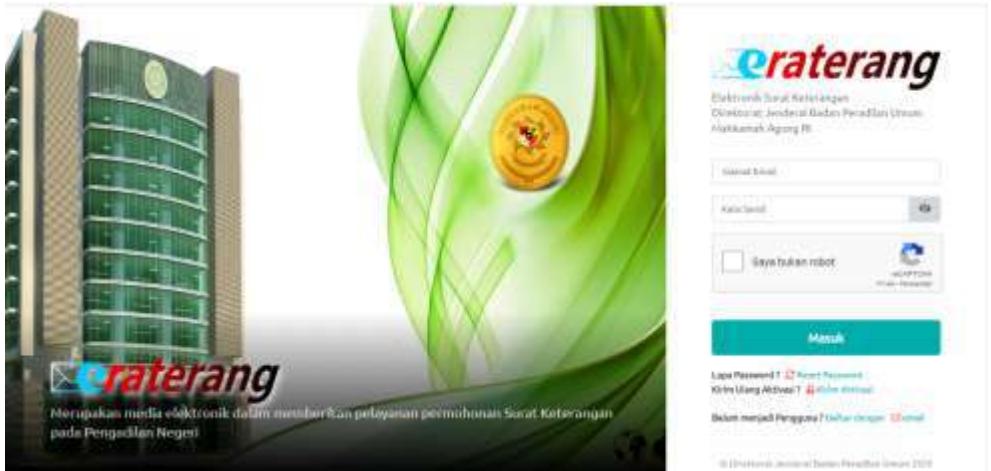
**Register Surat Keluar**

#	Tanggal Registrasi	Nomor Surat	Dari Bagian	Tujuan Surat	Status	Masa	#
1	14/03/2020	WB-UUSAHI/31/IV/2020	Kepatuhan Hukum Pidana	Pengeluar Tagihan	Pendeklarasi	0 Hari	
2	14/03/2020	WB-UUSAHI/24/IV/2020	Kepatuhan Hukum Pidana	Pengeluar Tagihan	Pendeklarasi	0 Hari	
3	14/03/2020	WB-UUSAHI/01/IV/2020	Sub-Bagian Reparasi, dan Teknologi Informasi	Diketahui bahwa surat ini merupakan surat resmi	Pendeklarasi	0 Hari	
4	14/03/2020	WB-UUSAHI/24/IV/2020	Kepatuhan Hukum Pidana	Pengeluar Tagihan	Pendeklarasi	0 Hari	
5	14/03/2020	WB-UUSAHI/24/IV/2020	Kepatuhan Hukum Pidana	PTN Palangka Raya	Pendeklarasi	0 Hari	

## 2. Bidang Kepaniteraan, meliputi:

### a. Kepaniteraan Hukum melayani antara lain:

- Permohonan surat keterangan belum pernah dipidana, layanan ini telah menggunakan aplikasi yang disebut dengan Eraterang, yaitu aplikasi permohonan surat belum pernah dihukum, yang dilayani secara *online*, pemohon tidak perlu datang ke kantor Pengadilan Negeri yang dituju, akan tetapi cukup akses langsung ke situs eraterang melalui eraterang.badirum.mahkamahagung.go.id, kemudian daftar menggunakan akun gmail, dilanjutkan dengan memilih Surat Keterangan yang diinginkan dan Pengadilan Negeri yang di tuju, dan terakhir mengisi semua data formulir yang dibutuhkan. Selanjutnya Pengadilan yang di tuju akan memproses pengajuan Surat Keterangan tersebut, dan akan memberitahukan kepada Pemohon apakah permohonannya diterima atau ditolak. Setelah permohonan diterima, Pemohon dapat mengambil Surat Keterangan Asli di Pengadilan yang di tuju dengan membawa fotokopi dokumen-dokumen pendukung. Aplikasi ini mulai diluncurkan pada bulan Agustus 2019:



- Pengaduan masyarakat, layanan ini juga sudah disediakan secara elektronik (SIWAS) maupun secara manual;



- Permintaan salinan putusan yang telah BHT.
- Pelayanan lain yang menjadi kewenangan Kepaniteraan Hukum.

b. Kepaniteraan Pidana/Kekhususan, melayani antara lain:

- Menerima berkas perkara pidana biasa, tipikor.
- Persetujuan/ijin Penggeledahan dan Penyitaan
- Permohonan perpanjangan penahanan dari Penyidik/Penuntut Umum.
- Permohonan upaya hukum, banding, kasasi dan PK
- Pelayanan lain yang menjadi kewenangan Kepaniteraan pidana/kekhkususan;

c. Kepaniteraan Perdata/Kekhususan, melayani antara lain:

- Menerima berkas perkara gugatan perdata, PHI dan permohonan. Layanan ini telah disediakan secara elektronik yang dikenal dengan istilah E-Court atau peradilan elektronik, sebagai implementasi dari Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik;.

E-court yang telah diberlakukan di seluruh Pengadilan Negeri se-Kalimantan Tengah meliputi kegiatan :

- 1) Pendaftaran (E-filling)
- 2) Pembayaran (E-payment)
- 3) Pemanggilan (E-Summons)
- 4) Persidangan (E-Litigasi)

E-court melayani perkara, antara lain:

- 1) Permohonan
- 2) Gugatan dan
- 3) Bantahan (*derden/ partij Verzet*)

- Menerima permohonan upaya hukum, banding, kasasi dan PK;  
- Pelayanan lain yang menjadi kewenangan Kepaniteraan Perdata/Kekhususan.

d. Pojok E-Court (E-court Corner)

Pojok E-court atau Meja E-Court melayani masyarakat yang ingin memperoleh penjelasan tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan E-court, termasuk membantu masyarakat awam yang akan mengajukan gugatan/permohonan/bantahan, akan tetapi tidak bisa menggunakan IT (Gaptek);

e. Meja Inzage

Meja Inzage wajib disediakan di setiap Pengadilan Negeri, yang berfungsi sebagai tempat para pihak untuk mempelajari berkas perkara, baik dalam proses persidangan maupun dalam proses mengajukan upaya hukum Banding; Untuk semua Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di semua Pengadilan se-Kalimantan Tengah menyediakan layanan yang sama sebagaimana terurai di atas. Sedangkan Pengadilan Negeri Palangkaraya sebagai Pengadilan Negeri Kelas IA, di samping menyediakan layanan sebagaimana tersebut di atas, juga menyediakan layanan perkara PHI dan Tindak Pidana Korupsi;

## II. PTSP Pengadilan Tinggi Palangkaraya

Meskipun tidak melayani masyarakat secara langsung, Pengadilan Tinggi Palangkaraya juga menyediakan meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Layanan PTSP Pengadilan Tinggi Palangkaraya, meliputi:

1. Bagian Kesekretariatan

Layanan ini menerima dan menyerahkan seluruh surat-surat yang ditujukan dan yang dikeluarkan kesekretariatan Pengadilan Negeri. Tata kelola persuratan juga telah dilakukan secara elektronik yang menggunakan aplikasi;

2. Bagian Kepaniteraan

a. Kepaniteraan Hukum:

- Pengaduan.

- Untuk Pengaduan meskipun telah tersedia aplikasi pengaduan secara online, meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) juga melayani pengaduan secara langsung;
- E-Buku Tamu.  
Setiap tamu yang datang ke Pengadilan Tinggi Palangkaraya harus diregister secara manual dan elektronik, dengan persetujuan pimpinan Pengadilan;
  - Pendaftaran Penyumpahan Advokat.  
Bagi organisasi yang akan mendaftarkan anggotanya untuk disumpah sebagai advokat, selain telah disediakan aplikasi pendaftarannya, juga dilayani langsung di meja PTSP;
  - Permohonan Informasi  
Masyarakat dapat mengajukan permohonan informasi melalui petugas pada Meja PTSP di Pengadilan Tinggi Palangkaraya, Pengadilan Tinggi memberikan jawaban dapat ditindaklanjuti atau tidaknya permohonan informasi.
  - Ijin Penelitian  
Untuk mahasiswa atau akademisi yang akan melakukan penelitian di seluruh Pengadilan Negeri se-Kalimantan Tengah. Untuk memudahkan masyarakat dalam menggunakan layanan ini, Pengadilan Tinggi Palangkaraya mempunyai Inovasi Pelayanan SIPRES, sehingga mahasiswa atau akademisi yang akan melakukan penelitian tidak harus datang ke kantor Pengadilan Tinggi Palangkaraya tapi cukup mengupload data yang dibutuhkan lewat aplikasi SIPRES.
  - Meja E-Court.  
Meja E-Court di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Tinggi Palangkaraya melayani membantu advokat dalam rangka validasi sebagai pengguna terdaftar E-Court.

Berdasarkan surat keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas Di Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri. Bahwa dalam rangka memberikan Pelayanan Prima terhadap kaum difabel/penyandang disabilitas yang berurusan di Pengadilan Tinggi Palangkaraya maka telah disediakan Layanan Prioritas bagi masayarakat pencari keadilan penyandang disabilitas.

Pengadilan Tinggi Palangkaraya telah menetapkan Duta Difabel yang bertugas memberikan pendampingan terhadap Kaum Difabel/Penyandang Disabilitas selama berada di gedung Pengadilan Tinggi Palangkaraya dan membantu penyelesaian layanan yang dimohonkan baik Layanan PTSP maupun dalam proses persidangan.

Hal ini bertujuan guna meningkatkan performa pelayanan dan dalam rangka memberikan Pelayanan Prima bagi Kaum Difabel/Penyandang Disabilitas. Dengan demikian, semakin menyempurnakan Pengadilan Tinggi Palangkaraya sebagai Pengadilan yang Inklusi

Berdasarkan surat keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 18 Oktober 2021 Nomor : 1152/DJU/KP.05.8/10/2021 telah ditetapkan Pengadilan Tinggi Palangkaraya sebagai Juara Kedua Kategori Terbaik Pengadilan Tinggi dalam rangka Lomba Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021 dan Pengadilan Negeri Sampit Kelas IB sebagai juara harapan ketiga kategori kelas Pengadilan Negeri Kelas IB Lomba PTSP yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI.

Prestasi ini sebagai bagian mempertahankan kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang pada tahun 2020 juga telah memperoleh Prestasi Juara Kedua Kategori Terbaik Pengadilan Tinggi

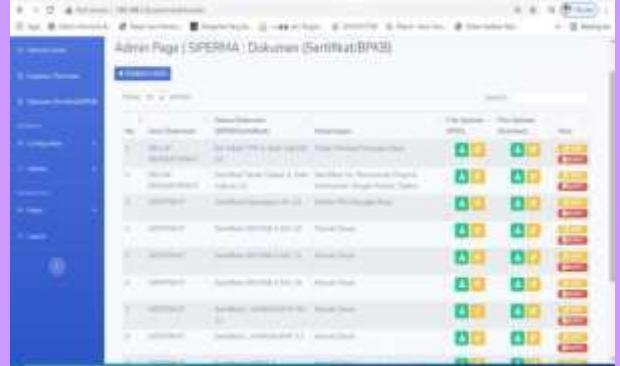
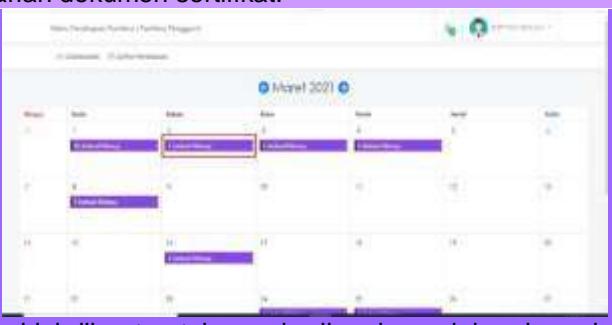
## C. INOVASI PELAYANAN PUBLIK

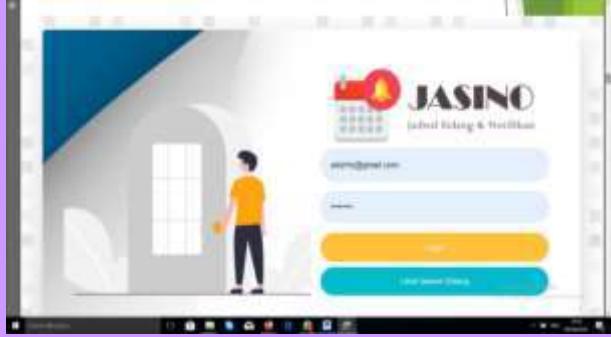
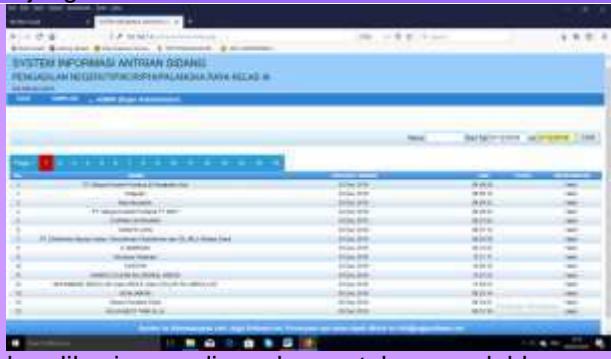
Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman telah menggariskan bahwa "Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan". Oleh karena itu sejalan dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, Pengadilan Tinggi Palangkaraya dan seluruh Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palangkaraya terus membangun inovasi pelayanan publik berbasis teknologi informasi dalam rangka untuk mempermudah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pengguna pengadilan, sekaligus untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Inovasi pelayanan publik berbasis teknologi informasi tersebut dibangun dengan berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan *juncto* Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-144/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan

Adapun Inovasi pelayanan publik berbasis teknologi informasi yang sudah tersedia pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya dan Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palangkaraya sampai akhir Tahun 2021, meliputi:

### A. Pengadilan Negeri

No	Pengadilan Negeri	Jenis Inovasi	Penjelasan
1	Pengadilan Negeri Palangkaraya	Aplikasi SIPERMA	 <p>Aplikasi ini diperuntukkan untuk reminder kegiatan pemeliharaan kendaraan dinas dan untuk penyimpanan dokumen softcopy dari sertifikat agar dapat memudahkan pencarian dokumen sertifikat.</p>
		AMANDOK	 <p>Aplikasi ini dibuat untuk memberikan kemudahan kepada para pegawai terutama panitera pengganti dalam menjalankan tugas dan fungsinya sehingga pekerjaan yang semula dilakukan secara manual dapat dilaksanakan secara efektif</p>

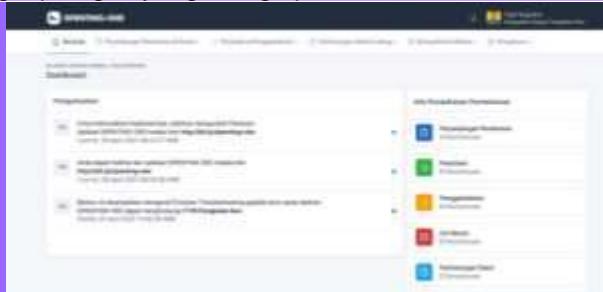
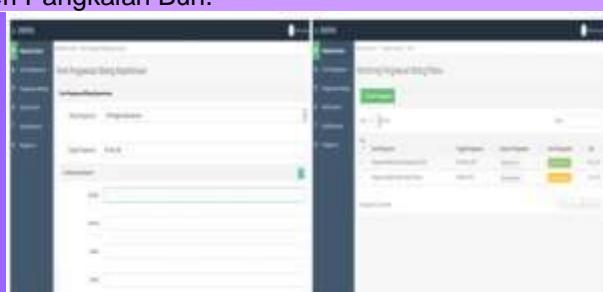
			<p>dan efisien dengan menggunakan sistem digital. Aplikasi ini bertujuan untuk menimbulkan keterlambatan penyerahan dokumen penetapan dari panitera pengganti kebagian kepaniteraan pidana.</p>
		APLIKASI JASINO (Jadwal Sidang dan Notifikasi)	 <p>Aplikasi ini digunakan untuk mengetahui jadwal sidang yang telah ditentukan/ didaftarkan oleh majelis hakim ketika masyarakat/ pengguna pengadilan telah mendaftarkan perkara mereka, pada saat bersamaan ketika jadwal sidang sudah dimasukkan/ditentukan waktunya, akan otomatis muncul pada display ruang tunggu sidang, sehingga akan memudahkan para pencari keadilan mengetahui jadwal sidang dan waktu tunggu yang diperlukan berdasarkan perkiraan yang telah ditetapkan pada saat penginputan waktu pelaksanaan sidang dan ruang sidang. Adapun aksesnya melalui <a href="http://192.168.1.3/jasino">http://192.168.1.3/jasino</a></p>
		MESIN ANTRIAN PTSP	 <p>Adalah alat yang digunakan untuk antrian PTSP agar pelayanan dapat berjalan secara efektif dan efisien dengan cara melayani secara berurutan sesuai dengan kedatangan pengunjung</p>
		ANTRIAN SIDANG	 <p>Adalah aplikasi yang digunakan untuk memudahkan mendata dan memanggil para pihak yang hadir dan siap untuk disidangkan sesuai dengan antrian sidang.</p>

		APLIKASI TERRAGUNO	
2	<b>Pengadilan Negeri Sampit</b>	Aplikasi Gesit+ (Geledah, Sita + Perpanjangan Penahanan dan Izin Besuk)	 <p>GESIT+ adalah inovasi peningkatan layanan publik di Pengadilan Negeri Sampit yang berbasis web base. Gesit+ merupakan aplikasi yang berfungsi sebagai alat bantu (tool) dalam penerimaan pengajuan layanan yang harus dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Sampit</p>

		ASIAP (Aplikasi Sistem Informasi Pengaduan)		ASIAP (Aplikasi Sistem Informasi Pengaduan), merupakan aplikasi yang dikembangkan untuk memberikan layanan kepada masyarakat para pencari keadilan agar memudahkan untuk menyampaikan Pengaduan Terhadap indikasi terjadinya Pelanggaran terhadap Kode Etik dan pedoman perilaku Hakim, Pelanggaran Kode Etik dan pedoman perilaku Panitera dan Jurusita, Pelanggaran terhadap Kode Etik dan kode perilaku pegawai Aparatur Sipil Negara, Pelanggaran hukum acara atau Pelanggaran terhadap disiplin Pegawai Negeri Sipil atau peraturan disiplin administrasi dan pelayanan publik dan/atau Pelanggaran pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sampit.
		Pojok Edukasi Anti Korupsi (PEDATI)		Bahwa Pengadilan Negeri Sampit bekerjasama dengan KPPN Sampit yang telah memiliki inovasi Layanan Penyuluhan Anti Korupsi (LAPAK) KPPN Sampit selain sebagai Mitra Kerja juga memiliki Sinergi yang sama dalam Pembangunan Zona Integritas dalam mempertahankan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) menuju Wilayah Birokrasi, Bersih dan Melayani (WBBM), dimana terdapat pegawai KPPN Sampit yang telah mendapat sertifikasi kompeten sebagai Penyuluhan Anti Korupsi dari Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) KPK. Dalam implementasinya telah dilaksanakan Penyuluhan Anti Korupsi di SMA Negeri 1 Sampit pada tanggal 23 Desember 2021.
		e-OFFICE LAYANAN DISABILITAS		Penyediaan Sarana dan Prasarana/Fasilitas Ramah Disabilitas guna mewujudkan Pengadilan Inklusif (Disabilitas) dengan memberikan layanan dan perlindungan secara menyeluruh terhadap penyandang disabilitas tanpa diskriminasi pada Pengadilan Negeri Sampit

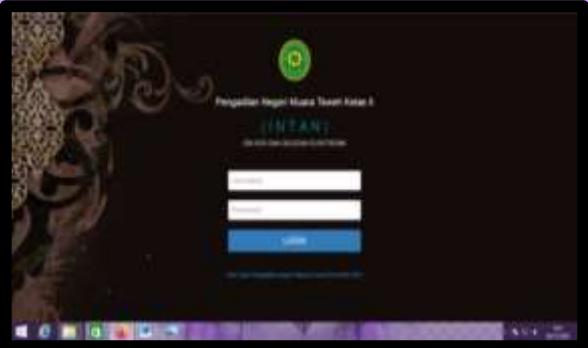
3	Pengadilan Negeri Pangkalan Bun	Pembayaran elektronik (Mesin EDC)	 <p>Demi kemudahan pembayaran biaya panjar perkara melalui e-Payment pada aplikasi e-Court disediakan mesin EDC untuk pembayaran virtual account. Dengan adanya mesin aplikasi ini memudahkan pencari keadilan dalam melakukan pembayaran karena tidak perlu jauh-jauh ke ATM atau Bank.</p>
		Layanan khusus Penyandang Disabilitas	      <p>Pengadilan Negeri Pangkalan Bun menyiapkan fasilitas khusus untuk para penyandang disabilitas. Fasilitas ini disiapkan untuk memudahkan difabel selama berada di terminal tersebut. Kemudahan bagi difabel sudah ada sejak tempat turun penumpang (drop zone). Untuk penyandang disabilitas diberikan tempat khusus parkir kendaraan yang diberi warna biru. Kemudian disediakan juga <i>guiding block</i> dan <i>warning block</i> untuk menuju ruang PTSP maupun ruang Sidang. Pada ruang PTSP dan ruang Sidang disediakan tempat khusus bagi penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda. Selain itu untuk juga disediakan sehingga memudahkan para penyandang disabilitas untuk mendapatkan akses ke toilet. Disamping itu disediakan juga fasilitas pendukung seperti kursi roda, tongkat jalan, walker, buku braille dan alat bantu dengar.</p>

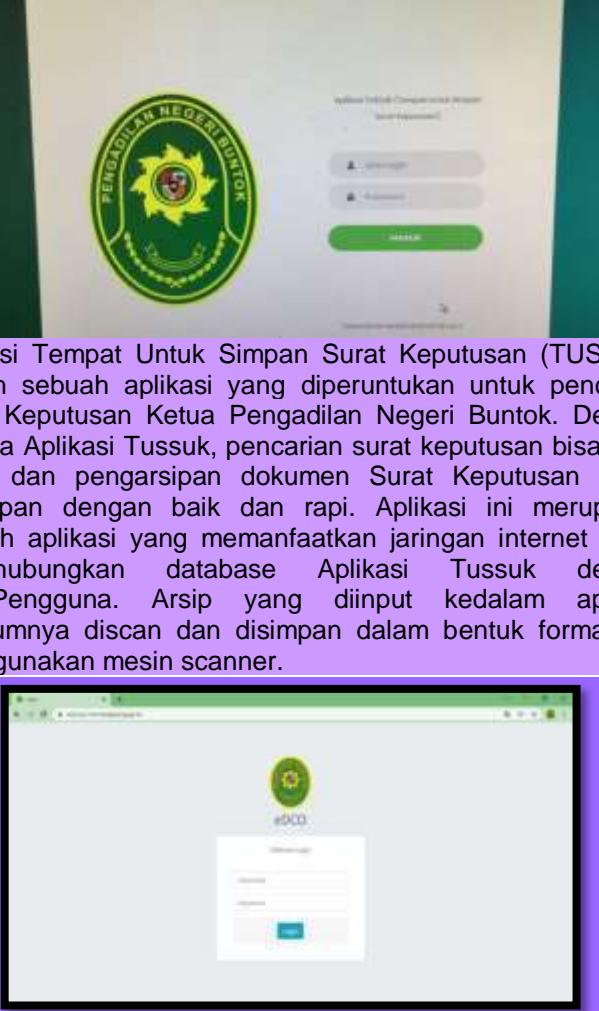
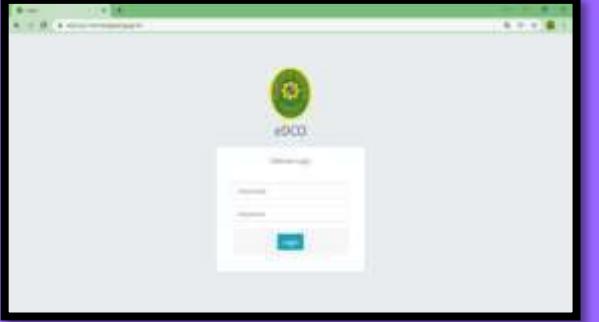
		Protokoler Persidangan		Pengadilan Negeri Pangkalan Bun mempunyai petugas sidang yang memang ditunjuk dan bertugas mengurus protokoler persidangan. Petugas sidang ini bukan hanya sekedar menjadi sebagai petugas pengankat Kitab Suci untuk saksi yang bersumpah, akan tetapi justru harus diberi peran besar untuk mengkoordinir jadwal sidang dan mengatur kelancaran jadwal sidang dengan memastikan kehadiran para pihak.
		Aplikasi Pemanggilan Persidangan		Aplikasi ini berfungsi untuk mengubah tulisan menjadi suara sehingga bisa membuat pengumuman panggilan sidang yang akan diperkeras melalui speaker di ruang tempat pengunjung.
		Pengumuman Denda Tilang Online		Aplikasi yang membantu untuk melakukan pencarian denda tilang secara online pada website Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sehingga bisa diakses dimana saja. Pengumuman Denda Tilang Online beralamatkan di tilang.pn-pangkalabun.go.id.
		Sidang di Luar Gedung Pengadilan (Zetting Platz)		Sidang pengadilan yang dilaksanakan di luar gedung pengadilan yang diperuntukan bagi masyarakat yang mengalami hambatan untuk datang ke kantor pengadilan karena alasan jarak, transportasi dan biaya.

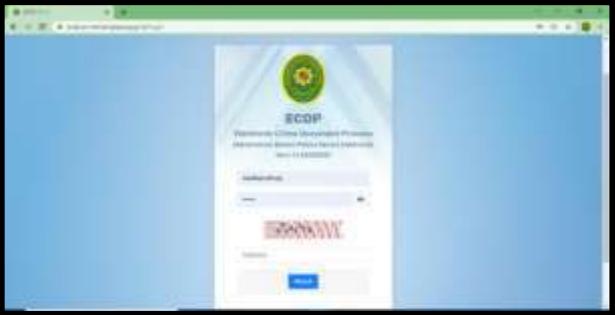
		Aplikasi Perpustakaan Online		<p>Aplikasi Perpustakaan Online adalah aplikasi yang digunakan untuk pengelolaan buku perpustakaan mulai dari arsip, peminjaman buku ataupun pengembalian buku secara elektronik. Aplikasi ini dikelola oleh Petugas Pustakawaan sebagai petugas yang menginput kedalam sistem.</p>
		SIPENTING-OKE		<p>Aplikasi SIPENTING-OKE adalah Sistem Informasi Pelayanan Terintegrasi Pengadilan, Kepolisian, Kejaksaan dan Lembaga Permasyaliratan. Dengan adanya aplikasi ini permohonan pendaftaran dapat dilakukan secara online tanpa langsung ke Pengadilan Negeri Pangkalan Bun. Aplikasi ini terdiri dari Permohonan Perpanjangan Penahanan, Diversi, Penyitaan, Penggeledahan, Perlindungan Saksi, Izin Lelang dan besuk.</p>
		Assisten Virtual Informasi dan Layanan (AVILA)		<p>Pengadilan Negeri Pangkalan Bun terus memberikan layanan informasi kepada masyarakat melalui Assistent Virtual yang terhubung dengan whatsapp yang dikelola oleh Petugas layanan PTSP. Hal tersebut dilakukan karena aplikasi whatsapp yang sangat mudah untuk dijangkau dan dioperasikan oleh pengguna. Pencari keadilan dapat mengakses Assistent Virtual melalui website Pengadilan Negeri Pangkalan Bun.</p>
		SIMPAN (Sistem Informasi Manajemen Pengawasan)		<p>Aplikasi SIMPAN atau Sistem Informasi Manajemen Pengawasan adalah Aplikasi Manajemen arsip dan monitoring</p>

			<p>laporan pengawasan secara elektronik mulai dari Pengawasan Bidang, Audit Internal dan Audit Eksternal yang terdiri dari Pengawasan Tingkat Banding maupun Bawas. Sehingga dengan aplikasi ini dapat melihat apakah laporan pengawasan sudah ditindaklanjuti atau belum.</p>
	e-Pelayanan		 <p>Aplikasi e-Pelayanan atau Pelayanan elektronik adalah aplikasi yang berfungsi untuk menginput atau register pelayanan yang diberikan pada petugas PTSP yang terdiri dari Pelayanan Pidana, Perdata dan Hukum. Dengan adanya aplikasi ini dapat membantu petugas pelayanan atau PTSP sehingga tidak perlu lagi menggunakan register pelayanan secara manual.</p>
			 <p>Aplikasi Antrian PTSP Pengadilan Negeri Pangkalan Bun adalah aplikasi antrian buat pengunjung para pencari keadilan yang berkepentingan terkait dengan bagian meja hukum,perdata,pidana dan umum. Masyarakat atau pengguna layanan yang datang dapat mengambil nomor antrian pada komputer touchscreen yang disediakan oleh Pengadilan Negeri Pangkalan Bun kemudian dapat menunggu sampai nomor antrian dipanggil.</p>
			 <p>PTSP Online PTSP Online adalah Pelayanan Petugas Pelayanan Satu Pintu secara virtual yang terintegrasi dengan aplikasi Zoom Meeting dengan tautan yang tersedia. Pengguna Layanan diwajibkan melakukan registrasi terlebih dahulu sebelum terhubung kepada Petugas PTSP Pengadilan Negeri Pangkalan Bun.</p>

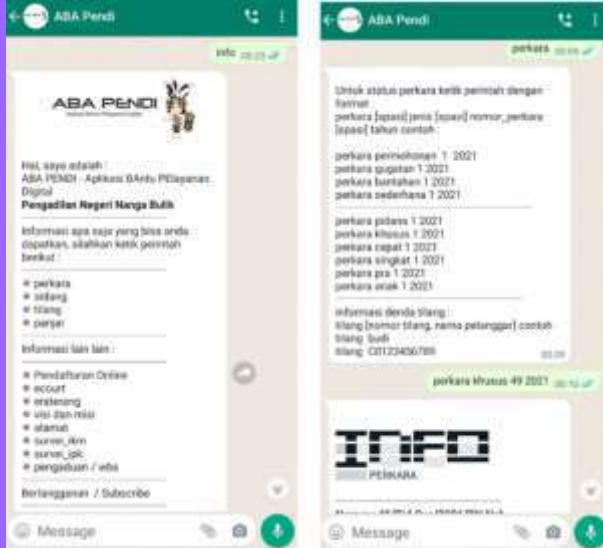
4	Pengadilan Negeri Kuala Kapuas	Pelita Online		
		SIMETRI		
		SI-ANIK		
		SIJAMBANG		
		SIMARS		

5	Pengadilan Negeri Muara Teweh	APLIKASI ( INTAN ) IZIN SITA DAN GELEDAH ELEKTRONIK	 <p>INTAN adalah sebuah aplikasi digital berbasis web yang akan memberikan informasi dan ruang untuk permohonan izin/persetujuan penyitaan dan penggeledahan kepada Pengadilan Negeri Muara Teweh. Aplikasi ini memberi kemudahan bagi stakeholder eksternal, terutama Penyidik Kepolisian ketika hendak mengajukan permohonan izin/persetujuan penyitaan dan penggeledahan, karena tidak perlu datang ke Pengadilan Negeri Muara Teweh untuk menyampaikan permohonannya, melainkan cukup mengupload permohonannya di aplikasi INTAN.</p>
		Aplikasi Sistem Laporan Pengawasan (Si-Lawas Pedang)	 <p>Aplikasi Sistem Laporan Pengawasan Bidang (Si- Lawas Pedang) Merupakan aplikasi yang dibuat untuk memberikan kemudahan dalam pengelolaan pelaporan Pengawas Bidang. Aplikasi ini juga memudahkan seluruh pegawai Pengadilan Negeri Muara Teweh dalam mencari laporan hasil pengawasan dari tingkat rapat bagian, rapat kesekretariatan dan Kepaniteraan, rapat bulanan, maupun laporan-laporan hasil pengawas bidang. Dengan adanya aplikasi Si- Lawas Pedang ini, lebih memudahkan kontrol pengawas oleh level pimpinan.</p>
		Aplikasi SIPANDA	 <p>Sistem Penyimpanan Data (SIPANDA) adalah Sebuah aplikasi digital yang akan memberikan informasi dan ruang untuk tempat penyimpanan arsip pengadilan. Aplikasi ini memberi kemudahan bagi seluruh pegawai Pengadilan Negeri Muara Teweh untuk menyimpan dan mencari arsip dokumen yang dibutuhkan baik itu dalam bentuk Pdf maupun dalam bentuk file mentahnya (Word atau Excel). Setiap surat atau file yang diupload kedalam Aplikasi Sistem Penyimpanan Data (SIPANDA) akan tersimpan didalam server database.</p>

6	Pengadilan Negeri Buntok	Ms. EVA	 <p>"EVA (Executive Virtual Assistance)" adalah merupakan agen perangkat lunak yang dapat melakukan tugas atau layanan individu berdasarkan perintah atau permintaan masyarakat pencari keadilan yang ingin mendapatkan informasi tentang pelayanan di Pengadilan Negeri Buntok Kelas II.</p>
7	Pengadilan Negeri Tamiang Layang	Aplikasi Electronic Document Control (eDCO)	 <p>Aplikasi Tempat Untuk Simpan Surat Keputusan (TUSSUK) adalah sebuah aplikasi yang diperuntukan untuk pencarian Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Buntok. Dengan adanya Aplikasi Tussuk, pencarian surat keputusan bisa lebih cepat dan pengarsipan dokumen Surat Keputusan dapat tersimpan dengan baik dan rapi. Aplikasi ini merupakan sebuah aplikasi yang memanfaatkan jaringan internet untuk menghubungkan database Aplikasi Tussuk dengan User/Pengguna. Arsip yang diinput kedalam aplikasi sebelumnya discan dan disimpan dalam bentuk format pdf menggunakan mesin scanner.</p>
7	Pengadilan Negeri Tamiang Layang	Aplikasi Electronic Document Control (eDCO)	 <p>Electronic Document Control atau disingkat eDCO adalah aplikasi berbasis teknologi informasi yang meliputi kegiatan pengarsipan dokumen-dokumen yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Tamiang Layang terkait dengan program Reformasi Birokrasi (RB), Akreditasi Penjamin Mutu (APM) dan Zona Integritas(ZI)</p>

	Aplikasi Electronic Crime Document Process (eCDP)		Electronic Crime Document Process atau disingkat eCDP adalah aplikasi berbasis teknologi informasi yang meliputi kegiatan-kegiatan permohonan ijin penggeledahan, permohonan ijin penyitaan, permohonan persetujuan sita, permohonan perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri serta ijin penyadapan, baik pada tahap penyelidikan maupun penyidikan yang bersifat mandiri
	Aplikasi Elektronik Leave Permission System (eLEAPS)		Electronic Leave Permission System atau disingkat eLEAPS adalah aplikasi berbasis teknologi informasi yang meliputi proses pemberian ijin cuti bagi pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Tamiang Layang Kelas II
	Layanan Cepat Perkara Perdata Permohonan Tertentu Dengan Pembebasan Biaya Proses Tertentu (RAPID SERVICES)		Program Unggulan Layanan Cepat Perkara Perdata Permohonan Tertentu Dengan Pembebasan Biaya Proses Tertentu (RAPID SERVICES). Program layanan cepat ini merupakan akronim dari Program Khusus Layanan Cepat (Rapid Service) perkara perdata Permohonan di Pengadilan yaitu kegiatan layanan khusus terhadap jenis perkara perdata permohonan tertentu yang ditentukan dalam peraturan ini dengan ketentuan layanan, penyelenggaraan serta penyelesaiannya dilakukan dalam waktu kurang dari 24 jam yang merupakan program unggulan atau disebut juga program one day service

8	Pengadilan Negeri Kasongan	Penerapan Minuman Kompensasi		
		Sebagai bentuk penerapan Zona Integritas Pengadilan Negeri Kasongan telah menerapkan Minuman Kompensasi. Apabila penerima layanan tidak menerima senyum, sapa, salam serta pelayanan tidak sesuai dengan standart pelayanan maka penerima layanan berhak atas minuman kompensasi.		
		Mesin EDC dan Komputer Khusus Era Terang		Gambar di atas Inovasi PN Kasongan dengan menerapkan Pembayaran Biaya Panjar Perkara dengan menggunakan mesin EDC BRI. Dengan ini, Pelayanan Publik lebih mudah, aman dan Cepat di Pengadilan Negeri Kasongan ) serta untuk mendukung Program Mahkamah Agung Komputer Khusus "Era Terang" Disiapkan Pada Ruangan Pengunjung Yang Nyaman
		E-Brosur Pelayanan dan Survei		Pengadilan Negeri Kasongan terus berinovasi dengan membuat e-brosur pelayanan sesuai dengan kemajuan IT untuk mempermudah para pencari keadilan yang membutuhkan brosur (paper-less) secara lebih praktis dan mudah. Hanya dengan me-scan barcode tersebut e-brosur dapat diperoleh dengan sangat mudah dan masyarakat pencari keadilan dapat menyiapkan segala persyaratan yang dibutuhkan berkaitan dengan layanan peradilan.

9	<b>Pengadilan Negeri Kuala Kurun</b>	Informasi Stiker dan QRcode Berbasis WEB	 <p>Informasi Stiker dan QRcode Berbasis WEB di Pengadilan Negeri Kuala Kurun merupakan aplikasi menggunakan google drive yang dilinkan menggunakan QRcode yang dapat di akses melalui Handphone Android. Stiker informasi dapat menjadi salah satu cara terbaik untuk memberikan informasi tambahan bagi penerima kendala pengguna BMN, dan juga dapat digunakan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan kepada pengguna barang. Kemungkinan terjadinya peningkatan pengetahuan terhadap barang yang digunakan. Pada Stiker Informasi &amp; Qrcode terdapat Informasi tata cara penanganan Barang Milik Negara dan pelaporan Barang Milik Negara (Pelaporan barang rusak).</p>
10	<b>Pengadilan Negeri Nanga Bulik</b>	ABA PENDI	 <p>Aplikasi Virtual Assistant ABA PENDI (Aplikasi BAntu PElayanaN Digital) merupakan aplikasi berbasis WhatsApp yang berguna untuk masyarakat pencari keadilan untuk dapat mengetahui cara pendaftara (ecourt), eraterang, status dan detail perkara. Virtual Assistant tersebut bisa diakses melalui link <a href="https://wa.me/6282350442244">https://wa.me/6282350442244</a> atau dapat menghubungi nomor WhatsApp di 082350442244. Kemudian ketik info, help atau bantuan untuk mengakses menu utama.</p>

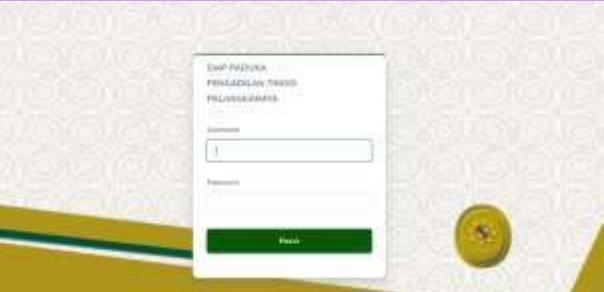
	APPSIDAH		APPSIDAH (Aplikasi Permohnan Sita Dan GeleDAH) merupakan aplikasi yang dikembangkan untuk bertujuan mempermudah dan mempersingkat waktu permohonan izin dan persetujuan sita, geledah, perpanjangan penahanan, serta juga permohonan diversi. Selain itu dengan adanya APPSIDAH, dapat mengurangi kontak fisik terutama untuk mendukung program pemerintah dalam menangani pandemi covid-19. APPSIDAH dapat diakses melalui link <a href="http://appsidah.pn-nangabulik.go.id/">http://appsidah.pn-nangabulik.go.id/</a> .
	SILAPOR		Aplikasi Berbasis Web yang berfungsi sebagai wadah informasi dokumen pelaporan yang ada di Pengadilan Negeri Nanga Bulik. SILAPOR dapat diakses melalui link <a href="http://www.silapor.pn-nangabulik.go.id/">http://www.silapor.pn-nangabulik.go.id/</a> .
	SIAPP		Aplikasi Desktop yang berfungsi sebagai media Arsip Perkara yang ada di Pengadilan Negeri Nanga Bulik. Dengan adanya Aplikasi SIAP diharapkan dapat membantu Aparatur dalam hal pengarsipan Berkas Perkara yang ada di Pengadilan Nanga Bulik. Selain itu juga dapat memudahkan dalam pencarian Data Arsip Perkara sehingga menghemat waktu pencarian.
11	Pengadilan Negeri Pulang Pisau	ZONA EDUKASI	 <p>Pengadilan dalam Pelayanan Kepada Masyarakat telah memberikan Zona Internet Gratis Untuk Anak Sekolah Setiap Harinya dan telah dilakukan sosialisasikan melalui Banner pada Pengadilan negeri Pulang Pisau yang bisa diakses Masyarakat</p>

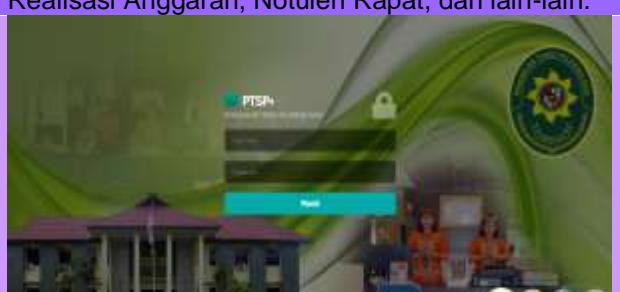
		KEGIATAN PENGADILAN ON AIR MEDIA	  <p>Pengadilan Negeri Pulang Pisau telah bekerjasama dalam mengenalkan Pengadilan Negeri Pulang Pisau kepada masyarakat. Kerjasama ini tertuang didalam MoU dengan Radio Lokal Pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau, dimana Pengadilan Memberikan Informasi Mengenai Layanan Pengadilan tiap 1 Bulan sekali.</p>
		APLIKASI LEWU BAHALAP	 <p>Aplikasi Lewu Bahalap adalah aplikasi eksternal yang dipersembahkan untuk masyarakat dalam layanan layanan terkait seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Permintaan Permohonan Magang</li> <li>- Permintaan Permohonan Penelitian</li> <li>- Permintaan informasi</li> <li>- Permintaan Pengembalian Panjar Perkara</li> <li>- Permintaan Layanan Pos Bantuan Hukum secara online</li> <li>- Permintaan Permohonan Surat Kuasa Insidentil</li> </ul>
		SILEHA	 <p>Aplikasi SILEHA adalah aplikasi eksternal yang dipersembahkan kepada stakeholders misalkan Kejaksaan dan Kepolisian dalam hal:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Permohonan Penyitaan</li> <li>- Permohonan Penggeledahan</li> <li>- Permohonan Perpanjangan Penahanan</li> </ul>

## B. Pengadilan Tinggi Palangkaraya

No	Kategori	Jenis Inovasi	Penjelasan
1	<b>EKSTERNAL</b>	Sistem Informasi Promosi, Pangkat, Pensiu dan Mutasi (SIP3M)	 <p>Aplikasi ini dibuat agar para pegawai pada satuan kerja diruang lingkup Pengadilan Tinggi Palangkaraya dapat memonitor dan melihat perkembangan usulan yang diajukan melalui Pengadilan Tinggi Palangkaraya.</p>
		Sistem Informasi Penelitian, Riset dan Studi (SIPRES)	 <p>Aplikasi SIPRES ini dibuat dan diperuntukkan oleh para pelajar yang ingin melakukan Penelitian, Riset dan Studi/Praktik Lapangan baik di Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palangkaraya, maupun di Pengadilan Tinggi Palangkaraya sendiri. Untuk mendapatkan surat ijin Penelitian, Riset dan Studi tidak perlu lagi ke kantor Pengadilan Tinggi Palangkaraya, cukup dengan melakukan proses registrasi pada Aplikasi ini dan data akan diproses selama 30 menit. Setelah itu para pelajar dapat mendownload surat ijin Penelitian, Riset dan Studi yang sudah diverifikasi menggunakan barcode.</p>
		Sistem Informasi Data Advokat (SIDAT)	 <p>Aplikasi ini dibuat untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memudahkan masyarakat dalam mencari data-data advokat wilayah Kalimantan Tengah</li> <li>2. Memudahkan Organisasi Advokat dalam melakukan pendaftaran penyumpahan advokat di Pengadilan Tinggi Palangkaraya</li> </ol>

	Aplikasi Survey Pelayanan Elektronik (SISUPER)		Merupakan aplikasi yang bertujuan untuk melakukan Survei Perilaku Anti Korupsi, Survei Kepuasan Masyarakat dan Survei Harian secara Elektronik.
	Antrian Pengunjung Loket Meja Layanan PTSP		Aplikasi Antrian Pengunjung Loket Meja Layanan pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya
	Eletronik Buku Tamu		Aplikasi yang membantu pencatatan tamu/pengunjung pengadilan secara elektronik dan fitur menyimpan foto.
	Meja Layanan Prioritas		Layanan Prioritas ditujukan kepada para pencari Keadilan yang memiliki kebutuhan khusus sehingga tidak perlu mengantre apabila meja layanan PTSP sedang melayani tamu.

		SOP Percepatan Penyelesaian Perkara	 <p>PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA NOMOR : 80 /KPT/HK/SK/4/2021</p> <p>TENTANG PEMBERLAKUAN STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE (SOP) PERCEPATAN PENYELESAIAN PERKARA PADA PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA</p> <p>KETUA PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA,</p> <p>Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kejujuran Kehakiman, Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengusai segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.</p> <p>Merupakan SK yang memberlakukan penyelesaian perkara tingkat banding dari 30 hari menjadi 25 hari kalender.</p>
		HUMA BETANG - E-Besuk - SIAP PADUKA	   <p>Huma Betang merupakan Aplikasi Integrasi beberapa inovasi Pengadilan Tinggi Palangkaraya. Untuk saat ini, Huma Betang terdiri dari Aplikasi E-Besuk yang berfungsi untuk membantu masyarakat dalam melakukan permohonan izin besuk tahanan Pengadilan di seluruh wilayah hukum Kalimantan Tengah dan SIAP PADUKA yang berfungsi untuk membantu masyarakat memonitor proses perbaikan akta kependudukan berdasarkan putusan/penetapan pengadilan.</p>

2	<b>INTERNAL</b>	Management Kontrol Dokumen HATIWASBID dan HATIWASDA (MAKBIDA) Versi. 1.0	 <p>Aplikasi ini berfungsi sebagai wadah dokumen-dokumen elektronik seperti Laporan Hasil Pengawasan (LHP) dan Laporan Tindak Lanjut yang berkaitan dengan Pengawasan Bidang-Bidang di Pengadilan Tinggi Palangkaraya dan Pengawasan Daerah pada seluruh Pengadilan Negeri se-Kalimantan Tengah.</p>
		Monitoring Implementasi SIPP Pengadilan Negeri se-Kalimantan Tengah	 <p>Merupakan aplikasi yang membantu Hakim Tinggi Pengawas Daerah untuk memonitoring Pelaksanaan Implementasi SIPP pada Pengadilan Negeri se-Kalimantan Tengah</p>
		Sistem Informasi Master Dokumen (SIMASDOK)	 <p>Aplikasi ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan elektronik dokumen-dokumen pendukung segala kegiatan seperti Surat Keputusan, Laporan Realisasi Anggaran, Notulen Rapat, dan lain-lain.</p>
		Aplikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu	 <p>Merupakan Aplikasi Pencatatan Register Surat Masuk dan Surat Keluar pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya</p>



# BAB VI

# PENGAWASAN

## A. INTERNAL

### I. PENGAWASAN MELEKAT

Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016, tanggal 25 Juli 2016 tentang pengawasan dan pembinaan atasan langsung di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan peradilan dibawahnya, berkaitan dengan PERMA tersebut Pengadilan Tinggi Palangkaraya telah melaksanakan pengawasan melekat yang berupa serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang dilaksanakan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara terus menerus agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan efektif dan efisien sesuai rencana dan berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku;

Dalam pelaksanaan pengawasan melekat ini, di lingkungan Pengadilan Tinggi Palangkaraya meliputi pengawasan pembinaan bidang-bidang pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya, pengawasan daerah pada Pengadilan Negeri di-wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palangkaraya dan menindak lanjuti pengaduan;

1. Pengawasan Bidang pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya.

Pengawasan bidang dilakukan oleh para Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya yaitu dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor:17/KPT/SK/PS/I/2021 tanggal 4 Januari 2021 yang kemudian dicabut dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor:182/KPT/SK/PS/11/2021 tanggal 15 Nopember 2021 yang susunan Hakim Tinggi Pengawas Bidang sebagai berikut :

NO	BIDANG PENGAWASAN	HAKIM TINGGI
1.	BIDANG PERDATA DAN EKSEKUSI	TOGAR, S.H.,M.H. DWI PRAPTI MARYUDIATI, S.H. WAHYU PRASETYO WIBOWO, S.H., M.H.
2.	BIDANG PIDANA	S.H.D. SINURAYA, S.H., M.H. NAWAJI, S.H. DESBENNERI SINAGA, S.H., M.H.
3.	BIDANG HUKUM/ IPK / IKM	DWI PRAPTI MARYUDIATI, S.H. TRI ANDITA JURISTIAWATI, S.H. DIDIT SUSILO GUNTONO, S.H., M.H.
4.	BIDANG TINDAK PIDANA KORUPSI	H. IRWAN EFFENDI, S.H., M.H. GATUT SULISTYO, S.H., M.H. DR. ANDREAS ENO TIRTAKUSUMA, S.H., M.H. AJIDINNOR, S.H., M.H.

5.	BIDANG SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN TI	SITI ROCHMAH, S.H. AKHMAD JAINI, S.H., M.H. SUKO PRIYOWIDODO, S.H.
6.	BIDANG SUB BAGIAN RENCANA PROGRAM DAN ANGGARAN	MOHAMMAD NOOR, S.H., M.H. TRI ANDITA JURISTIAWATI, S.H. HERU PRAKOSA, S.H., M.H.
7.	BIDANG SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PELAPORAN	RICHARD SILALAHI, S.H. DJOKO INDIARTO, SH., M.H. MAURID SINAGA, S.H., M.HUM.
8.	BIDANG SUB BAGIAN TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA	NAWAJI, S.H. SITI JAMZANAH, S.H., M.H. WAHYU PRASETYO WIBOWO, S.H., M.H.
9.	KESEHATAN DAN OLAHRAGA	DJOKO INDIARTO, SH., M.H. DR. ANDREAS ENO TIRTAKUSUMA, S.H., M.H.
10	BIDANG PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)	ABDUL RA`UF, S.H., M.H. ANNE RUSIANA, S.H., M.HUM. AKHMAD JAINI, S.H., M.H.
11	BIDANG PEMBINAAN MENTAL/SPIRITUAL	S.H.D. SINURAYA, S.H., M.H. ABDUL RA`UF, S.H., M.H.
12	BIDANG KESEHATAN DAN OLAHRAGA	GATUT SULISTYO, S.H., M.H. DR. ANDREAS ENO TIRTAKUSUMA, S.H., M.H.
13	HUMAS	WAHYU PRASETYO WIBOWO, S.H., M.H. DR. ANDREAS ENO TIRTAKUSUMA, S.H., M.H.

Dalam melaksanakan tugasnya Hakim pengawas bidang meliputi :

1. Bidang Teknis, yaitu :

- a. Memantau pelaksanaan penyelesaian perkara banding di Pengadilan Tinggi Palangkaraya;
- b. Memantau dan memeriksa prosedur penerimaan perkara banding, administrasi register perkara banding;
- c. Memantau dan memeriksa laporan perkara banding dan kearsipan perkara banding;
- d. Memberikan petunjuk dan bimbingan sesuai pola pembinaan dan administrasi perkara;
- e. Menginventarisir temuan baik teknis maupun administrasi peradilan dan menyampaikan laporannya kepada Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya dengan disertai saran dan solusinya;

2. Bidang Administrasi, yaitu :

- a. Memantau pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan;
- b. Memantau kedisiplinan dan kinerja setiap pegawai Pengadilan Tinggi Palangkaraya baik Hakim, Pejabat Kepaniteraan, Pejabat Kesekretariatan beserta stafnya;

Hasil pengawasan bidang sebelum rapat bulanan diserahkan kepada Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya selaku koordinator pengawas bidang untuk dilakukan monitoring dan evaluasi.

Hasil pengawasan bidang sebelum rapat bulanan diserahkan kepada Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya selaku koordinator pengawas bidang untuk dilakukan monitoring dan evaluasi. Bahwa guna meningkatkan pelayanan pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya dengan cara mempermudah dan menyederhanakan tata cara pelayanan, berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:3239/DJU/SK/HM.02.3/II/2019 Pasal 6 angka 5 perlu ditunjuk Pengawas untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya pelayanan pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor:182/KPT/SK/PS/11/2021 tanggal 15 November 2021 pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya dengan susunan sebagai berikut:

NO	NAMA	NIP	JABATAN
1.	ABDUL RA`UF, S.H., M.H.	196203281988031004	Hakim Tinggi
2.	ANNE RUSIANA, S.H., M.HUM.	196204011988032001	Hakim Tinggi
3.	AKHMAD JAINI, S.H., M.H.	196011181982031004	Hakim Tinggi

Pengawas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya bertugas melakukan pengawasan terhadap jalannya pelayanan pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) serta membuat laporan hasil pengawasan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya untuk setiap bulannya.

## II. PENGAWASAN DAERAH

Didalam melaksanakan pengawasan daerah di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palangkaraya, pada Tahun 2021 Pengadilan Tinggi Palangkaraya telah melaksanakan 1 (satu) kali pengawasan dan 1 (satu) kali pembinaan. Pengawasan dan Pembinaan tersebut dilakukan secara mengunjung Pengadilan Negeri yang dimaksud (*on the spot*).

Untuk itu Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya telah membentuk tim pembinaan dan pengawasan Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palangkaraya dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor:183/KPT/SK/PS/11/2021 tanggal 15 November 2021 dengan susunan sebagai berikut :

WAKIL KETUA PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA		KOORDINATOR
NO	HAKIM TINGGI PENGAWAS DAERAH	DAERAH PENGAWASAN
1	WAHYU PRASETYO WIBOWO, S.H., M.H. ANNE RUSIANA, S.H., M.HUM.	PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA

	GATUT SULISTYO, S.H., M.H.	
	DR. ANDREAS ENO TIRTAKUSUMA, S.H., M.H.	
2	S.H.D. SINURAYA, S.H., M.H.	PENGADILAN NEGERI SAMPIT
	WAHYU PRASETYO WIBOWO, S.H., M.H.	
	SITI ROCHMAH, S.H.	
	MAURID SINAGA, S.H., M.HUM.	PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN DAN
3	MOHAMMAD NOOR, S.H., M.H.	PENGADILAN NEGERI NANGA BULIK
	RICHARD SILALAHI, S.H.	
	SUKO PRIYOWIDODO, S.H.	PENGADILAN NEGERI KUALA KAPUAS DAN
4	ABDUL RA`UF, S.H., M.H.	PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU
	SITI JAMZANAH, S.H., M.H.	
5	DWI PRAPTI MARYUDIATI, S.H.	PENGADILAN NEGERI BUNTOK
	DJOKO INDIARTO, SH., M.H.	
	AKHMAD JAINI, S.H., M.H.	
	NAWAJI, S.H.	PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH
6	H. IRWAN EFFENDI, S.H., M.H.	
	TRI ANDITA JURISTIAWATI, S.H.	
	TOGAR, S.H.,M.H.	PENGADILAN NEGERI TAMIANG LAYANG
7	AKHMAD JAINI, S.H., M.H.	
	DESBENNERI SINAGA, S.H., M.H.	
	AJIDINNOR, S.H., M.H.	PENGADILAN NEGERI KASONGAN
8	ANNE RUSIANA, S.H., M.HUM.	
	SITI ROCHMAH, S.H.	
	TOGAR, S.H.,M.H.	PENGADILAN NEGERI KUALA KURUN
9	HERU PRAKOSA, S.H.,M.H.	
	DIDIT SUSILO GUNTONO, S.H., M.H.	

Dari hasil pengawasan baik itu temuan, saran dan tindak lanjut harus dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya dalam waktu 1 (satu) bulan untuk evaluasi guna penyempurnaan pelaksanaan tugas di Pengadilan Negeri yang bersangkutan pada masa yang akan datang;

### III. PENGADUAN

Pada Tahun 2021 Pengadilan Tinggi Palangkaraya dalam menangani pengaduan telah berpedoman pada peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistle Blowing System*) di Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada dibawahnya.



Pengadilan Tinggi Palangkaraya selama tahun 2021 telah memproses **1 (satu)** pengaduan yang masuk ke bagian Kepaniteraan Hukum, Kepaniteraan telah merespon keluhan-keluhan baik yang berasal dari pencari keadilan, masyarakat pada umumnya maupun tindak lanjut atas laporan instansi lain.

### B. EVALUASI

Dalam rangka evaluasi hasil pengawasan baik internal (pengawas bidang) maupun eksternal (pengawas daerah), Pengadilan Tinggi Palangkaraya telah menyediakan aplikasi yang berfungsi untuk menyimpan laporan hasil pengawasan dan tindak lanjut sebagaimana dimaksud. Aplikasi tersebut diberi nama Management Kontrol HATIWASBID dan HATIWASDA (MAKBIDA).



Pada Tahun 2021 setelah dilakukan pengawasan internal baik terhadap Pengadilan Tinggi Palangkaraya maupun Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palangkaraya telah ditemukan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada umumnya Pengadilan Tinggi Palangkaraya dan Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palangkaraya telah melaksanakan tugas sesuai peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku walau masih perlu adanya peningkatan dibidang teknis dan administrasi.
2. Baik di Pengadilan Tinggi Palangkaraya dan semua Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palangkaraya sangat kurang jumlah pegawaiannya sehingga terdapat jabatan yang masih dirangkap.
3. Seluruh Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palangkaraya telah menerapkan SIPP dan PTSP dengan baik walaupun kadang ada kendala internet yang kurang lancar, hal ini setiap bulan dilakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaannya.
4. Dalam rangka pembinaan di Pengadilan Tinggi Palangkaraya selalu diadakan rapat bulanan untuk mengevaluasi pekerjaan yang sudah dilaksanakan dan rencana kerja yang akan dilakukan serta pimpinan selalu mengingatkan dan mensosialisasikan PERMA Nomor 7 Tahun 2016, PERMA Nomor.8 Tahun 2016 dan PERMA Nomor. 9 Tahun 2016 serta Maklumat Ketua Mahkamah Agung Nomor. 01/Maklumat/KMA/IX/2017.
5. Untuk Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palangkaraya pada tahun 2021 diadakan pembinaan langsung dengan memanggil Ketua Pengadilan Negeri, Wakil Ketua Pengadilan Negeri, Panitera dan Sekretaris ke Pengadilan Tinggi Palangkaraya. Sebelumnya, selama ada pandemic Covid-19 pembinaan dilaksanakan secara daring, tetapi karena covid-19 menurun pelaksanaan pembinaan secara langsung. Materi pembinaan pada bidang kepaniteraan dan kesekretariatan disampaikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi secara rinci.



## BAB VII

# PENUTUP

### A. SIMPULAN

Seluruh program dan kegiatan selama tahun 2021 di Pengadilan Tinggi Palangkaraya maupun Pengadilan Negeri di wilayah hukumnya telah dilaksanakan dengan baik meskipun belum didukung oleh kecukupan sumberdaya manusia dan sarana prasarana, baik di dalam lingkungan gedung kantor maupun rumah dinas.

Pengadilan Tinggi Palangkaraya dan Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palangkaraya senantiasa mengupayakan terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel serta peningkatan efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan penyelesaian perkara. Hal ini diupayakan dengan meningkatkan penyelesaian perkara dari sisi percepatan waktu penyelesaian dan kualitas putusan serta meningkatkan pelayanan publik dengan menghadirkan berbagai inovasi berupa aplikasi pelayanan publik sehingga mampu meningkatkan kepuasan bagi para pencari keadilan, juga secara aktif melakukan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal, baik internal maupun eksternal.

Sumberdaya manusia, yaitu para aparatur peradilan, merupakan sumberdaya yang sangat berharga dalam rangka mencapai visi dan misi lembaga peradilan. Sumberdaya manusia, baik di Pengadilan Tinggi Palangkaraya maupun di Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palangkaraya, walaupun mengalami kekurangan namun telah dikelola secara transparan, akuntabel, efektif dan efisien berdasarkan parameter yang objektif. Produktifitas kinerjanya senantiasa dijaga dan ditingkatkan. Penambahan Hakim dan Pegawai di tiap satuan kerja menjadi hal yang penting untuk segera dipenuhi.

Keuangan dan aset juga merupakan bagian yang penting dalam mendukung tercapainya lembaga peradilan yang agung. Kebutuhan standar sarana dan prasarana harus terpenuhi untuk mendukung peningkatan pelayanan prima. Selain itu, untuk mendukung tercapainya WTP maka pelaporan keuangan telah dilakukan dan disampaikan tepat waktu.

Pengadilan Tinggi Palangkaraya berhasil mempertahankan prestasinya dalam Lomba Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) kategori pengadilan tinggi dengan memperoleh Juara II Tahun 2021. Sedangkan Pengadilan Negeri Sampit juga berhasil mempertahankan prestasinya dengan meraih Juara Harapan II untuk kategori Pengadilan Negeri Kelas I B. Lomba PTSP ini diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI. Pemenang lomba tersebut di atas ditetap

dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 2054/DJU/SK/HM.02.3/10/2021 tanggal 18 Oktober 2021.

Pada tahun 2021, Pengadilan Negeri Pangkalan Bun juga telah meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Prestasi ini melengkapi prestasi-prestasi sebelumnya yang telah dicapai, antara lain:

- Pengadilan Tinggi Palangkaraya memperoleh predikat WBK pada tahun 2020
- Pengadilan Negeri Sampit memperoleh predikat WBK pada tahun 2019

## B. SARAN

Saran yang dapat disampaikan oleh Pengadilan Tinggi Palangkaraya dan Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi Mahkamah Agung RI yaitu sebagai berikut:

NO.	NAMA	SARAN
1.	Pengadilan Tinggi Palangkaraya	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perlu peningkatan sumberdaya manusia, baik secara kualitas maupun kuantitas.</li><li>2. Perlu penambahan pegawai untuk menjaga stabilitas kinerja.</li><li>3. Perlu peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung peningkatan pelayanan prima.</li><li>4. Perlu dilakukan renovasi terhadap rumah dinas dan seharusnya dilengkapi dengan meubelair yang layak.</li></ol>
2.	Pengadilan Negeri Palangkaraya	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perlu dilakukan pelatihan dan pembinaan baik Teknis maupun Non Teknis agar dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat berjalan dengan lancar dan mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.</li><li>2. Perlu peningkatan sarana dan prasarana serta keterampilan Sumber Daya Manusia untuk peningkatan pencapaian target pelayanan publik yang prima dan berbasis IT (Informasi Teknologi).</li><li>3. Perlu adanya penambahan personil pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, baik itu Hakim, Panitera Pengganti, Jurusita, maupun staf mengingat Sumber Daya Manusia yang dimiliki saat ini masih terbatas.</li></ol>
3.	Pengadilan Negeri Sampit	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Rumah Dinas memerlukan rehabilitasi/renovasi dan pembuatan pagar, mohon kiranya agar pada tahun 2022 dapat disediakan anggaran untuk rehabilitasi rumah dinas Hakim dan Panitera</li></ol>

		<p>yang kurang layak, serta pembuatan rumah dinas untuk Sekretaris.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Kendaraan dinas baik roda empat maupun roda dua yang kurang layak, guna meningkatkan kinerja serta mendukung operasional sehari-hari diharapkan ada penggantian kendaraan dinas tersebut.</li> <li>3. Karena volume perkara pada Pengadilan Negeri Sampit baik perkara pidana maupun perkara perdata sangat tinggi berharap ada penambahan sumber daya manusia (SDM), jumlah pegawai yang ada saat ini sangat kurang sehingga masih terdapat rangkap jabatan.</li> </ol>
4.	Pengadilan Negeri Pangkalan Bun	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bidang Sumber Daya Manusia di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas IB sangat kekurangan pegawai baik untuk staf kepaniteraan ataupun staf kesekretariatan, kekurangan kebutuhan pegawai sementara ini, agar operasional kantor dapat terlaksana sesuai dengan pembagian tugas berdasarkan Tupoksi yang ada, ditempuh dengan memperdayakan Pegawai honorer-honorer yang ada. Selain itu masih adanya jabatan-jabatan yang diisi oleh PLT dan kebutuhan Tenaga Fungsional terkait perkara yang semakin meningkat, mengingat kurang Panitera Pengganti dan masih ada jabatan-jabatan yang kosong antara lain, Kepala Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan dibutuhkan tambahan tenaga fungsional dan promosi-promosi jabatan untuk mengisi kekosongan itu.</li> <li>2. Peningkatan pengetahuan Sumber Daya Manusia dipandang perlu rutinitas dilakukan melalui bimbingan teknis, pelatihan, pembinaan dan lain-lain. Kesempatan demikian dibutuhkan oleh seluruh Hakim dan karyawan, khususnya yang tugas di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas I B, mengingat perkembangan regulasi Mahkamah Agung terus berkembang serta banyaknya inovasi-inovasi baru dari Mahkamah Agung yang sudah mengimplementasikan teknologi informasi dan hal-hal tersebut membutuhkan bimbingan untuk memahaminya.</li> <li>3. Guna menunjang tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja, Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas I B saat ini masih sangat membutuhkan dukungan sarana dan prasarana seperti mobil dinas, laptop, printer, scanner, dan perangkat pendukung</li> </ol>

		<p>lainnya.</p> <p>4. Perlu adanya anggaran untuk rehabilitasi gedung Pengadilan Negeri Pangkalan Bun mengingat semakin berkembangnya standar pelayanan peradilan dan ruangan penunjang juga semakin bertambah, maka dari itu perlu adanya rehabilitasi gedung agar gedung bangunan kantor Pengadilan Negeri Pangkalan Bun bisa sesuai dengan standar Mahkamah Agung RI.</p>
5.	Pengadilan Negeri Kuala Kapuas	<p>1. Untuk menunjang tugas-tugas peradilan perlu ditunjang dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai, baik yang berhubungan dengan perkantoran, perumahan dinas Wakil Ketua, Hakim, Panitera, dan Sekretaris, maupun pengadaan kendaraan dinas roda 2 (dua) bagi pejabat struktural dan fungsional agar dapat memperlancar transportasi pegawai dalam melaksanakan tugasnya.</p> <p>2. Guna meningkatkan layanan prima pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II dan menjaga stabilitas kinerja maka perlu dilakukan penambahan pegawai. Mengingat masih ada aparatur yang melaksakan rangkap jabatan pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II.</p> <p>3. Guna meningkatkan profesionalisme dan mutu kinerja serta memperluas wawasan pegawai baik bagi Hakim, Panitera, Panitera Pengganti, Jurusita, Jurusita Pengganti, Pejabat Struktural, Bendahara dan staf perlu adanya pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan dan kontinue.</p>
6.	Pengadilan Negeri Muara Teweh	<p>1. Pada saat ini tenaga honorer di Pengadilan Negeri Muara Teweh berjumlah 8 (delapan) orang. Kami sangat mengharapkan Mahkamah Agung RI dapat memberikan perhatian lebih dan dapat mengangkat mereka menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, mengingat kontribusi mereka dalam membantu penyelesaian pekerjaan pegawai Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas II.</p> <p>2. Mengingat hingga saat ini belum ada pegawai Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas II yang memiliki kompetensi dalam bidang teknologi informasi, penata laporan keuangan, arsiparis dan pustakawan maka kami mengharapkan agar Mahkamah Agung RI dapat menempatkan beberapa orang pranata komputer, penata laporan keuangan, arsiparis dan pustakwan</p>

		pada Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas II atau mengadakan bimbingan teknis kepada jajaran Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas II.
7.	Pengadilan Negeri Buntok	<ol style="list-style-type: none"> <li>Untuk menunjang tugas-tugas peradilan perlu ditunjang dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai, baik yang berhubungan dengan perkantoran (Genset, AC, PC, dll) maupun pengadaan kendaraan dinas roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) bagi pejabat struktural dan fungsional agar dapat memperlancar transportasi pegawai dalam melaksanakan tugasnya.</li> <li>Untuk menunjang tugas-tugas dalam pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan, maka Pengadilan Negeri Buntok Kelas II perlu diberikan anggaran untuk Pembangunan Gedung Kantor yang memenuhi standar prototype, mengingat gedung Pengadilan Negeri Buntok Kelas II merupakan satu-satunya Pengadilan Negeri yang belum memenuhi standar prototype.</li> <li>Guna meningkatkan profesionalisme dan mutu kinerja serta memperluas wawasan pegawai baik bagi Hakim, Panitera, Panitera Pengganti, Jurusita, Jurusita Pengganti, Pejabat Struktural, Bendahara dan staf perlu adanya pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan dan berkelanjutan.</li> </ol>
8.	Pengadilan Negeri Tamiang Layang	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pada umumnya pelaksanaan tugas pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang telah berjalan dengan cukup baik. Pengawasan juga terus dilakukan untuk mengevaluasi kinerja yang dilakukan, walau masih sering ditemukan ketidaksesuaian namun Pengadilan Negeri Tamiang Layang berkomitment untuk selalu meningkatkan performanya. Selain itu beberapa bimbingan teknis perlu diberikan agar terwujud kualitas SDM yang mumpuni dan profesional baik bimbingan teknis kepaniteraan bagi staff kepaniteraan dan tenaga fungsional maupun bagian kesekretariatan.</li> <li>Pengadilan Negeri Tamiang Layang masih memiliki berbagai kekurangan fasilitas karena masih dalam tahap pembentahan. Terutama Rumah Dinas yang sampai saat ini belum diadakan.</li> <li>Perlu penambahan Anggaran Daya Listrik.</li> <li>Perlunya pengadaan perangkat penunjang sidang <i>online</i>.</li> </ol>
9.	Pengadilan Negeri	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mohon agar terus diadakan bimbingan teknis secara berkesinambungan bagi tenaga fungsional dan kesekretariatan</li> </ol>

	Kasongan	<p>yang ada di Pengadilan Negeri Kasongan sebagai upaya peningkatan pengetahuan dan kemampuan Aparatur Pengadilan agar dapat meningkatkan performa kinerjanya.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Mohon kiranya ditambah sumber daya manusia di Pengadilan Negeri Kasongan terutama pada posisi staf untuk bagian Kepaniteraan dan Kesekretariatan demi terlaksananya Pelayanan Prima kepada masyarakat pencari keadilan.</li> <li>3. Mohon ditingkatkan Sarana dan Prasarana di Pengadilan Kasongan terutama diadakannya Rumah dinas dan penambahan kendaraan Operasional.</li> </ol>
10.	Pengadilan Negeri Kuala Kurun	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penambahan pegawai sesuai dengan beban tugas Pengadilan Negeri Kurun dengan memperhatikan Beezeting Formation yang dilaporkan setiap tahun.</li> <li>2. Pemenuhan penyediaan sarana prasarana gedung dan kenaikan anggaran pemeliharaan gedung sebagai penunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatkan kewibawaan peradilan sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman.</li> <li>3. Pengembangan Sistem Informasi Teknologi di Pengadilan Negeri Kuala Kurun hendaknya dibarengi dengan peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana di bidang teknologi informasi, dana pemeliharaan untuk pengembangan IT tersebut agar lebih diperhatikan.</li> <li>4. Pengusulan anggaran terhadap sarana dan prasarana penunjang pelayanan setidaknya dapat diprioritaskan.</li> </ol>
11.	Pengadilan Negeri Nanga Bulik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bidang Sumber Daya Manusia di Pengadilan Negeri Nanga Bulik Kelas II sangat kekurangan pegawai baik untuk staf kepaniteraan ataupun staf kesekretariatan, kekurangan kebutuhan pegawai sementara ini, agar operasional kantor dapat terlaksana sesuai dengan pembagian tugas berdasarkan Tupoksi yang ada, ditempuh dengan memberdayakan pegawai honorer-honorer yang ada. Selain itu masih adanya jabatan-jabatan yang diisi oleh PLT dan kebutuhan Tenaga Fungsional terkait perkara yang semakin meningkat, mengingat kurang Panitera Pengganti dan masih ada jabatanjabatan yang kosong antara lain, Kepala Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan dan Kepala Subbagian Kepegawaiaan, Organisasi dan Tatalaksana dibutuhkan tambahan tenaga fungsional dan promosi/promosi jabatan untuk</li> </ol>

		<p>mengisi kekosongan itu.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Peningkatan pengetahuan Sumber Daya Manusia dipandang perlu rutinitas dilakukan melalui bimbingan teknis, pelatihan, pembinaan dan lain-lain. Kesempatan demikian dibutuhkan oleh seluruh Hakim dan karyawan, khususnya yang tugas di Pengadilan Negeri Nanga Bulik Kelas II, mengingat perkembangan regulasi Mahkamah Agung terus berkembang serta banyaknya inovasi-inovasi baru dari Mahkamah Agung yang sudah mengimplementasikan teknologi informasi dan hal-hal tersebut membutuhkan bimbingan untuk memahaminya.</li> <li>3. Guna menunjang tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja, Pengadilan Negeri Nanga Bulik Kelas II saat ini masih sangat membutuhkan dukungan sarana dan prasarana sseperti bangunan gedung kantor (sesuai prototype Mahkamah Agung RI), bangunan rumah dinas (sesuai prototype Mahkamah Agung RI), kendaraan dinas roda 4 (empat) dan roda 2 (dua), laptop, pc komputer, scanner, jaringan wireless dan meubilair lainnya.</li> </ol>
12.	Pengadilan Negeri Pulang Pisau	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mohon kiranya agar pada tahun 2022 adanya Penambahan Aparatur Pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau.</li> <li>2. Mohon agar Pengadilan Tinggi sering mengadakan Pelatihan dan Bimbingan Teknis dikarenakan Pengadilan Negeri Pulang Pisau merupakan satuan kerja baru yang memerlukan Pelatihan dan Bimbingan Teknis.</li> <li>3. Mohon agar diberikan anggaran untuk Sarana Lingkungan Pengadilan Negeri Pulang Pisau.</li> </ol>